

PENGANTAR SOSIOLOGI

DR. BAHARUDDIN, MA

PENGANTAR SOSIOLOGI


Sanabil

Pengantar Sosiologi

© Sanabil 2021

Penulis : Dr. Baharuddin, MA
Editor : Dr. Syamsul Arifin, M.Ag.
Layout : Muhammad Amalahanif
Desain Cover : Sepma Pulthinka Nur Hanip, MA

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-235-6

Cetakan 1 : Oktober 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
Kata Pengantar Dekan	ix
Kata Pengantar	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Sejarah dan Konsep Sosiologi.....	1
B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan.....	5
C. Obyek dan Metode Kajian Sosiologi.....	7
D. Manfaat Sosiologi.....	11
BAB II INDIVIDU DAN MASYARAKAT	
A. Pengertian Individu	15
B. Pengertian Masyarakat	16
C. Ciri-Ciri Masyarakat.....	19
D. Individu dan Masyarakat.....	22
BAB III INTERAKSI SOSIAL DAN PROSES SOSIAL	
A. Interaksi Sosial	25
B. Ciri dan Syarat terjadinya Interaksi Sosial	27
C. Macam-macam Proses Sosial	32
BAB IV LEMBAGA SOSIAL	
A. Pengertian Lembaga Sosial.....	39
B. Unsur-unsur Lembaga Sosial	40
C. Proses Terbentuknya Lembaga Sosial	41
D. Fungsi dan Tujuan Lembaga sosial	45

E. Jenis-jenis Lembaga Sosial.....	47
F. Sistem Pengendalian Sosial.....	48
G. Ciri-Ciri Umum Lembaga Sosial.....	50
H. Tipe-Tipe Lembaga Sosial.....	51
I. Cara Mempelajari Lembaga Sosial.....	52
J. Perubahan Lembaga Sosial.....	53

BAB V KELOMPOK SOSIAL

A. Pengertian Kelompok Sosial.....	55
B. Pendekatan Sosiologi Terhadap Kelompok Sosial	56
C. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial.....	56
D. Jenis-Jenis Kelompok Sosial.....	59
E. Dinamika Kelompok Sosial.....	64
F. Kelompok Sosial dalam kehidupan Masyarakat.....	65

BAB VI MOBILITAS SOSIAL

A. Pengertian Mobilitas Sosial.....	67
B. Jenis Mobilitas Sosial	68
C. Saluran-Saluran Mobilitas Sosial.....	70
D. Determinan Mobilitas Sosial.....	71
E. Konsekuensi Mobilitas Sosial.....	72

BAB VII STRATIFIKASI SOSIAL

A. Pengertian Stratifikasi Sosial	74
B. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial	74
C. Terjadi Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat	76
D. Sifat Sistem Stratifikasi Sosial.....	79
E. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial	80
F. Dasar-Dasar Stratifikasi Sosial	82

G. Perspektif Tentang Stratifikasi Sosial.....	84
H. Cara Mempelajari Stratifikasi Sosial	86
I. Fungsi Stratifikasi Sosial	87

BAB VIII STRUKTUR SOSIAL

A. Pengertian Struktur Sosial	90
B. Ciri-ciri Struktur Sosial.....	91
C. Fungsi Struktur Sosial	93

BAB IX PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Perubahan Sosial.....	97
B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial.....	99
C. Faktor-Faktor Perubaha Sosial	99
D. Proses Perubahan Sosial	103
E. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial.....	105
F. Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan Sosial.....	108

BAB X KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kekuasaan.....	111
B. Pengertian Wewenang.....	124
C. Pengertian Kepemimpinan.....	128

BAB XI SISTEM SOSIAL

A. Pengertian Sistem Sosial	134
B. Sistem Sosial dalam Sosiologi	136
C. Komponen-Komponen Sistem Sosial	138
D. Fungsi-Fungsi Sistem Sosial.....	140

BAB XII ORGANISASI SOSIAL

A. Pengertian Organisasi Sosial	143
B. Pembentukan Organisasi Sosial.....	145
C. Ciri-Ciri Organisasi Sosial.....	146
D. Tipe-Tipe Organisasi Sosial.....	149
E. Organisasi Sosial Sebagai Sebuah Sistem	152

BAB XIII TEORI-TEORI SOSIOLOGI

A. Teori Sosiologi	158
B. Teori-Teori Utama dalam Sosiologi	161

BAB XIV PARADIGMA UTAMA SOSIOLOGI

A. Paradigma Sosiologi	177
B. Paradigma Utama Sosiologi.....	182

BAB XV KEBUDAYAAN

A. Pengertian Kebudayaan	186
B. Tiga Wujud Kebudayaan	190
C. Unsur-Unsur Kebudayaan.....	191
D. Hakikat dan Perwujudan Kebudayaan.....	192
E. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat.....	192
Daftar Pustaka	194

KATA PENGANTAR DEKAN

Alhamdulillah, dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. sungguhpun produksi keilmuan dosen tidak akan pernah berakhir, setidaknya tuntasnya penulisan Buku Ajar dan Referensi oleh para dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram ini merupakan satu bagian penting di tengah tuntutan akselerasi pengembangan kompetensi dosen, dan penguatan blended learning sebagai implikasi dari pandemi Covid-19 saat ini.

Penerbitan Buku Ajar dan Referensi melalui program Kompetisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram tahun 2021 adalah upaya untuk diseminasi hasil-hasil dosen dan buku ajar yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai. Sebagian besar hasil riset para dosen tersimpan di lemari, tanpa terpublish, sehingga tidak accessible secara luas, baik hardcopy maupun secara online. Demikian juga buku ajar, yang selama ini hanya digunakan secara terbatas di kelas, kini bisa diakses secara lebih luas, tidak hanya mahasiswa dan dosen FTK UIN Mataram, juga khalayak luar. Dengan demikian, kebutuhan pengembangan karir dosen dapat berjalan lebih cepat di satu sisi, dan peningkatan kualitas proses dan output pembelajaran di sisi lain.

Kompetisi buku Referensi dan Buku Ajar pada tahun 2021 berjumlah 95, masing-masing buku referensi 75 judul dan buku ajar 20 judul. Di samping itu, 95 buku tersebut juga memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga tahun 2021 menghasilkan 95 HKI dosen.

Kompetisi buku ajar dan referensi tahun 2021 berorientasi interkoneksi-integrasi antara agama dan sains, berspirit Horizon

Ilmu UIN Mataram dengan inter-multi-transdisiplin ilmu yang mendialogkan metode dalam Islamic studies konvensional berkarakteristik deduktif-normatif-teologis dengan metode humanities studies kontemporer seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, hermeneutik, fenomenologi dan juga dengan metode ilmu eksakta (natural sciences) yang berkarakter induktif-rasional. Buku yang dikompetisikan dan diterbitkan pada Tahun 2021 sejumlah 75 buku referensi dan 20 buku ajar untuk kalangan dosen. Disamping kompetisi buku untuk dosen, FTK UIN Mataram juga menyelenggarakan kompetisi buku bagi mahasiswa. Ada 20 judul buku yang dikompetisikan dan telah disusun oleh mahasiswa. Hal ini tentunya menjadi suatu pencapaian yang patut untuk disyukuri dalam meningkatkan kemampuan literasi dan karya ilmiah semua civitas akademika UIN Mataram.

Mewakili Fakultas, saya berterima kasih atas kebijakan dan dukungan Rektor UIN Mataram dan jajarannya, kepada penulis yang telah berkontribusi dalam tahapan kompetisi buku tahun 2021, dan tak terlupakan juga editor dari dosen sebidang dan penerbit yang tanpa sentuhan zaufnya, performance buku tak akan semenarik ini. Tak ada gading yang tak retak; tentu masih ada kurang, baik dari substansi maupun teknis penulisan, di 'ruang' inilah kami harapkan saran kritis dari khalayak pembaca. Semoga agenda ini menjadi amal jariyah dan hadirkan keberkahan bagi sivitas akademika UIN Mataram dan umat pada umumnya.

Mataram, 25 Oktober 2021



Dr. Jumarim, M.H.I

NIP.197612312005011006

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد!

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Karya ini dapat dirampungkan sebagaimana mestinya, hanya karena hidayah dan *ma'unah* (pertolongan) Allah SWT. Masa-masa sulit telah penulis lewati sepanjang penulisan disertasi ini. Oleh karena itu, ungkapan pertama yang penulis panjatkan adalah *Alhamdulillah*, segala puji hanya tertuju dan milik Allah SWT.

Selanjutnya, shalawat dan salam tak henti-hentinya kita persembahkan kepada baginda Nabi SAW, keluarga dan sahabat-sahabat yang setia menyertai dan mendukung perjuangan beliau dalam menegakkan kalimah Allah.

Sosiologi termasuk ke dalam ilmu sosial yang menjadikan masyarakat sebagai obyek kajiannya. Untuk membedakan dirinya dengan ilmu-ilmu sosial yang lain, Sosiologi memfokuskan kajiannya tentang masyarakat dilihat dari struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Masyarakat adalah kumpulan individu yang tinggal pada suatu wilayah. Kumpulan individu ini mempunyai karekter tersendiri yang dapat dibedakan dengan masyarakat lain. Ilmu sosial mencoba memahamai, menelaah, meneliti, mencari persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami tingkah laku individu dalam masyarakat dan interaksi masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Ia mencoba memahami pikiran, ide, gagasan, lembaga sosial yang muncul sebagai akibat dari perbedaan pemilikan atas barang-barang yang dianggap bernilai, persaingan dan konflik yang timbul akibat dari usaha

memperebutkan nilai-nilai yang dianggap bernilai; perubahan-perubahan sosial, baik dalam artian pikiran, gagasan, struktur sosial maupun dalam artian lembaga sosial secara keseluruhan.

Dengan sosiologi, setiap orang mudah memahami dirinya, tindakannya, tindakan orang lain, dan fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sosialnya. Dengan sosiologi pula kita dapat merencanakan sosial yang efektif, merancang dan menganalisis suatu penelitian sosial, menyusun pembangunan, serta memecahkan berbagai persoalan sosial. Dengan demikian jelaslah bahwa, sosiologi pengetahuan yang mengkaji masyarakat dari sisi proses sosial dan struktur sosial, serta perubahan sosialnya.

Buku ini membahas tentang berbagai persoalan mengenai sosiologi, yang meliputi: sejarah lahirnya sosiologi, individu dan masyarakat, interaksi dan proses sosial, stratifikasi sosial, kelompok sosial, mobilitas sosial, lembaga sosial, struktur sosial, perubahan sosial, kekuasaan, wewenang dan kepemimpinan, system sosial, organisasi sosial, serta berbagai persoalan tentang teori-teori sosial.

Secara khusus, buku pengantar sosiologi ini disajikan sebagai bahan bacaan ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa, para pengajar, mereka yang sedang mendalami sosiologi dan teori-teori sosial. Secara umum, buku ini bisa dimanfaatkan bagi siapa saja yang bermaksud mendalami konsep-konsep sosiologi dan teori-teori sosial, baik secara teoritik, maupun praktis.

Terlepas dari semua itu, buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan lantaran keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulisnya, oleh sebab ini, kritik-konstruktif demi kesempurnaan buku, penulis sangat harapkan dari semua pihak.

Terbitnya buku ini tidak terlepas dari sumbangsih berbagai pihak, terutama Prof. Dr. Masnun, M.Ag (Rektor UIN Mataram), Prof. Dr. Ady Fadli, M.Ag, Dr. Saparudin, M. Ag, Khalakul

Khairi, M. Ag, Dr. Lalu Khatibul Umam, M.Ag, Dr. Astrin, M. Pd, Dr. Muhammad Sa'i, MA, dan teman-teman diskusi penulis yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan juga kepada saudara Umi Latifah, S. Ag yang telah mengedit edit buku ini dengan secara teliti, sehingga dapat berbentuk buku yang ada di tangan pembaca. Tak lupa juga penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada saudara Achmad Khazali yang telah bersedia menerbitkan buku pengantar sosiologi ini.

Akhirnya penulis menyerahkan kepada sidang pembaca dan semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca, amien.

Gelogor, Juni 2021

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah dan Konsep Sosiologi

1. Sejarah Lahirnya Sosiologi

Kelahirnya sosiologi, sangat berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Eropa Barat pada masa revolusi Industri (Inggris) dan revolusi sosial (Prancis). Kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan membawa kehidupan yang moderen bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya, revolusi menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antarwarga masyarakat. Dengan kata lain, terjadinya kesenjangan antara apa yang diharapkan dan apa yang ada (Ritzer dan Goodman, 2004:7-9).

Menurut Laeyendecker (1983:11) menyatakan, bahwa selain disebabkan oleh kedua revolusi di atas, sosiologi juga lahir dikaitkan dengan serangkaian perubahan jangka panjang yang diidentifikasi Laeyendecker sebagai pendorong lahirnya sosiologi, yaitu: (1) tumbuhnya kapitalisme pada abad ke 15; (2) perubahan dibidang sosial dan politik, (3) perubahan berkenaan dengan reformasi Martin Luther, (4) meningkatnya individualisme, (5) lahirnya ilmu pengetahuan modern, dan (6) berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri (Basrowi, 2006: 2).

Sementara itu, Ritzer dan Goodman (2004: 210) menjelaskan bahwa kekuatan sosial yang mendorong pertumbuhan sosiologi ialah: (1). revolusi politik, (2) revolusi industri dan munculnya kapitalisme, (3) munculnya sosialisme, (4) urbanisasi, (5) perubahan keagamaan, dan (6) pertumbuhan ilmu.

Sejak tahun 1800-an, ketika Auguste Comte untuk pertama kalinya memakai kata sosiologi dalam bukunya yang berjudul

Positive Philosophy pada tahun 1802, sosiologi kemudian diakui sebagai ilmu pengetahuan dan Comte kemudian sering disebut-sebut sebagai bapak sosiologi. Comte mengusulkan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berdasarkan pengamatan yang sistematis dan mengklarifikasi perilaku manusia.

Pada tahun 1876, Herbert Spencer di Inggris menerbitkan teks sosiologi pertama, diikuti oleh Lester F Ward dengan bukunya yang berjudul *Dynamic Sociology* di Amerika pada tahun 1883. Langkah-langkah tersebut kemudian diikuti oleh Max Weber di Jerman, Emile Durkheim di Perancis, dan William Graham Sumner, Charles Horton Cooley, dan Albion W Small di Amerika Serikat. Walaupun kebanyakan tulisan mereka bersifat spekulatif dan filosofis, tetapi hal itu merupakan garis besar metode analisa ilmiah dan memberi banyak sumbangan pada sosiologi modern.

Sejak awal kelahirannya, sosiologi banyak dipengaruhi oleh filsafat sosial. Berbeda dengan filsafat sosial yang banyak dipengaruhi ilmu alam dan memandang masyarakat sebagai “mekanisme” yang dikuasai hukum-hukum mekanis, sosiologi lebih menempatkan warga masyarakat sebagai individu yang relatif bebas. Para filsuf sosial, seperti Plato dan Aristoteles, umumnya berkeyakinan bahwa seluruh tertib dan keteraturan dunia dan masyarakat langsung berasal dari suatu tertib dan keteraturan yang adimaniawi, abadi, tidak terubahkan dan historis. Sementara sosiologi justru mempertanyakan keyakinan lama dari para filsuf itu, dan sebagai gantinya muncullah keyakinan baru yang memandang lebih mencerminkan realitas sosial yang sebenarnya. Para sosiolog telah menyadari bahwa bentuk kehidupan bersama adalah ciptaan manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk masyarakat, gejala pelapisan sosial, dan pola-pola intraksi yang berbeda, sekarang lebih dilihat sebagai hasil inisiatif atau hasil kesepakatan manusia itu sendiri.

Sosiologi baru memperoleh bentuk dan diakui sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri pada abad ke-19. Ini bukan berarti bahwa sosiologi berdiri setelah abad ke-19. Jauh sebelum Auguste Comte memproklamirkan kehadiran sosiologi, orang-orang telah memiliki perhatian dan mengadakan penyelidikan berkaitan dengan masyarakat dan intraksi sosial. Namun yang belum terumuskan menurut metode-metode yang sistematis, pengetahuan orang-orang itu disebut pengetahuan sosial; bukan pengetahuan ilmiah (ilmu).

Perkembangan sosiologi yang makin mantap terjadi pada tahun 1895, yakni pada saat Emile Durkheim menerbitkan bukunya yang berjudul "*Rules of Sociological Method*", yang menguraikan tentang pentingnya metodologi ilmiah di dalam sosiologi untuk meneliti fakta sosial. Durkheim saat ini diakui banyak pihak sebagai "Bapak Metodologi Sosiologi". Menurut Emile Durkheim, tugas sosiologi adalah mempelajari apa yang disebut sebagai fakta-fakta sosial, yakni sebuah kekuatan dan struktur yang bersifat eksternal, tetapi mampu mempengaruhi perilaku individu. Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan berperasaan, yang berada di luar individu, dan mempunyai kekuatan memaksa yang mengendalikannya. Fakta sosial yang dimaksud di sini tidak hanya yang bersifat material, tetapi juga nonmaterial, seperti kultur, agama, atau institusi sosial.

Max Weber salah seorang pendiri sosiologi modern, mencoba mengembangkan pembahasan sosiologi secara lebih luas. Weber mencoba mempergunakan pendekatan yang berbeda dengan Durkheim. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang mencoba memahami masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya. Dalam pengertian seperti ini, sosiologi bukan berkuat pada soal-soal pengukuran yang sifatnya kuantitatif dan sekedar mengkaji pengaruh faktor-faktor eksternal, tetapi yang lebih penting sosiologi bergerak pada upaya memahami di tingkat

makna, dan mencoba mencari penjelasan pada faktor-faktor internal yang ada di masyarakat itu sendiri.

2. Konsep Sosiologi

Di kalangan sosiolog, sosiologi didefinisikan secara berbeda. Auguste Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat. Menurut Emile Durkheim sosiologi adalah *“the science of institution”*. Goerge Simmel, menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari *“human relationships”*. Sedangkan Weber berpendapat bahwa sosiologi merupakan *“a science concerning itself with the interpretative understanding of social action and theory by a causal axplanation of its course and concequences”* (1978).

Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengatakan, bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu: kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut McGee (1977) menjelaskan, bahwa sosiologi adalah: (1) studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individu, (2) studi tentang tatanan manusia dan perubahan sosial, (3) sebagai pencarian sebab-sebab sosial dari hal-hal, cara-cara di mana fenomena sosial mempengaruhi perilaku manusia. Hassan Sahnly (1987), dalam bukunya *“Sosiologi Masyarakat Indoensia”*, menyebutkan, bahwa

sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar-manusia yang menguasai kehidupan itu.

J.A.A van Door dan C.J Lammers (1988), mengemukakan, bahwa sosiologi adalah pengetahuan tentang struktur-struktur sosial dan proses-proses sosial kemasyarakatan yang bersifat labil. Soekanto (1999) mempersingkat definisi sosiologi sebagai ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional dan empiris, serta bersifat umum.

Dari definisi yang diberikan oleh para ahli di atas, bila dirumuskan dalam bahasa yang lebih sederhana, sosiologi adalah: ilmu yang mengkaji intraksi manusia dengan manusia lain dalam kelompok (seperti keluarga, kelas sosial, atau masyarakat) dan produk-produk yang timbul dari intraksi sosial tersebut, seperti nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut.

B. Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan

Sosiologi dapat digolongkan sebagai ilmu pengetahuan, oleh karenanya dibuktikan bahwa ia telah memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Johnson (1994), merinci ciri-ciri utama sosiologi sebagai berikut:

- a. *Sosiologi bersifat empiris*, berarti ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akan sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif,
- b. *Sosiologi bersifat teoritis*, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari pada unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan menjelaskan hubungan-hubungan sebab-akibat, sehingga menjadi teori.

- c. *Sosiologi bersifat kumulatif*, berarti teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, dalam arti memperbaiki, memperluas serta memperhalus teori-teori yang lama.
- d. *Sosiologi bersifat non-etis*, yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Untuk mengetahui bukti-bukti sosiologi sebagai ilmu pengetahuan ilmiah dapat dilihat penjelasan Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (1964) sebagai berikut:

- a. Telah diketahui, bahwa sosiologi adalah suatu ilmu sosial, dan bukan merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Perbedaan tersebut bukanlah perbedaan mengenai metode, tetapi menyangkut perbedaan isinya, yang gunanya untuk membedakan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan gejala-gejala alam dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Khususnya, perbedaan tersebut di atas adalah membedakan sosiologi dari astronomi, fisika, geologi, biologi, dan ilmu pengetahuan alam lainnya.
- b. Sosiologi bukanlah merupakan disiplin ilmu yang normatif, tetapi adalah suatu disiplin yang ketegas; artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini, dan bukan mengenai apa yang terjadi atau seharusnya terjadi.
- c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni (*pure science*) dan bukan merupakan ilmu terapan (*applied science*).
- d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan konkrit.
- e. Sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum.
- f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan umum, dan bukan merupakan ilmu pengetahuan khusus.

Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu, sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh pengetahuan lainnya. Lebih lanjut Comte menjelaskan, bahwa sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak ada spekulasi-spekulasi perihal keadaan masyarakat. Hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis.

Penjelasan Comte di atas, sangat disayangkan karena tidak menjelaskan bagaimana caranya menilai hasil-hasil pengamatan kemasyarakatan tersebut. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842, tatkala Comte menerbitkan jilid terakhir dari bukunya yang berjudul "*Positive Philosophy*" yang tersohor itu (Ogburn dan Nimkorff, 1964: 5, Soekanto, 1984).

C. Obyek dan Metode Kajian Sosiologi

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli, maka obyek studi dan kajian sosiologi adalah masyarakat, yang meliputi intraksi manusia dengan manusia yang lain, dalam kelompok (keluarga, kelas sosial) serta produk-produk yang timbul dari intraksi tersebut, seperti nilai, norma, serta kebiasaan-kebiasaan yang dianut oleh kelompok atau masyarakat tersebut. Masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar-manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Pengertian masyarakat adalah sejumlah orang yang hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, secara sadar merupakan kesatuan, dan membentuk sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama ini kemudian menimbulkan kebudayaan termasuk sistem hidup itu sendiri.

Sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendirinya, sosiologi memiliki obyek kajian yang jelas. Adapun obyek kajian sosiologi adalah kehidupan sosial manusia, dan gejala serta proses hubungan antarmanusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia.

Sosiologi meneliti kehidupan manusia sebagai kenyataan (*das sein*), maka tidak dapat dihindari bahwa metode penelitiannya haruslah bersifat empirik. Hal ini berarti bahwa dari beberapa kejadian nyata, sosiologi harus dapat mengambil kesimpulan dan menyusunnya secara logis dan sistimatis. Adapun yang dijadikan bahan penelitiannya ialah hal-hal yang diduga merupakan kenyataan dan terjadi secara berulang. Roland J. Pellegrin (1964) menyatakan, bahwa pendekatan empirik dari sosiologi inilah yang memberi ciri khas kepada sosiologi dan membedakannya dari ilmu-ilmu sosial lainnya.

Obyek peneltian sosiologi banyak persamaannya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, maka justru dalam segi seleksi dari beberapa perspektif dan aspek proses kehidupan manusia dalam masyarakat maka sosiologi membedakan diri dari ilmu-ilmu sosial lainnya.

Jika ilmu sosial lainnya yang terbanyak besifat normatif, sosiologi sebaliknya menurut sikap obyektif dari penelitiannya dengan membuang dan menjauhkan sebanyak mungkin nilai-nilai pribadinya pada waktu pengadaan penelitian. Sehubungan dengan hal ini pula, maka sosiologi meneliti beberapa bidang yang ternyata dikemukakan secara berulang dalam kehidupan manusia dan telah merupakan keteraturan, yaitu:

- a. masyarakat (*society*)
- b. kebudayaan
- c. lembaga –lembaga sosial
- d. diferensiasi sosial
- e. kehidupan kelompok

- f. pengawas dan pengendalian sosial (*social control*)
- g. perubahan sosial (*social change*)

Dalam mempelajari obyeknya, yaitu manusia, sosiologi mempergunakan beberapa metode yang juga dikenal ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Pada dasarnya terdapat dua jenis cara kerja atau metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif lebih mengutamakan cara kerjanya dengan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang diperoleh. Metode kualitatif mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran-ukuran lain yang bersifat eksak, walaupun bahan-bahan tersebut terdapat dengan nyata di dalam masyarakat. Di dalam metode kualitatif termasuk metode historis dan metode komparatif yang keduanya dikombinasikan menjadi histories—komparatif. Metode historis menggunakan—analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Seorang sosiolog yang ingin menyelidiki akibat-akibat revolusi (secara umum) akan mempergunakan bahan-bahan sejarah untuk meneliti revolusi-revolusi penting yang terjadi dalam masa yang silam (Roucek dan Warren, 1984: 188).

Metode komparatif mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya, untuk memperoleh perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan serta sebab-sebabnya. Perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan tersebut bertujuan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk mengenai perilaku masyarakat pada masa silam dan masa sekarang, dan juga mengenai masyarakat-masyarakat yang mempunyai tingkat peradaban yang berbeda atau sama.

Metode lain yang masih tergolong kualitatif adalah studi kasus (*case study*), yaitu cara penelitian yang memusatkan perhatian pada fenomena-fenomena sosial umum yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Metode ini menelaah mengenai suatu

keadaan masyarakat yang dilihat dari persoalan atau kasus tertentu, baik dalam suatu lembaga, kelompok maupun individu. Pengumpulan data biasanya dilaksanakan dengan teknik wawancara, dengan panduan daftar pertanyaan atau pengamatan partisipan (*participant observer technique*). Pada teknik yang terakhir ini peneliti harus benar-benar membaur dan ikut serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dari kelompok sosial yang diteliti dengan tidak memberikan sugesti atau pengaruh terhadap pola-pola kehidupan masyarakat yang sedang diteliti. Metode kualitatif tersebut dalam istilah bahasa Jerman dapat dinamakan sebagai metode berdasarkan *verstehen* (artinya pengertian mendalam).

Metode kuantitatif mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka, sehingga gejala-gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan skala-skala, indeks, tabel dan formula-formula yang semuanya itu sedikit banyaknya mempergunakan ilmu pasti atau matematika. Yang termasuk metode kuantitatif adalah metode statistik yang bertujuan menelaah gejala-gejala sosial secara matematis. Akhir-akhir ini dihasilkan suatu teknik yang dinamakan *Sociometry* yang berusaha meneliti masyarakat secara kuantitatif. *Sociometry* mempergunakan skala-skala dan angka-angka untuk mempelajari hubungan-hubungan antar-manusia dalam masyarakat.

Di samping metode-metode di atas, metode-metode sosiologi lainnya didasarkan pada penjenisan antara metode *induktif* yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas, dan metode *deduktif* yang mempergunakan proses sebaliknya yaitu mulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap berlaku umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus.

Metode-metode sosiologi tersebut di atas, bersifat saling melengkapi dan para ahli sosiologi seringkali menggunakan lebih dari satu metode untuk menyelidiki obyeknya. Kecuali metode-

metode tersebut di atas, masing-masing ilmu pengetahuan dan juga sosiologi mempunyai perlengkapan alat-alatnya sendiri yaitu alat-alat yang disebut konsep (*concept*) untuk menganalisis masalah-masalah yang terdapat dalam lapangannya khususnya untuk sosiologi yaitu masyarakat.

D. Manfaat Sosiologi

Pada era globalisasi sekarang ini, muncul berbagai persoalan sosial, orang selalu ingin mengetahui mengapa fenomena sosial terjadi, apa faktor penyebab terjadinya fenomena sosial, bagaimana proses sosial yang terjadi, apa pengaruh fenomena sosial yang terjadi itu kelak pada dirinya, dan untuk apa kejadian itu dipelajari, semua ini sudah menjadi suatu kebutuhan yaitu kebutuhan seorang manusia untuk mengetahui sesuatu. Sosiologi secara umum berusaha untuk mendiskripsikan suatu gejala sosial yang terjadi pada masyarakat dan memprediksikan apa yang akan terjadi, sesuai dengan teori-teori sosiologi yang ada.

Bagi seorang pembaharu (*agent of change*) yang memiliki peran strategis pada masyarakat, mempelajari sosiologi merupakan kebutuhan mutlak karena masyarakat yang pluralistik dapat dipahami melalui konsep-konsep sosiologi. Rogers dan Shoemaker (1987), menjelaskan bahwa agen pembaharu adalah pekerja profesional yang berusaha mempengaruhi atau mengarahkan keputusan inovasi orang lain selaras dengan yang diinginkan oleh institusi pembaharuan di mana ia bekerja. Berdasarkan definisi tersebut, agen pembaharu dapat berupa para guru, pekerja kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan siapa saja yang menawarkan gagasan baru kepada masyarakat. Para pembaharu tersebut di atas, akan lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya manakala melengkapai dirinya dengan pengetahuan sosiologi.

Beberapa manfaat mempelajari sosiologi, antara lain yaitu: *pertama*, sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola intraksi yang terjadi dalam masyarakat. Melalui pengetahuan tentang pola-pola intraksi sosial tersebut, kita akan dapat mengenal dengan lebih jelas siapa diri kita dalam konteks hubungan antara individu dan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok.

Kedua, sosiologi dapat mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta dapat melihat “dunia” atau “budaya” lain yang belum kita ketahui sebelumnya. *Ketiga*, dengan sosiologi, kita akan semakin memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain serta memahami perbedaan yang ada. Tanpa hal itu, menjadi alasan untuk timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berlaku.

Dalam konteks yang lebih luas, sosiologi dapat dipergunakan, setidaknya dalam empat kategori, yaitu: (a) kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial, (b) dalam penelitian, (c) dalam pembangunan, (d) dalam pemecahan masalah-masalah sosial.

1. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan sosial. Perencanaan sosial adalah suatu keinginan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah pada masa-masa terjadi perubahan. Perencanaan lebih bersifat preventif, oleh karena kegiatannya merupakan pengarahan-pengarahan dan bimbingan sosial mengenai cara-cara hidup masyarakat yang baik.
2. Kegunaan Sosiologi dalam penelitian. Sosiologi memiliki metode-metode penelitian sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya. Obyek penelitiannya hampir seluruh aspek kehidupan manusia, terutama aspek yang berhubungan dengan intraksi manusia dalam masyarakat. Tugasnya adalah mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang terlepas dari

nilai-nilai subyektif. Informasi sosiologis yang disajikan senantiasa ditemukan melalui metode-metode ilmiah yang sudah teruji dan tidak diragukan manfaatnya atas bukti-bukti kebenaran sebagai hasil penelitiannya.

3. Kegunaan sosiologi dalam pembangunan.

Pada masa perkembangan masyarakat dewasa ini, nampaknya konsep pembangunan sudah merupakan suatu ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengejar pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Soekanto (2002) bahwa suatu proses pembangunan biasanya dikaitkan dengan pandangan yang optimis, yang berwujud dalam usaha-usaha untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih dari pada yang telah dicapai. Di dalam mencapai taraf hidup tadi, maka dapat ditempuh cara-cara sebagai berikut:

- a. Struktur, perencanaan, pembentukan dan evaluasi lembaga kemasyarakatan, prosedurnya serta pembangunan secara mendalam.
- b. Spritual, pembentukan watak dan pendidikan di dalam penggunaan cara-cara berpikir dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau kedua-duanya.

Fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat yang tidak hanya terbatas pada golongan elit saja, melainkan secara menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Secara sosiologis, wujud hasil pembangunan itu hendaknya dapat diperlihatkan dan mengutamakan peruntukannya bagi masyarakat, terutama sekali bagi masyarakat miskin.

4. Kegunaan sosiologi dalam pemecahan masalah sosial.

Masalah sosial merupakan masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, masalah sosial adalah masalah yang melibatkan sejumlah besar manusia dengan cara-cara yang menghalangi pemenuhan kehendak-kehendak biologis dan sosial yang ditetapkan mengikuti garis yang disetujui masyarakat.

Masalah yang tergolong masalah sosial murni adalah masalah yang berhubungan dengan terjadinya benturan institusi, rendahnya pengawasan sosial atau kegagalan menggunakan kaidah-kaidah teknologi yang tepat. Kesemuanya ini tidak dapat diselesaikan dengan jalan keluar yang memuaskan.

Masalah-masalah sosial menyakut nilai-nilai dan perasaan-perasaan sosial, maka diusulkan bahwa metode yang paling tepat untuk dapat menanggulangi masalah sosial tersebut adalah metode-metode yang berhubungan dengan strategi kemasyarakatan.

Secara umum, ada dua metode dalam penanggulangan masalah sosial, yaitu:

- a. metode yang bersifat preventif dilakukan dengan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap kemungkinan gejala-gejala sosial yang dapat menimbulkan masalah sosial.
- b. metode yang bersifat represif adalah proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang sedang tumbuh dan dirasakan oleh masyarakat, artinya tindakan penanggulangan baru akan dilakukan setelah gejala-gejala sosial itu dapat dipastikan sebagai masalah sosial.

BAB II

INDIVIDU DAN MASYARAKAT

A. Pengertian Individu

Individu berasal dari bahasa Latin *individum* yang berarti satuan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Individu menurut konsep sosiologis, artinya manusia yang hidup berdiri sendiri, tidak mempunyai kawan (sendiri). Individu sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya selalu dilengkapi dengan kelengkapan hidup yang meliputi raga, rasa, rasio, dan rukun.

1. *Raga*, merupakan bentuk jasad manusia yang khas yang dapat membedakan antara individu yang satu dengan yang lain, sekalipun dengan ciri dan hakikat yang sama.
2. *Rasa*, merupakan perasaan individu yang dapat menangkap objek gerakan dan benda-benda isi alam semesta, seperti merasakan panas, dingin, atau merasakan makanan yang lezat. Perasaan juga dapat dikembangkan menjadi perasaan senang dengan keindahan dan sebaliknya.
3. *Rasio*, atau akal pikiran merupakan kelengkapan manusia untuk mengembangkan diri, mengatasi segala sesuatu yang diperlukan dalam diri tiap individu.
4. *Rukun*, atau pergaulan hidup merupakan bentuk sosialisasi dengan sesama manusia dan hidup berdampingan satu sama lain secara harmonis, damai dan saling melengkapi. Rukun ini merupakan prangkat hidividu yang dapat membentuk suatu kelompok sosial yang sering disebut sebagai masyarakat.

B. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu “*syaraka*” yang berarti ikut serta (berserikat), berpartisipasi. Sedangkan kata “*musyaraka*” berarti saling bergaul. Di dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*society*” yang sebelumnya berasal dari kata latin “*socius*”, berarti “kawan” (Koentjoroningrat, 1980). Dalam buku yang ditulis oleh Abdul Syani (1997) yang berjudul, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, dijelaskan bahwa perkataan masyarakat berasal dari kata *musyawarah* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat diterjemahkan menjadi dua pengertian, yaitu *society* dan *community*. Berkaitan dengan istilah *Community* Arthur Hillin menjelaskan bahwa: “*A definition of community must be inclusive enough to take account, of the variety of both physical and social forms which community take*”

Ciri dari *community* ditekankan pada kehidupan bersama dengan bersandar pada lokalitas dan derajat hubungan sosial atau atau sentimen. *Community* ini oleh Hassan Shadily (1983) disebut sebagai peguyung yang memperlihatkan rasa sentiment yang sama seperti terdapat dalam *Gemennshaft*. Anggota-anggotanya mencari kepuasan berdasarkan adat kebiasaan dan sentimen (faktor primer), kemudian diikuti atau diperkuat oleh lokalitas (faktor sekunder).

Lebih jauh berkaitan dengan masyarakat, Abdul Syani (1987), menjelaskan bahwa masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, memandang *community* sebagai unsur statis, yang *community* terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dan kesatuan-kesatuan masyarakatsehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, atau kota-

kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dan adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. *Kedua, community* dipandang sebagai unsur yang dinamis, artinya menyangkut suatu proses-(nya) yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antarmanusia, maka di dalamnya ada yang sifatnya fungsional. Dalam hal ini dapat diambil contoh tentang masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi, masyarakat, mahasiswa, dan sebagainya.

Dari kedua ciri khusus yang dikemukakan di atas, berarti dapat diduga bahwa apabila suatu masyarakat tidak memenuhi ciri-ciri tersebut, maka ia dapat disebut masyarakat dalam arti *society*. Masyarakat dalam pengertian *society* terdapat interaksi sosial, perhitungan-perhitungan rasional dan *like interest*, hubungan-hubungan menjadi bersifat pamrih dan ekonomis (Syani, 2002).

Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat, berikut ini dijelaskan berbagai pendapat para ahli tentang masyarakat.

Menurut Ralph Linton (1936) mengemukakan, bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Pengertian ini menunjukkan adanya syarat-syarat sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu cukup lama dan adanya kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dan satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota-anggota. Faktor waktu memegang peranan penting, sebab setelah hidup bersama dalam waktu cukup lama, maka terjadi

proses adaptasi terhadap organisasi tingkah laku serta kesadaran berkelompok.

Sedangkan menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin lebih sering disingkat Gillin dan Gillin (1954) mengatakan, bahwa masyarakat itu adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil. Pengertian yang dikemukakan oleh Gillin dan Gillin menunjukkan bahwa masyarakat itu meliputi kelompok manusia yang kecil sampai dengan kelompok manusia dalam suatu masyarakat yang sangat besar, seperti suatu negara. Seperti diketahui, suatu negara juga memiliki kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama dan keteraturan.

Sementara itu, menurut Steinmetz, seorang ahli sosiologi Belanda memberi batasan tentang masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pengertian ini juga menunjukkan bahwa suatu masyarakat mencakup kelompok manusia yang kecil sampai dengan yang sangat besar, termasuk Negara. Sedangkan menurut Melville J. Herskovits atau akrab dipanggil Herkovits (1955) mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Pengertian ini menekankan adanya ikatan anggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang ada di dalam kelompok masyarakat.

Auguste Comte (1896) bapak sosiologi mengemukakan pengertian tentang masyarakat, bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan relitas-realitas baru yang berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia yang dengan atau

sendirinya bertalian secara golongan besar atau kecil dan beberapa manusia, yang dengan atau sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh kebatinan satu sama lain.

Koentjaraningrat (1980: 160) seorang antropolog Indoensia merumuskan definisi masyarakat sebagai berikut: masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Hampir senada dengan definisi yang diberikan Koentjaraningrat, Selo Soemardjan seorang sosiolog mengatakan, bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

C. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Durkheim, masyarakat bukanlah hanya sekedar suatu penjumlahan individu semata, melainkan suatu sistem yang dibentuk dan hubungan antar mereka (anggota masyarakat), sehingga menampilkan suatu realita tertentu yang mempunyai ciri-cirinya sendiri.

1. Soerjono Soekanto (1986) menyatakan, bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu sebagai berikut.
 - a. *Manusia yang hidup bersama.* Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoretis, angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
 - b. *Bercampur untuk waktu yang cukup lama.* Kumpulan dan manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja, dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat

bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam kelompok tersebut.

- c. *Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.*
- d. *Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.* Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Ciri-ciri masyarakat di atas selaras dengan definisi masyarakat yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokan-pengelompokan yang lebih kecil yang mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Menurut Abdul Syani (2003) menyebutkan, masyarakat ditandai oleh ciri-ciri: a). adanya interaksi; b). ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu; c). adanya rasa identitas terhadap kelompok, di mana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Sedangkan Marion Lievy mengemukakan empat ciri untuk dapat disebut masyarakat, yaitu: a). kemampuan bertahan melebihi masa hidup seorang individu; b). rekrutmen seluruh atau sebagian anggota melalui reproduksi; c). kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama bersama; d). adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada.

Menurut Talcott Parsons (1968) merumuskan kriteria bagi adanya masyarakat sebagai berikut:

- a. suatu sistem sosial yang swasembada (*selfinsistent*);
- b. melebihi masa hidup individu normal;
- c. merekrut anggota secara reproduksi biologis;
- d. melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya.

Berdasarkan ciri-ciri masyarakat yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat dinyatakan bahwa masyarakat bukannya hanya sekadar sekumpulan manusia belaka, tetapi di antara mereka yang berkumpul itu harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak, setiap individu sebagai anggotanya (masyarakat) mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya. Hal ini berarti, setiap orang mempunyai perhatian terhadap orang lain dalam setiap kegiatannya. Jika kebiasaan itu kemudian menjadi adat, tradisi atau telah melembaga, maka sistem pergaulan hidup di dalamnya dapat dikatakan sebagai pertalian primer yang saling pengaruh-mempengaruhi.

Menurut Syani (2002), ada beberapa unsur yang terkandung dalam istilah masyarakat, antara lain sebagai berikut:

1. Sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama; di dalamnya manusia dapat saling mengerti dan merasa serta mempunyai harapan-harapan sebagai akibat dan hidup bersama itu. Terdapat sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat tersebut.
2. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu kesatuan.
3. Manusia yang hidup bersama itu merupakan suatu sistem hidup bersama, yaitu hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan, oleh karenanya setiap anggota masyarakat merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.

Menurut Mac Iver (dalam Harsodjo, 1972), bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu sistem cara kerja dan prosedur dan otoritas dan saling bantu membantu, yang meliputi:

1. Kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lain, serta
2. Sistem dan pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan.

D. Individu dan Masyarakat

Sebagai makhluk social, manusia kehidupannya tidak dapat hidup tanpa kehadiran orang atau pihak lain. Karena selain manusia tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya secara sendiri, manusia juga tidak dapat memperoleh kebahagiaan tanpa kehadiran orang lain. Kehidupan manusia dengan pihak lain, tidak saja karena persamaan-persamaan yang dimilikinya, melainkan juga karena perbedaan-perbedaan yang ada pada manusia antara satu dengan lainnya. Menurut Bergson, bahwa manusia ini hidup bersama bukan oleh karena persamaan, melainkan oleh karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Lebih jauh Bergson mengatakan, bahwa kenyataan hidup baru terasa dengan perbedaan antara manusia masing-masing itu dalam kehidupan bergolongan.

Berdasarkan adat, sifat meniru dan sebagainya, perasaan solidaritas dalam golongan keluarga, suku bangsa, negara, dan seterusnya akan menjadi kuat dan luas, serta ikatan ini akan bertambah kuat dalam menghadapi bahaya. Dengan meluasnya pertalian dan keluarga kepada suku bangsa, kepada negara, dan sebagainya, maka pertalian dalam ikatan yang terkecil terasa lebih lemah. Baik juga diperhatikan, bahwa ikatan solider ini berlainan sifatnya ke dalam dan keluar, yang ke dalam merupakan ikatan di antara anggota-anggotanya, sedangkan ikatan keluar artinya terhadap golongan lain.

Ikatan-ikatan dalam kelompok memang mempunyai kelemahan-kelemahan, tetapi juga dapat menghilangkan permusuhan antargolongan, malahan dapat mengikat mereka bersama menjadi persatuan yang lebih luas.

Menurut Ogburn dan Nimkoff, integrasi manusia dalam kelompok dapat dicapai jika mernenuhi beberapa syarat yaitu: 1). Anggota kelompok (masyarakat) merasa berhasil mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, 2). Tercapainya suatu konsensus (kesepakatan) mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. 3). Norma-norma cukup lama dan konsisten (tetap) tidak ada perubahan.

Menuurt Alex Inkeles mengutip pendapat Marion Levy, yang mengusulkan empat kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok sebelum kelompok tersebut dapat dianggap suatu masyarakat: hidup seorang individu; kelompok tersebut harus merekrut anggota-anggota barunya, setidaknya-tidaknya untuk sebagian, melalui pembiakan, kelompok tersebut harus bersatu dalam membenikan kesetiaannya kepada suatu kompleks *sistem tindakan utama* bersama; dan sistem tindakan tersebut harus *swasembada*. Kriteria yang terakhir ini memerlukan sedikit penjelasan tambahan.

Mengenai bagaimana hubungan antara individu dengan masyarakat, ada tiga alternative, yaitu: 1). individu memiliki status yang relatif dominan terhadap masyarakat, 2). masyarakat memiliki status yang relatif dominan terhadap individu, 3). individu dan masyarakat saling tergantung.

Hubungan antara individu dengan masyarakat seperti dimaksud di atas menunjukkan bahwa individu memiliki status yang relative dominan terhadap masyarakat, sedangkan lainnya menganggap bahwa individu itu tunduk pada masyarakat. Sementara itu, masih terdapat suatu hubungan lagi, yaitu adanya hubungan interdependen (saling ketergantungan) antara individu

dengan masyarakat. Namun demikian, status individu di dalam masyarakat biasanya merupakan satuan-satuan dan bentuk masyarakat yang tidak terbatas kuantitasnya. Setiap satuan individu itu masing-masing mempunyai kekhususan yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Soepomo berpendapat, bahwa individu ialah suatu makhluk, di mana masyarakat mengkhususkan diri. Masyarakat ialah keseluruhan dari sekian anggota-anggota seorang-seorang. Karena itu, keinsafan individu kemasyarakatan dan keinsafan individu bercampur baur. Walaupun demikian, bukan berarti kehidupan individu warga masyarakat sekali tidak ada sehingga sama sekali tidak ada peluang bagi kehidupan yang bersifat pribadi. Sebaliknya, kendatipun dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalami proses serba individualis pun, kehidupan bersama tetap tidak akan ditinggalkan.

Dapat disimpulkan bahwa individu dan masyarakat merupakan perangkat yang senantiasa ada di dalam setiap pergaulan hidup; individu tak mungkin dapat hidup dengan sempurna tanpa bermasyarakat.

BAB III

INTERAKSI SOSIAL DAN PROSES SOSIAL

A. Interaksi Sosial

1. Pengertian Interaksi Sosial

Interaksi sosial dikalangan para sosiolog didefinisikan secara berbeda. Menurut Soerjono Soekanto (2002), interaksi sosial adalah hubungan timbal-balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Sedangkan Basrowi (2005: 138) mendefinisikan interaksi sosial dengan hubungan dinamis yang mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan kelompok, maupun orang dengan kelompok manusia. Bentuknya tidak hanya bersifat kerjasama, tetapi juga bisa berbentuk tindakan persaingan, pertikaian dan sejenisnya. Dalam interaksi sosial minimal terdiri dari dua orang yang mengadakan kontak. Pada tingkatan yang kompleks, kontak sosial atau hubungan sosial terjadi antara kelompok dengan kelompok.

Dasar terjadinya interaksi sosial adalah kontak dan komunikasi. Seorang mahasiswa yang sedang bergegas menuju ke kampusnya lalu bertemu dengan mahasiswa lainnya di samping gang dekat asramanya, kemudian mereka saling sapa disebut kontak sosial. Jadi kontak sosial terjadi bilamana ada individu merasa ada individu lain disekitarnya. Individu secara sadar menganggap orang lain ada disekitarnya dirinya. Komunikasi terjadi bila seorang mahasiswa kemudian berjabat tangan dengan mahasiswa lain tadi serta berbincang-bincang mengenai materi perkuliahan yang dibahas pada diskusi kelasnya. Komunikasi terjadi setelah ada

informasi yang disampaikan, bisa bersifat komunikasi satu arah atau dua arah.

2. Sebab-Sebab Manusia melakukan interaksi Sosial

Sebagai makhluk sosial manusia selalu hidup berkelompok atau senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Manusia makhluk yang mampu berpikir untuk melakukan sesuatu, makhluk yang harus diajarkan sesuatu agar mampu melakukan sesuatu (*sosialisasi*). Dari proses berpikir muncul perilaku atau tindakan sosial. Apabila perilaku dan tindakan sosial tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan orang lainnya, maka terjadilah interaksi sosial.

Perilaku dan tindakan sosial yang kemudian berlanjut dengan proses sosial terjadi dalam kehidupan manusia dimanapun ia berada, di kampus atau di asrama.

Menurut Soejono Soekanto, hubungan dengan sesamanya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia yang didasarkan pada keinginan manusia untuk mendapatkan:

- a. kepuasan dalam mengadakan hubungan serta mempertahankan hubungan yang telah ada sebelumnya pada suatu sistem sosial. Kebutuhan semacam ini dinamakan *kebutuhan inklusi*. Seorang mahasiswa yang ditugaskan melakukan PPL pada suatu sekolah harus mengadakan hubungan dengan para guru dan siswa yang ada di lingkungan sekolah itu. Ia tidak bisa berperilaku seenaknya di sekolah itu, seperti halnya di kampus. Ia harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang ada pada sekolah itu, artinya Ia mempertahankan pola-pola hubungan yang telah ada sebelumnya di sekolah itu.
- b. pengawasan dan kekuasaan. Kebutuhan manusia untuk mengawasi atau diawasi dan berkuasa disebut *kebutuhan*

akan control. Bagaimanapun acuhnya seseorang, Ia tetap memerlukan perhatian dari orang lain. Ia ingin orang lain memperhatikannya, bahkan menghormatinya.

- c. cinta dan kasih sayang. Kebutuhan manusia akan cinta dan kasih sayang disebut *kebutuhan afeksi*. (Ibrahim, 2003:13)

B. Ciri dan Syarat terjadinya Interaksi Sosial

Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang
2. ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol
3. ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa depan) yang menemukan sifat aksi yang sedang berlangsung.
4. ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat.

Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial (*social contact*) dan komunikasi. Antaraksi (interaksi) sosial dimaksudkan sebagai pengaruh timbal-balik antara dua belah pihak, yaitu individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangkan mencapai tujuan tertentu.

Terjadinya interaksi sosial sebagaimana dimaksud, karena adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam suatu hubungan sosial. Menurut Roucek dan Warren (1984:189), interaksi sosial adalah salah satu masalah pokok, karena ia merupakan dasar segala proses sosial. Interaksi sosial merupakan proses timbal-balik, di mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain dan dengan demikian, ia mempengaruhi tingkah laku orang lain. Orang mempengaruhi tingkah laku orang lain melalui kontak. Kontak ini mungkin berlangsung melalui organisme fisik, seperti dalam obralan, pendengaran, melakukan

gerakan pada beberapa bagian badan, melihat dan lain-lain atau secara tidak langsung melalui tulisan atau dengan cara berhubungan dari jauh.

Dalam proses sosial, baru dapat dikatakan interaksi sosial apabila telah memenuhi persyaratan sebagai aspek kehidupan bersama, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial.

1. Kontak Sosial

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk:

- a. Antar-orang per-orang, misalnya apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya. Proses demikian terjadi melalui *socialization*, yaitu suatu proses di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota.
- b. Antara orang-perorang dengan suatu kelompok. Misalnya, apabila seseorang bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat atau apabila suatu partai memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya.
- c. Antar suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Misalnya dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengalahkan partai politik ketiga di dalam pemilihan umum atau apabila dua buah organisasi keagamaan mengadakan kerjasama untuk melakukan sebuah kegiatan keagamaan.

2. Komunikasi Sosial.

Komunikasi adalah suatu proses saling memberikan tafsiran kepada atau dari perilaku pihak lain. Melalui tafsiran pada perilaku pihak lain, seseorang mewujudkan perilaku sebagai reaksi terhadap

maksud atau peran yang ingin disampaikan oleh pihak lain. Komunikasi dapat diwujudkan dengan pembicaraan, gerak-gerik fisik ataupun perasaan. Selanjutnya dari sini timbul sikap dan ungkapan perasaan, seperti senang, ragu-ragu, takut atau menolak, bersahabat yang merupakan reaksi atas pesan yang diterima. Saat ada aksi dan reaksi itulah terjadi komunikasi.

Komunikasi sosial adalah syarat pokok lain dari pada proses sosial. Komunikasi sosial mengandung pengertian persamaan pandangan antara orang-orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Menurut Soekanto (2002), bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut) orang yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Dengan adanya sekelompok orang, dapat diketahui dan dipahami oleh pihak orang itu atau sekelompok orang lain. Hal ini berarti, apabila suatu hubungan sosial tidak terjadi komunikasi atau tidak saling mengetahui dan tidak saling memahami maksud masing-masing pihak, maka dalam keadaan demikian, tidak terjadi kontak sosial. Dalam komunikasi dapat terjadi banyak tafsiran terhadap perilaku dan sikap masing-masing orang yang sedang berhubungan, ini halnya jabatan tangan dapat ditafsirkan sebagai kesopanan, persahabatan, kerinduan, sikap kebanggaan, dan lain-lain.

Menurut Sitorus (2000), berlangsungnya suatu interaksi sosial dapat didasarkan pada berbagai faktor, antara lain imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor-faktor tersebut dapat bergerak sendiri-sendiri, secara terpisah ataupun saling berkaitan.

- a. *imitasi* adalah suatu proses belajar dengan cara meniru atau mengikuti perilaku orang lain. Dalam interaksi sosial, imitasi dapat bersifat positif artinya imitasi tersebut mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Namun, imitasi juga dapat berpengaruh apabila yang dicontoh itu adalah perilaku-perilaku

menyimpang. Selain itu imitasi juga dapat melemahkan dan mematikan kreatifitas seseorang. Misalnya, seorang anak yang terus–menerus meniru dan mengikuti perintah atau kehendak orang lain, akhirnya tidak dapat mengembangkan daya kreativitasnya sendiri.

- b. *Sugesti* adalah cara pemberian suatu pandangan atau pengaruh oleh seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Sugesti terjadi karena terjadi pihak yang menerima anjuran tersebut tergugah secara emosional dan biasanya emosi ini menghambat daya pikir rasionalnya. Proses sugesti lebih mudah terjadi apabila orang yang memberikan pandangan itu adalah orang yang berwibawa dan bersifat otoriter. Mungkin juga bahwa sugesti terjadi kalau yang memberikan pandangan atau sikap itu adalah kelompok atau masyarakat.
- c. *Identifikasi* adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi lebih mendalam dari imitasi, karena dengan identifikasi, seseorang mencoba menempatkan diri dalam keadaan orang lain, “mengidentikkan” dirinya dengan orang lain, bahkan menerima kepercayaan dan nilainya sendiri. Proses identifikasi dapat membentuk kepribadian seseorang, misalnya seseorang merasa sedih melihat orang lain yang mengalami musibah atau merasa iba melihat orang cacat.
- d. *Simpati* adalah perasaan “tertarik” yang timbul dalam diri seseorang dan membuatnya seolah-olah berada dalam keadaan orang lain

3. Tindakan Sosial.

Menurut Sitorus (2000) bahwa, tindakan sosial sebagai perbuatan, perilaku atau aksi yang dilakukan manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap tindakan diperoleh melalui proses belajar. Artinya, sebelum berbuat sesuatu, ia akan mengadakan seleksi atau pilihan terhadap berbagai alternatif untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Apabila ditemukan suatu tindakan yang efektif, maka tindakan itu akan diulangi setiap kali masalah seperti itu akan timbul. Bila tindakan itu menguntungkan, maka tindakan itu akan dikomunikasikan kepada setiap individu atau kelompoknya. Lama- kelamaan tindakan itu akan makin mantap dan menjadi kebiasaan bagi kelompoknya. Dengan demikian, tindakan itu telah menjadi adat-istiadat yang memiliki nilai dan norma sosial dalam masyarakat.

Tidak semua tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial, suatu tindakan dapat disebut “tindakan sosial” apabila tindakan tersebut dilakukan dengan orientasi pada atau dipengaruhi oleh orang lain. Misalnya bila seseorang membaca puisi sebagai latihan untuk mengikuti lomba baca puisi, maka tindakan ini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Akan tetapi, bila membaca puisi dihadapan orang lain dan dewan juri pada saat lomba, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan sosial. Hal ini karena tindakan tersebut berorientasi atau dipengaruhi oleh orang lain.

4. Proses Sosial.

Selo Soemardjan dan Soemardji Soelaeman (1964) mendefinisikan proses sosial sebagai pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Sedangkan Soekanto menyatakan bahwa interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial. Soerdjono Dirdojosisworo (1985) mengartikan proses sosial sebagai pengaruh

timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Proses sosial juga dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok lainnya. Pengaruh timbal-balik antara individu atau kelompok terlebih dahulu dilakukan setelah terjadinya interaksi sosial. Proses sosial merupakan bentuk khusus dari interaksi sosial. Terjadinya proses sosial secara umum disebabkan oleh adanya kontak sosial dan komunikasi yang selanjutnya memberikan pengaruh timbal-balik pada kedua belah pihak. Dengan demikian proses sosial merupakan buah dari interaksi sosial.

C. Macam-macam Proses Sosial

1. Proses Sosial Asosiatif

Ada beberapa bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif, antara lain yaitu:

a. Kerjasama (*cooperation*)

Kerjasama terjadi di dalam kelompok masyarakat manapun di dunia ini. Masyarakat itu sendiri terbentuk karena adanya keinginan dari individu-individu untuk bekerja sama. Begitu pentingnya kerjasama dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang menganggap kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang penting dan utama. Kerjasama merupakan suatu interaksi orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang sama atau bersama. Kerjasama timbul karena adanya faktor-faktor pembatas pada masing-masing pihak yang bekerjasama seperti waktu, energi, pengetahuan, dan lain-lain.

Bentuk-bentuk kerjasama dalam suatu masyarakat bervariasi sifatnya, antara lain:

- a) Kerukunan yang menyangkut gotong-royong dan tolong menolong,

- b) *Bergaining* yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih.
- c) Kooptasi, yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi bersangkutan.
- d) Hubungan patron klien, yaitu suatu bentuk kerjasama antara dua orang yang berbeda statusnya dan dicirikan oleh sifat yang *dyadic*. Dasar hubungannya adalah ketidak-merataan, menyangkut pertukaran pelayanan antara dua belah pihak di mana si patron melindungi pengikutnya. Hubungan itu meliputi banyak jenis transaksi dan interaksi di antara kedua belah pihak, ada persamaan saling membutuhkan, saling percaya, dan satu sama lain saling kenal mengenal secara mendalam.

b. Akomodasi

Akomodasi menunjukkan pada dua arti yaitu yang menunjukkan pada suatu keadaan dan menunjukkan pada suatu proses. Akomodasi yang menunjukkan suatu keadaan, berarti ada suatu keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antara individu atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjukkan pada suatu usaha-usaha manusia untuk menyelesaikan suatu kestabilan. Akomodasi sebenarnya suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan, tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadian.

Adapun tujuan dari akomodasi adalah:

- a) untuk mengurangi pertentangan antara individu atau kelompok sebagai akibat dari perbedaan paham.
- b) mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu atau secara temporer.
- c) untuk memungkinkan terjadinya kerjasama antara kelompok-kelompok sosial yang hidupnya terpisah sebagai akibat faktor-faktor sosial psikologis dan kebudayaan seperti dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta,
- d) mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya lewat perkawinan campur atau asimilasi dalam arti luas,

c. Asimilasi

Asimilasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk menguasai perbedaan antara mereka. Tujuannya untuk meningkatkan semangat kesatuan dan persatuan di antara mereka dengan cara mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Apabila seseorang mengadakan asimilasi, ia tidak lagi membedakan orang lain sebagai orang asing. Ada beberapa bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada proses asimilasi.

Proses asimilasi timbul bila ada:

- a) Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan,
- b) Orang perorang sebagai warga kelompok-kelompok tadi saling bergaul secara langsung dan intensif untuk waktu yang lama, sehingga
- c) Kebudayaan-kebudayaan dari kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri,

Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi adalah, antara lain:

- a) Toleransi
- b) Kesempatan-kesempatan di bidang ekonomi yang seimbang,
- c) Suatu sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya
- d) Sikap yang terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat,
- e) Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan,
- f) Perkawinan campuran (*amalgamation*),
- g) Adanya musuh bersama dari luar.

2. Proses Sosial Disasosiatif

Proses sosial disasosiatif sering disebut dengan *oppositional process*. Oposisi atau proses-proses yang disasosiatif itu dibedakan dalam tiga bentuk: persaingan, kontravensi, pertentangan atau pertikaian.

a. Persaingan

Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang menjadi perhatian umum. Cara-cara yang dilakukan biasanya dengan menarik perhatian publik atau membuat prasangka-prasangka sehingga mempertajam prasangka, tanpa melakukan kekerasan. Berikut ini adalah beberapa tipe persaingan.

- a) Persaingan ekonomi. Persaingan dalam bidang ekonomi timbul karena langka dan terbatasnya persediaan barang dan jasa dalam pasar.
- b) Persaingan kebudayaan. Persaingan kebudayaan terlibat pada usaha-usaha dari kelompok untuk memperbesar

pengikut kelompok, baik dalam ideologi maupun dalam bidang-bidang lainnya.

- c) Persaingan kedudukan dan peranan. Setiap orang atau kelompok selalu mempunyai keinginan untuk mendapatkan kedudukan dan peranan yang terpandang dalam masyarakat.
- d) Persaingan ras. Persaingan ras sebenarnya juga sama dengan persaingan kebudayaan. Perbedaan persaingan ras adalah lebih spesifik dalam hal warna kulit dan jenis rambut dan bentuk tubuh.

b. Pertentangan (Kontravensi)

Kontravensi sebenarnya suatu proses yang berada antara persaingan dan pertentangan atau pertikaian. Kontravensi terutama ditandai oleh gejala-gejala ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan, baik dalam keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang. Dalam bentuk yang murni, kontravensi merupakan kebencian terhadap seseorang atau kelompok orang walaupun tidak sampai pada sikap pertentangan atau pertikaian.

Menurut Leopold von Wiese dan Howard Becker menyatakan, bahwa terdapat beberapa bentuk kontravensi, yaitu:

- a) Perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan menghalang-halangi, gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan rencana pihak lain.
- b) Menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, memaki-maki melalui surat-surat selebaran, memfitnah, melemparkan beban pembuktian kepada orang lain.

- c) Penghasutan. Menyebarkan desas-desus, mengecewakan pihak-pihak lain.
- d) Mengumumkan rahasia orang lain
- e) Mengejutkan lawan, menggaggu atau membingungkan pihak lain.

Lebih dari itu ditemukan pula beberapa tipe kontravensi. Menurut Von Wiese dan Howard Becker ada tiga tipe umum kontravensi berikut ini:

- a. Kontravensi generasi masyarakat.
- b. Kontravensi seksual.
- c. Kontravensi perlementer.

c. Pertengkaran

Pertentangan terjadi karena menyadari adanya perbedaan-perbedaan tertentu antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan itu meliputi perbedaan ciri-ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku, perbedaan dalam meningkatkan ekonomi, perbedaan agama, dan perbedaan lainnya. Perbedaan ini sering dipertajam dan bahkan dieksploitasi sedemikian sehingga menimbulkan pertentangan atau konflik. Perasaan memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan. Ada perasaan yang menganggap kelompoknya lebih hebat, lebih pintar, lebih baik, dan lebih berbudaya dari kelompok lain. Sementara itu, dipihak lain ada kelompok yang merasa tertekan, kurang diperhatikan, kurang dihargai, bahkan diabaikan oleh kelompok lain. Perasaan semajam ini mempertajam sikap suatu kelompok untuk berusaha menghancurkan kelompok lain. Kelompok yang satu berusaha melawan kelompok lain dengan menggunakan kekerasan dan ancaman.

Pada umumnya, penyebab timbulnya pertentangan adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan antara individu. Perbedaan pendirian dan perasaan akan melahirkan bentrokan di antara mereka.
- b) Perbedaan kebudayaan. Pola berpikir dan pola pendirian antara kelompok yang berbeda dapat menyebabkan terjadinya pertentangan antara kelompok masyarakat.
- c) Perbedaan kepentingan. Setiap kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, maupun dalam bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya pertentangan antara buruh dengan majikan. Majikan berkepentingan memperoleh keuntungan ekonomi yang sebanyak-banyaknya, karena itu sedapat mungkin menekan biaya, termasuk gaji para buruh. Sebaliknya, para buruh berkepentingan mendapatkan upah yang layak dan memuaskan dengan konsekuensi meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan seorang majikan.
- d) Perubahan sosial. Perubahan sosial yang cepat akan menimbulkan perubahan nilai-nilai yang cepat. Perubahan yang cepat itu akan melahirkan perbedaan sikap terhadap nilai-nilai yang berbeda. Perbedaan sikap itu akan menimbulkan pertentangan atau konflik.

BAB IV

LEMBAGA SOSIAL

A. Pengertian Lembaga Sosial

Lembaga sosial disebut juga dengan istilah pranata sosial atau institusi sosial (*social institution*). Para sosiolog memiliki pendapat yang berbeda mengenai definisi tentang lembaga sosial. Menurut Koentjaraningrat (1986), lembaga sosial kemasyarakatan (pranata sosial) adalah suatu sistem norma khusus yang menata suatu rangkaian tindakan berpola mantap guna memenuhi suatu kebutuhan atau keperluan khusus dari manusia dalam kehidupan masyarakat. Dari definisi Koentjaraningrat ini, setidaknya ada tiga hal penting dalam lembaga kemasyarakatan, yaitu: (1) adanya sistem norma; (2) sistem norma itu mengatur tindakan berpola; (3) tindakan berpola itu untuk memenuhi kehidupan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Berger mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Sementara Polak (1978) menyatakan bahwa lembaga sosial adalah suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting.

Selo Soemardjan (1964) mengartikan lembaga sosial sebagai lembaga kemasyarakatan. Soekanto (2002:222) mendefinisikan lembaga sosial sebagai kumpulan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Soerjono Soekanto (1997) mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan dari norma-norma segala

tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan masyarakat. Ada dua hal penting dalam lembaga kemasyarakatan menurut Soekanto, yaitu: (1) himpunan norma-norma dalam segala tingkatan; (2) norma-norma itu mengatur manusia memenuhi kebutuhannya.

Terlepas dari perbedaan definisi yang diberikan oleh para ahli sosiologi di atas, yang penting ialah bahwa sosial institution lebih menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur (*institution*) warga dalam kehidupan sosial masyarakat. Istilah lembaga sosial di sini artinya, bahwa lembaga sosial lebih menunjuk pada suatu bentuk perilaku sosial anggota masyarakat dalam kehidupan bersama, sekaligus juga mengandung pengertian yang abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri lembaga tersebut.

B. Unsur-unsur Lembaga Sosial

Berdasarkan pengertian lembaga sosial yang dikemukakan di atas dapat dikemukakan tiga unsur lembaga kemasyarakatan, yaitu:

1. Sistem norma

Sistem norma merupakan sejumlah norma yang terangkai dan berkaitan satu sama lain. Norma-norma ini mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda. Ada norma-norma yang sangat kuat mengikatnya dan ada pula yang lemah. Atas dasar kekuatan mengikat ini maka dikenal istilah kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat.

Kebiasaan adalah perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Apabila kebiasaan ini dilanggar seseorang, maka seseorang tersebut dikenai sanksi yang tidak terlalu berat. Tata kelakuan adalah kebiasaan yang diterima sebagai norma dan bagi mereka yang melanggarnya dikenakan sanksi yang cukup berat.

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang terintegrasi dengan kuatnya dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan sangat berat bagi si pelanggar.

2. Tindakan Berpola

Tindakan berpola merupakan serangkaian tindakan yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu pola yang mantap. Dengan adanya kelakuan berpola ini, maka anggota masyarakat sudah dapat mengantisipasi atau mengetahui lebih dahulu peran yang akan ditampilkan bila berhubungan dengan anggota masyarakat lainnya. Pengetahuan akan tindakan berpola menentukan tindakan si individu itu sendiri.

3. Kebutuhan manusia.

Sistem norma yang mengatur tindakan-tindakan manusia berfungsi memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam inilah yang menjadi dasar terbentuknya kelembagaan masyarakat yang beraneka ragam. Makin banyak dan kompleks kebutuhan manusia, makin banyak pula jenis lembaga kemasyarakatan yang dibutuhkan atau dibentuk.

Kebutuhan manusia akan melanjutkan keturunan melalui perkawinan, akan melahirkan sistem-sistem pengaturan tata cara pelaksanaan suatu perkawinan, misalnya: adanya dua mempelai, saksi, mahar, ijab-kabul dan lain-lainnya. Kebutuhan akan pendidikan akan melahirkan sistem-sistem pendidikan, misalnya guru sebagai pendidik, siswa sebagai terdidik, materi pendidikan, metode pendidikan, serta tujuan pendidikan itu sendiri.

C. Proses Terbentuknya Lembaga Sosial

Proses pelebagaan adalah proses yang terjadi pada suatu norma untuk menjadi bagian dari suatu lembaga sosial, sehingga

dikenal, diakui, dimengerti, dan ditaati oleh masyarakat. Proses pelebagaan sebenarnya bisa berlangsung lebih jauh lagi sehingga suatu norma sosial menjadi *internalized* (mendarah daging), yaitu suatu tarap perkembangan di mana para anggota masyarakat dengan sendiri ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada mulanya norma sosial terbentuk secara tidak sengaja, dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar-manusia di dalam suatu masyarakat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Namun, dalam perkembangannya, norma-norma sosial ini dibentuk dengan sengaja. Hal ini lebih disebabkan karena semakin kompleksnya kebutuhan manusia, di mana norma-norma ini mempunyai kekuatan mengikat bagi anggota masyarakatnya. Kekuatan mengikat dari norma-norma ini berbeda-beda, ada yang lemah, sedang, dan ada juga yang kuat. Berdasarkan kekuatan mengikat anggotanya, norma-norma sosial dibedakan menjadi:

1. Cara (*usage*), suatu norma yang berbentuk perbuatan dan lebih menonjol dalam hubungan antara individu, misalnya: cara minum.
2. Kebiasaan (*folkways*), suatu norma yang berbentuk perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ini membuktikan bahwa perbuatan itu disukai banyak orang. Misalnya kebiasaan menghormati orang lain yang lebih tua.
3. Tata kelakuan (*mores*), suatu norma yang berbentuk kebiasaan yang dianggap sebagai cara berperilaku dan diterima sebagai norma pengatur. Misalnya norma perihal hubungan antara pria dan wanita.

Tata kelakuan adalah kebiasaan yang merupakan tata perilaku dan juga sekaligus diterima sebagai norma pengatur yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia

yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, yang dilakukan masyarakat terhadap anggotanya.

Tata kelakuan mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

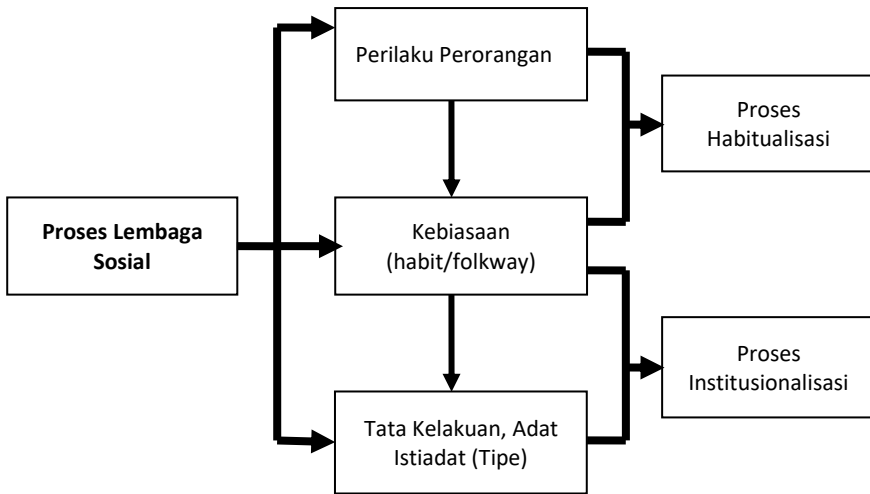
- a. memberi batas-batas pada kelakuan individu. Hal ini karena tata kelakuan merupakan suatu alat untuk memaksa suatu perbuatan dan sekaligus larangan terhadap suatu perbuatan tertentu.
- b. mengidentifikasi individu dengan kelompok lainnya.
- c. menjaga solidaritas antar-anggota masyarakat.

4. Adat-istadat (*Custom*)

Adat-istadat adalah tata kelakuan yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya sehingga anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi yang keras.

Keberadaan lembaga sosial selalu melekat pada setiap masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan, maka akan terhipun menjadi lembaga sosial. Soekanto (2002:198) memberikan batasan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.

Proses pembentukan suatu lembaga sosial kemasyarakatan disebut proses institusionalisasi. Menurut Soekanto, proses institusionalisasi adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Proses pembentukan lembaga kemasyarakatan berasal dari perilaku manusia yang lama kelamaan menjadi perilaku masyarakat yang disebut tata kelakuan atau adat istiadat.



Berdasarkan skema di atas, proses terbentuknya lembaga sosial mencakup *proses habitualisasi* dan *proses tipifikasi*. Proses habitualisasi adalah proses menjadikan suatu perilaku manusia menjadi kebiasaan (kebiasaan perorangan). Karena diulang-ulang, perilaku itu akhirnya memiliki pola tertentu sehingga mudah diketahui dan dibayangkan. Perilaku itu diulang-ulang karena menguntungkan bagi pelakunya.

Proses tipifikasi adalah proses penerimaan atau membenaran suatu kebiasaan oleh sejumlah orang tertentu. Seperti diketahui bahwa kebiasaan seseorang belum tentu baik dan cocok bagi orang lain. Apabila ada kebiasaan orang mendapat pengakuan dari sekelompok orang tertentu, maka terbentuklah *tipe* yaitu kebiasaan yang berlaku untuk sekelompok orang tertentu. Orang lain mengakui atau membenarkan kebiasaan tadi karena mereka menganggap kebiasaan itu sebagai sesuatu yang bernilai. *Tipe* inilah yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan (institusionalisasi).

Contohnya, sistem perkawinan masyarakat Suku Sasak yang melakukan perkawin dengan cara melarikan si gadis, yang

selanjutnya disebut kawin lari. Di dalam sistem adat kawin lari Suku Sasak terdapat serangkaian norma yang saling berhubungan dan kebutuhan masyarakat Suku Sasak yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu adalah kebutuhan akan keturunan. Di dalam lembaga perkawinan ada dua pihak yang berada pada posisi yang berbeda, yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan. Pada awalnya perkawinan lari suku Sasak tidak ada norma yang mengaturnya. Pada beberapa kasus berikutnya timbul pemikiran pihak-pihak tertentu untuk membentuk aturan-aturan atau norma berkaitan dengan tata cara pelaksanaan kawin lari.

Perilaku kawin lari yang pada awalnya dilakukan oleh seseorang, yang dalam perjalannya dilakukan atau diikuti oleh individu-individu dikalangan masyarakat Suku Sasak secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan melakukan perkawinan dengan cara lari yang dilakukan oleh individu-individu dikalangan masyarakat Suku Sasak telah terjadi proses habituaisasi.

Kebiasaan dalam setiap perkawinan dikalangan masyarakat Suku Sasak diakui dan dibenarkan oleh orang lain. Lama kelamaan kebiasaan perorangan itu dianggap baik oleh sekompok orang (masyarakat) sehingga terjadi proses tipifikasi. Akhirnya norma kawin lari menjadi bagian dari sistem norma dikalangan masyarakat Suku Sasak. Semua proses habituaisasi yang berlanjut menjadi tipifikasi disebut proses institusionalisasi.

D. Fungsi dan Tujuan Lembaga sosial

Keberadaan lembaga sosial pada suatu masyarakat memiliki tujuan dan fungsi yang secara perinsipil tidak berbeda dengan norma-norma sosial. Pranata sosial lahir dari norma sosial.

Adapun fungsi lembaga sosial pada dasarnya digunakan untuk mengatur pergaulan hidup dengan tujuan untuk mencapai

suatu tata tertib. Norma yang diwujudkan dalam hubungan antar-manusia disebut organisasi sosial (*social organization*). Norma-norma dalam kehidupan kemasyarakatan dikelompokkan berdasarkan pada keperluan pokok kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Keperluan hidup manusia dalam bermasyarakat banyak sekali, misalnya kebutuhan hidup kekerabatan. Kebutuhan jenis ini akan menimbulkan lembaga sosial, seperti keluarga, perkawinan, dan lain-lain. Kebutuhan terhadap mata pencaharian akan menimbulkan lembaga sosial, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. Kebutuhan terhadap pendidikan akan menimbulkan lembaga sosial, seperti lembaga keterampilan kerja (LPK), pesantren, sekolah dasar, sekolah menengah dan seterusnya. Kebutuhan akan rasa keindahan menimbulkan lembaga sosial, seperti kesusatraan dan seni suara. Kebutuhan jasmaniah manusia menimbulkan lembaga sosial, seperti olah raga, pemeliharaan kesehatan, dan lain-lain.

Adapun tujuan utama diciptakannya pranata sosial, selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

Untuk mewujudkan tujuannya, menurut Soekanto (2002) pranata sosial di dalam masyarakat dengan demikian harus dilaksanakan fungsi-fungsi berikut:

1. Memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam suatu usaha untuk mematuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang harus dipergunakan oleh setiap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman perpecahan atau disintegrasi masyarakat. Hal ini mengingat bahwa sumber

pemenuhan kebutuhan hidup yang dapat dikatakan tidak seimbang dengan jumlah manusia yang semakin bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dimungkinkan pertentangan yang bersumber pada perebutan maupun ketidakadilan dalam usaha memenuhi kebutuhannya akan ancaman kesatuan dari warga masyarakat. Dalam hal ini, pranata sosial akan berfungsi sebagai pengatur pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap warganya secara adil atau memadai, sehingga dapat terwujudnya kesatuan yang tertib.

3. pranata sosial berfungsi sebagai *social control*, yaitu sebagai sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Artinya, pranata sosial berfungsi untuk memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial (*social control*). Sanksi-sanksi atas pelanggaran norma-norma sosial merupakan serana agar setiap warga masyarakat tetap *conform* dengan norma-norma itu, sehingga tertib sosial dapat terwujud. Dengan demikian sanksi melekat pada setiap norma sosial itu merupakan pegangan dari warga meluruskan maupun memaksa warga masyarakat agar tidak menyimpang dari norma sosial (Narmoko dkk, 2006: 218).

E. Jenis-jenis Lembaga Sosial

Soerjono Soekanto (2002: 203) membedakan lembaga sosial kemasyarakatan menjadi 2, yaitu: (1). lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan, apabila norma tersebut membatasi serta mengatur perilaku anggota masyarakat, misalnya lembaga perkawinan mengatur hubungan antara pria dan wanita; (2) lembaga kemasyarakatan dianggap sebagai yang sungguh-sungguh berlaku apabila norma-norma tersebut sepenuhnya membantu pelaksanaan pola kemasyarakatan. Paksaan pelaksanaan lembaga

kemasyarakatan tergantung dari pertimbangan kesejahteraan, gotong-royong, kerjasama, dan sebagainya.

F. Sistem Pengendalian Sosial

Roucek (1951: 3) mendefinisikan sistem pengendalian sosial adalah sebagai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, khususnya pemerintah beserta aparatur. Pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Pengendalian sosial ini dapat dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain, individu terhadap kelompok social lainnya, suatu kelompok terhadap kelompok yang lain atau suatu kelompok terhadap individu. Oleh sebab itu, pengendalian sosial bertujuan untuk menjaga keserasian antara stabilitas dengan perubahan–perubahan dalam masyarakat.

Selanjutnya Roucek, membedakan pengendalian sosial berdasarkan sifatnya; *preventif*, *represif*, atau kombinasi keduanya. Pengendalian sosial bersifat *preventif* dilakukan melalui proses sosialisasi, pendidikan informal dan formal, sedangkan pengendalian represif berwujud penjatuhan sanksi kepada anggota yang melanggar atau melakukan penyimpangan dari norma yang berlaku.

Pada dasarnya, proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan cara tanpa kekerasan (*persuasif*) ataupun dengan paksaan (*coercive*). Cara persuasif akan lebih baik digunakan pada masyarakat yang relatif dalam keadaan tenteram, sedangkan cara *coercive* lebih sering diperlukan dalam masyarakat yang mengalami perubahan. Hal ini bisa disebabkan karena dalam kondisi berubah,

pengendalian sosial juga berfungsi untuk membentuk kaidah-kaidah yang baru untuk menggantikan kaidah lama.

Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengendalian sosial digunakan alat-alat pengendalian sosial, misalnya pendidikan, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini karena pendidikan telah melembaga pada masyarakat. Selain itu, hukum dalam arti luas juga termasuk alat pengendalian sosial karena hukum dianggap paling ampuh, mempunyai sanksi yang tegas dan dianggap sebagai sarana formal.

Soekanto (2002:208) mengatakan, bahwa perwujudan pengendalian sosial antara lain pemidanaan, kompensasi, terapi atau konsiliasi. Standar atau patokan dari pemidanaan adalah suatu larangan yang apabila dilanggar, maka akan mengakibatkan penderitaan (sanksi negatif) bagi pelanggarnya. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dari seluruh kelompok masyarakat dilanggar sehingga inisiatif datang dari seluruh warga kelompok (yang mungkin dikuasakan kepada pihak-pihak tertentu). Standar dan patokan untuk kompensasi adalah kewajiban, di mana inisiatif untuk memprosesnya ada pada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan akan meminta ganti rugi, oleh karena pihak lawan cidera janji. Pemidanaan dan kompensasi mempunyai sifat akusator, hal ini ada pihak yang kalah dan pihak yang menang.

Terapi dan konsiliasi sifatnya adalah remedial, artinya tujuannya untuk mengembalikan situasi pada keadaan yang semula (yakni sebelum terjadinya perkara atau sengketa). Esensinya, bukanlah siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Standar untuk terapi dan konsolidasi adalah masing-masing normalitas dan keserasian atau harmoni.

Dalam terapi, masing-masing pihak mengambil inisiatif untuk memperbaiki dirinya dengan bantuan pihak-pihak tertentu. Pada konsiliasi, masing-masing pihak yang bersengketa mencari

upaya untuk menyelesaikannya, baik secara kompromistis ataupun mengundang pihak ketiga.

G. Ciri-Ciri Umum Lembaga Sosial

Dalam kehidupan masyarakat banyak ditemui berbagai lembaga sosial atau pranata sosial, sehingga sering tidak mudah untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Untuk itu, perlu kiranya mengetahui karakteristik umum pranata sosial. Adapun ciri-ciri lembaga sosial kemasyarakatan, yaitu:

- a. lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola perilaku, wujudnya aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya,
- b. lembaga kemasyarakatan mempunyai kekekalan sendiri. Artinya, pranata sosial itu pada umumnya mempunyai daya tahan tertentu yang tidak lekas lenyap dalam kehidupan bermasyarakat. Panjangnya umur pranata sosial itu pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya karena pranata sosial itu terdiri dari proses yang tidak mudah dan relatif lama. Sementara itu, norma-norma sosial itu pada umumnya berorientasi pada kebutuhan pokok dari kehidupan masyarakat, sehingga sewajarnya apabila pranata sosial kemudian dipelihara.
- c. lembaga kemasyarakatan bertahan cukup lama, karena ia merupakan tujuan masyarakat itu sendiri
- d. lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapannya sendiri yang digunakan untuk mencapai tujuan itu seperti bangunan, peralatan mesin dan lain-lain,
- e. lembaga kemasyarakatan mempunyai lambang-lambang (simbol, slogan, warna dan loga) yang mempunyai ciri khas lembaga itu,
- f. lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau tak tertulis untuk merumuskan tujuannya, tata tertib dan lain-lain.

Ada lima lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat kompleks, yaitu lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga pemerintahan, lembaga perekonomian dan lembaga pendidikan.

H. Tipe-Tipe Lembaga Sosial

Gillin dan Gillin (1987) dalam bukunya *General Features of Social Institutional* mengatakan, bahwa ciri umum lembaga kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. merupakan suatu organisasi yang berisi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga sosial dalam hal ini berisi tata kelakuan, adat istiadat, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung atau tidak tergabung dalam suatu unit fungsional.
2. mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Dalam hal ini sistem kepercayaan dan tindakan yang lain baru akan menjadi bagian lembaga sosial setelah melewati waktu yang relatif lama.
3. mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Sebagai contoh, suatu lembaga persaingan bebas dalam kehidupan ekonomi yang bertujuan agar produksi berjalan secara efektif oleh karena para individu akan terpaut pada keuntungan yang akan diperolehnya pada orang-orang yang mempunyai pengaruh serta mengetahui cara-caranya.
4. mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, misalnya peralatan, penggunaannya biasanya akan berlainan untuk masing-masing masyarakat.
5. mempunyai lambang-lambang yang berbeda, yang menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga tersebut. Misalnya

sekolah-sekolah mempunyai lambang yang merupakan ciri khas sekolah tersebut.

6. Mempunyai tradisi yang tertulis maupun tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku (Soemardjan dan Soemardi, 1974:67).

Ciri-ciri tersebut bila diterapkan dalam suatu lembaga, misalnya lembaga perkawinan, maka lembaga perkawinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a). Mengatur perilaku seksual dari manusia.
- b). Mengatur pemberian hak dan kewajiban bagi suami, istri dan juga anak-anaknya.
- c). Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup sebagai naluri manusia yang suka hidup bersama.
- d). Untuk memenuhi kebutuhan manusia akan prestise.

I. Cara Mempelajari Lembaga Sosial

Maclver dan Charles (1957:16-17) menggolongkan dalam tiga pendekatan untuk mempelajari lembaga sosial.

1. *Analisis secara histories*. Analisis ini bertujuan untuk mempelajari sejarah muncul dan perkembangan suatu lembaga sosial, contohnya mempelajari asal-muasal dan perkembangan lembaga keluarga batih.
2. *Analisis komparatif*. Analisis komparatif bertujuan menelaah dengan cara membandingkan suatu lembaga tertentu dari berbagai masyarakat ataupun berbagai lapisan sosial masyarakat, contohnya berbagai praktek pendidikan pada anak-anak diberbagai masyarakat.
3. *Analisis fungsional*. Analisis fungsional dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antar-lembaga berdasarkan fungsinya, hal ini dapat dilakukan dengan analisis historis maupun analisis

komparatif, misalnya mempelajari tentang lembaga perkawinan, maka perlu mempelajari pula lembaga keluarga, lembaga kewarisan, dan lain-lain.

Ketiga analisis untuk mempelajari lembaga kemasyarakatan di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tetapi ketiganya saling melengkapi (Basrowi, 2006:101).

J. Perubahan Lembaga Sosial

Seiring dengan berjalannya waktu, unsur-unsur lembaga sosial dapat mengalami perubahan-perubahan. Perubahan lembaga sosial dapat meliputi: (1) perubahan unsur-unsur lembaga kemasyarakatan, seperti sebagian norma-norma dalam lembaga kemasyarakatan berubah, atau bisa juga perubahan fungsi lembaga; (2) perubahan lembaga dalam arti kemasyarakatan lama hilang dan diganti dengan lembaga kemasyarakatan yang baru.

Dalam beberapa kasus, sebagian norma-norma suatu kemasyarakatan yang berubah antara lain terjadi pada lembaga keluarga tradisional. Keluarga tradisional sudah mengalami beberapa perubahan norma para era industri seperti sekarang ini. Pada masa yang lalu, lembaga keluarga berfungsi sebagai sistem yang dapat memenuhi kebutuhan seksualitas, reproduksi, sosialisasi norma-norma masyarakat termasuk pendidikan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan lain-lain. Fungsi sosialisasi dan penyiapan makan dan minum di rumah dilakukan oleh ibu rumah tangga. Sekarang setelah banyak wanita masuk pasar tenaga kerja dan mereka bekerja seperti layaknya kaum pria, otomatis banyak fungsi keluarga yang dijalankannya mengalami perubahan. Sosialisasi norma pada anak yang dulu dilakukan para ibu rumah tangga sudah diambil alih lembaga-lembga pendidikan anak seperti tempat penitipan anak, play group, sekolah taman kanak-kanak, baby sitter, dan lain-lain. Begitu juga dengan fungsi penyiapan konsumsi yang

dilakukan oleh ibu rumah tangga diambil alih oleh warung, rumah makan atau restoran, catering, pembantu rumah tangga dan lain sebagainya.

BAB V

KELOMPOK SOSIAL

A. Pengertian Kelompok Sosial

Dalam membahas interaksi sosial serta struktur sosial, dengan sendirinya telah terbahas masalah pembentukan kelompok. Memang pembentukan kelompok (atau perpecahannya) merupakan akibat dari interaksi sosial. Karenanya setiap pembahasan tentang interaksi sosial tidak dapat tidak harus membahas kelompok pula. Dengan adanya unsur sistem nilai yang banyak menentukan jalannya interaksi sosial, jelaslah bahwa pembentukan setiap kelompok ditentukan oleh beberapa faktor lain pula, yaitu faktor: a). waktu dan zaman, b). sebab dan tujuan pembentukan kelompok, c). sifat dari anggota-anggota kelompok, d). cara pembentukan kelompok (dengan paksaan, kebetulan, ataupun sukarela).

Kelompok sosial dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, di mana dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama.

Roucek dan Warren (1984) menyatakan bahwa suatu kelompok sosial meliputi dua atau lebih manusia yang antara mereka terdapat beberapa pola keseluruhan.

Beberapa ahli lain menyebut kerumunan sebagai kelompok sosial tak teratur, atau disebut juga dengan istilah publik. Menurut Soekanto (1987), publik merupakan kesatuan. Interaksi publik terjadi secara tidak langsung menggunakan alat-alat komunikasi. Publik terjadi karena ada pusat perhatian, tetapi pusat perhatian itu tidak begitu tajam.

B. Pendekatan Sosiologi Terhadap Kelompok Sosial

Hampir dapat dipastikan, bahwa setiap manusia pada awalnya merupakan anggota kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Anggota-anggota keluarga tadi selalu menyebar, pada waktu-waktu tertentu mereka pasti akan berkumpul, misalnya pada malam hari, pagi dan siang hari. Setiap anggota keluarga mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial lain di luar rumah. Bila mereka berkumpul, terjadilah tukar-menukar pengalaman di antara mereka. Pada saat demikian, secara tidak langsung akan terjadi tukar menukar pengalaman, bahkan lebih dari itu para anggota keluarga tersebut telah mengalami berbagai perubahan, meskipun tanpa disadarinya. Tukar-menukar pengalaman tersebut, di dalam kehidupan kelompok, mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian orang-orang bersangkutan.

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai nurani untuk senantiasa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang sinambung tersebut, menghasilkan pola pergaulan yang dinamakan pola interaksi sosial. Pergaulan tersebut menghasilkan pandangan-pandangan mengenai kebaikan dan keburukan. Pandangan-pandangan tersebut merupakan nilai-nilai manusia, yang kemudian sangat berpengaruh terhadap cara dan pola berpikirnya. Seseorang yang memberikan tekanan yang kuat pada faktor kebendaan, maka pola berpikirnya cenderung bersifat materialistik.

C. Proses Terbentuknya Kelompok Sosial

Terbentuknya kelompok sosial, didasarkan oleh adanya naluri manusia yang selalu ingin hidup bersama. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai kecenderungan atas dasar dorongan

naluri-biologisnya untuk hidup berkelompok. Dalam perkembangan selanjutnya manusia hidup tidak hanya sekadar membutuhkan hidup secara biologis belaka, tapi manusia mempunyai kehendak dan kepentingan yang tak terbatas untuk memenuhi kebutuhannya tidak cukup dilakukan secara sendiri, melainkan harus dilakukan bersama agar di dalam proses usahanya dalam mencapai tujuannya itu dapat bekerjasama dan berpikir bersama.

Setidaknya ada dua hasrat utama yang mendorong manusia untuk hidup berkelompok, yaitu:

1. hasrat untuk bersatu dengan orang lain disekitarnya, dan
2. hasrat untuk bersatu dengan situasi alam sekitarnya.

Dalam realitas kehidupannya, bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melepaskan dirinya dari hidup bermasyarakat. Karena bagaimanapun setiap manusia tidak dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya secara individu, tanpa berhubungan dengan orang lainnya.

Dalam proses yang tidak begitu panjang pasti manusia akan berhubungan dengan manusia lainnya (aksi), karena manusia lainnya itu mempunyai kehendak, kepentingan dan perasaan yang sama, maka orang lain tersebut segera akan menerimanya dengan hidup bersama (reaksi). Kondisi selanjutnya setiap manusia menginginkan penampilan dalam hidup bersama itu dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Sehingga seseorang mendapat pengakuan dari anggota-anggota kelompoknya secara langsung (Syani, 2002: 103).

Menurut Soekanto, bahwa himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial, manakala memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut.

2. ada hubungan timbal-balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya, dalam kelompok
3. ada suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu, sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Faktor tersebut merupakan nasib yang sama, kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama dan lain-lain.
4. berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku. (Syani, 2002:104).

Sementa ditentukan oleh pengaruh ikatan geografik, biogenetik, dan keturunan lebih lanjut. Ikatan kelompok ini hanya mencapai tarap solidaritas mekanik. Bagi kelompok masyarakat yang menganut solidaritas mekanik, yang diutamakan ialah persamaan perilaku dan sikap. Menurut Durkheim seluruh warga masyarakat diikat oleh apa yang dinamakannya kesadaran kolektif (*collective conscience*) suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan persamaan kelompok, dan bersifat ekstrem serta memaksa. Sedangkan solidaritas organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks kesalingtergantungan antara bagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda, dan di antara berbagai peran yang ada terdapat kesalingtergantungan laksana kesalingtergantungan antara bagian suatu organik biologis (Sunarto, 2000:132). Berbeda dengan ikatan organisatorik fungsional yang merupakan hasil dari kesadaran manusia/keinginan yang rasional.

Tabel 1
Perbedaan Solidaritas Mekanik dan Solidaritas Organik

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
1. Pembagian kerja rendah	1. Pembagian kerja tinggi
2. Kesadara kolektif kuat	2. Kesadaran kolketif tinggi

Solidaritas Mekanik	Solidaritas Organik
3. Hukum refresif dominant	3. Hukum restitutif dominant
4. Individualitas rendah	4. Individualitas tinggi.
5. Konsensus terhadap pola-pola normatif itu penting.	5. Konsensus pada nilai - nilai abstrak dan umum itu penting.
6. Keterlibatan komunitas dalam menghukum orang yang menyimpang	6. Badan - badan control social yang menghukum orang yang menyimpang.
7. Secara relatif saling ketergantungan itu rendah.	7. Saling ketergantungan yang tinggi.
8. Bersifat primitif (pedesaan).	8. Bersifat industri perkotaan.

D. Jenis-Jenis Kelompok Sosial

Dilihat dari sudut individu kelompok sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu:

1. Kelompok dalam (*in group*) dan kelompok luar (*out group*).

Dalam kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau paling tidak kelompok yang memiliki jumlah anggota terbatas, biasanya hubungan antara masing-masing anggotanya saling mengenal secara mendalam. Yang menjadi dasar kekuatan ikatan kelompok semacam ini adalah sistem kekerabatan; terdiri dari anggota keluarga, termasuk pula atas dasar pekerjaan atau status sosial dalam masyarakat. Keanggotaan kelompok masing-masing mempunyai prestise tertentu sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku.

2. Kelompok primer dan kelompok sekunder.

Primery group adalah kelompok yang anggotanya saling kenal antara satu dengan yang lainnya karena pertalian darah, persahabatan, dan lain-lain. Ciri-ciri kelompok primer adalah:

- a. Ukurannya kecil, sering lebih kecil dari 20 atau 30 orang anggota,
- b. Hubungan bersifat pribadi dan akrab di antara anggota.
- c. Lebih mengutamakan komunikasi tatap muka.
- d. Lebih permanen, para anggota berada bersama dalam periode waktu yang relatif panjang.
- e. Para anggota saling mengenal secara baik dan mempunyai perasaan loyalitas yang kuat.
- f. Bersifat informal.
- g. Keputusan dalam kelompok lebih bersifat tradisional dan kurang rasional.

Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang memiliki anggota yang lebih banyak, tidak selalu saling mengenal, tidak langsung fungsional, rasional dan lebih banyak ditujukan pada tujuan pribadi, anggota-anggota yang lain dan usaha kelompok merupakan alat. Kelompok sekunder timbul berdasarkan kepentingan yang sifatnya mencari untung rugi. Adapun ciri-ciri kelompok sekunder adalah:

- a. Ukuran besar
- b. Hubungan bersifat tidak pribadi dan jauh antara sesama anggota,
- c. Sedikit saja komunikasi tatap muka,
- d. Bersifat temporal. Para anggota berada bersama-sama dalam waktu yang relatif singkat.
- e. Anggota tidak saling mengenal secara baik.
- f. Bersifat lebih formal, kelompok sering mempunyai nama, pegawai, tempat dan waktu pertemuan yang teratur dan tetap.
- g. Keputusan-keputusan dalam kelompok lebih rasional dan menekankan pada efisiensi.

3. *Gemeinschaft* dan *Gesselschaft*.

Gemeinschaft dan *Gesselschaft* adalah pokok pikiran tentang kelompok masyarakat yang dicetuskan oleh Ferdinand Tonnies. *Gemeinschaft* adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan bersifat kekal. Dasar dari hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan; kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis. Kelompok *Gemeinschaft* memiliki beberapa ciri pokok, yaitu:

- a. intimate, artinya hubungan menyeluruh yang mesra sekali,
- b. private, artinya hubungan bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja.
- c. Exclusive, artinya bahwa hubungan tersebut hanyalah untuk kita saja dan tidak untuk orang-orang lain di luar kita.

Sedangkan *gesellschaft* adalah kelompok yang didasarkan oleh ikatan lahiriah yang jangka waktunya hanya terbatas. Bentuk kelompok *gesellschaft* ini terutama terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal-balik, misalnya ikatan antara pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri dan lain sebagainya.

4. *Formal Group* dan *informal Group*.

Formal group disebut demikian karena bersifat formal, dimana hubungan antara anggotanya dibentuk dengan sengaja berdasarkan aturan-aturan atau hukum yang diterima bersama. Sedangkan informal group karena terjadinya pertemuan berulang-ulang secara pribadi yang tidak didasarkan pada suatu aturan atau hukum tertentu.

5. *Membership Group* dan *Reference Group*.

Menurut Robert K. Merton *membership group* merupakan kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota

kelompok tersebut. *Membership group* sama dengan informal group.

Sedangkan *reference group* adalah kelompok sosial yang dijadikan sebagai anggota dari suatu kelompok sosial tertentu. *Reference group* adalah kelompok yang identifikasinya, walaupun ia bukan anggota dari kelompok itu. Secara umum *reference group* merupakan kelompok yang menurut pandangan seseorang mengakui, menerima dan mengidentifikasikan dirinya tanpa harus menjadi anggotanya.

Menurut Robert K. Merton mengemukakan bahwa *reference group* dapat dikelompokkan menjadi dua tipe umum, yaitu:

- a. Tipe normatif, yang menentukan dasar-dasar bagi kepribadian seseorang
- b. Tipe perbandingan, yang merupakan pegangan bagi individu di dalam menilai kepribadiannya.

Di samping kelompok sosial yang teratur seperti di atas, terdapat juga kelompok sosial yang tidak teratur, misalnya kerumunan, publik dan lain sebagainya beserta bentuk-bentuknya. Secara garis besar, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur tadi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kerumunan dan publik.

1. Kerumunan (*crowd*). Ukuran utama adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Sedikit banyaknya batas kerumunan adalah sejauh mata dapat melihat dan selama telinga dapat mendengarkannya. Kerumunan tersebut segera mati setelah orang-orangnya bubar, dan karena itu kerumunan merupakan suatu kelompok sosial yang bersifat sementara (*temporer*).

Bentuk-bentuk umum kerumunan menurut Davis (1960:354) adalah sebagai berikut:

- a. kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial

- 1). khalayak penonton atau pendengar formal, contohnya penonton film, atau orang-orang yang menghadiri khotbah keagamaan.
 - 2). Kelompok ekspresif yang telah direncanakan, contohnya orang yang sedang berpesta, berdansa dan sebagainya.
- b. kerumunan yang bersifat sementara (*casual crowd*).
- 1). kerumunan yang kurang menyenangkan
 - 2). kerumunan orang-orang yang sedang panik
 - 3). kerumunan penonton.
- c. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum.
- 1). kerumunan yang bertindak emosional
 - 2). kerumunan yang bersifat immoral (Basrowi, 2005: 58)
2. Publik (Masyarakat Umum)

Menurut Soekanto (2002:148), bahwa publik berbeda dengan kerumunan. Hal ini karena publik lebih merupakan kelompok yang tidak merupakan kesatuan. Interaksi terjadi secara tidak langsung melalui alat-alat komunikasi misalnya, pembicaraan pribadi yang berantai, desas-desus, surat kabar, radio, televisi, film dan lain sebagainya. Alat-alat penghubung semacam ini lebih memungkinkan suatu publik mempunyai pengikut-pengikut yang lebih luas dan lebih besar. Akan tetapi, karena jumlahnya yang sangat besar, maka tak ada pusat perhatian yang tajam dan karena itu, kesatuan juga tak ada. Setiap aksi publik diprakarsai oleh keinginan individu (misalnya pemungutan suara dalam pemilihan umum) dan ternyata individu-individu dalam suatu publik masih mempunyai kesadaran akan kedudukan sosial yang sesungguhnya dan juga masih lebih mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi dari pada mereka yang bergabung dalam kerumunan.

E. Dinamika Kelompok Sosial

1. Dinamika Kelompok dengan Pendekatan Psiko-Sosial

Unsur-unsur dinamika kelompok dalam pendekatan psiko-sosial, yaitu: tujuan (*group goal*), struktur (*group structur*), fungsi tugas (*task function*), pemeliharaan dan pengembangan kelompok (*group building and maintenance*), kesatuan kelompok (*group cohensivenees*), suasana kelompok (*group atmosphere*), tekanan dan tegangan yang dialami kelompok, efektivitas kelompok, dan maksud terselubung. Pengertian dari unsur-unsur dinamika kelompok adalah sebagai berikut:

- a. tujuan kelompok adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh kelompok. Tujuan kelompok sebaiknya banyak yang sama dengan tujuan-tujuan individu anggota. Kegunaan tujuan dalam suatu kelompok adalah memberikan arah pada kegiatan kelompok sehingga tujuan kelompok dapat dijadikan kriteria pengukur keberhasilan.
- b. Struktur merupakan komponen kelompok yang mengatur interaksi dalam kelompok untuk mencapai tujuan. Setiap kelompok membentuk strukturnya sendiri secara unik, tidak perlu sama dengan struktur kelompok lain.
- c. Fungsi tugas adalah segala hal-hal yang harus dilakukan di dalam kelompok kelompok agar kelompok dapat mencapai tujuannya. Fungsi tugas berhubungan dengan usaha-usaha kelompok yang menyangkut masalah-masalah bersama dan dalam rangka memecahkan itu.
- d. Kesatuan dan kekompakan kelompok adalah komitmen yang kuat dari seluruh anggota untuk mencapai tujuan.
- e. Suasana kelompok adalah sikap mental dan perasaan-perasaan yang secara umum ada dalam kelompok.
- f. Ketegagangan adalah suasana batin yang dirasakan dalam kelompok (apakah ada perasaan tertekan). Sumber tekanan

kelompok ada dua macam, yaitu: *internal pressure* (konflik, otoriter, persaingan, dan lain-lain) dan *eksternal pressure* (tantangan, serangan, sanksi atau penghargaan atau hukuman, keseragaman, dan conformitas)

- g. Keefektifan kelompok adalah kualitas kelompok dalam mencapai tujuan, bila dilihat dari sisi kuantitatif adalah jumlah tujuan yang sudah dicapai kelompok.

2. Dinamika Kelompok dengan Pendekatan Sosiologis.

Analisis dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis ini didasarkan pada kenyataan bahwa kelompok adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi mempunyai pola perilaku yang teratur secara sistematis, sehingga kelompok tersebut sebenarnya bisa diidentifikasi bagian-bagiannya dan bisa dilihat sebagai suatu sistem sosial. Unsur-unsur pokok sistem sosial yang dapat diamati dalam analisis dinamika kelompok adalah: tujuan, keyakinan, norma, sanksi, peranan kedudukan, kewenangan, jenjang sosial, dan tekanan dan ketegangan (Ibrahim, 2002: 59).

F. Kelompok Sosial dalam kehidupan Masyarakat

Sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok, yaitu: 1). Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat). 2). Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut di atas, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Di dalam menghadapi alam sekelilingnya, seperti udara yang dingin, alam yang kejam, dan lain sebagainya, manusia menciptakan rumah, pakaian, dan lain-lain. Manusia juga harus makan agar badannya tetap sehat, untuk itu dia dapat mengambil makanan sebagai hasil dari alam sekitarnya, dengan menggunakan akalunya.

Soekanto (2002: 115) mengemukakan beberapa persyaratan sebuah kelompok sosial.

1. Setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan.
2. Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota lainnya.
3. Ada suatu faktor yang dimiliki bersama, sehingga hubungan antara m bertambah erat. Faktor tadi dapat merupakan nasib yang sama, ide politik yang sama, dan lain-lain. Tentunya faktor mempunyai musuh bersama misalnya, dan dapat pula menjadi faktor pengikat/pemersal
4. Berstruktur, berkaidah dan mempunyai pola perilaku.
5. Bersistem dan berproses.

BAB VI

MOBILITAS SOSIAL

Setiap orang berkeinginan untuk mencapai keberhasilan yang lebih tinggi dari pada yang pernah dicapai oleh orang lain. Namun dalam kenyataannya tidak semua orang mencapai keberhasilan yang diharapkan tersebut. Di antara mereka ada mencapai hasil yang tinggi, namun sebaliknya, tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan.

Dalam perspektif sosiologis, proses keberhasilan seseorang mencapai jenjang status sosial yang lebih tinggi atau proses kegagalan seseorang hingga jatuh ke kelas sosial yang lebih rendah disebut mobilitas sosial. Mobilitas sosial, tidak selalu dapat diartikan sebagai bentuk perpindahan dari tingkat yang rendah ke suatu tempat yang lebih tinggi. Mobilitas sosial dapat berlangsung dalam dua arah, yaitu dapat berbentuk mobilitas sosial ke arah yang lebih tinggi, dan mobilitas sosial ke bawah.

A. Pengertian Mobilitas Sosial

Mobiltas berasal dari kata *movere* (latin): memindahkan/berpindah, mobilitas: mudah dipindahkan atau banyak bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobilitas sosial berarti perpindahan orang atau kelompok dari satu strata sosial ke strata sosial yang lain. Mobilitas sosial juga dapat didefinisikan sebagai perubahan status yang terjadi pada diri seseorang. Kimbal Yoeng mengatakan mobilitas sosial adalah suatu gerakan dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Mobilitas sosial individu terjadi bersamaan dengan mobilitas sosial masyarakat.

Menurut Horton dan Hunt (1987) mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial bisa berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial dan biasanya termasuk pula segi penghasilan, yang dapat dialami oleh beberapa individu atau oleh keseluruhan anggota masyarakat.

Tingkat mobilitas sosial pada masing-masing masyarakat berbeda-beda. Pada masyarakat yang bersistem kelas sosial terbuka, maka mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung tinggi. sebaliknya, pada sistem kelas sosial tertutup, seperti masyarakat feodal atau masyarakat bersistem kasta, maka mobilitas sosial warga masyarakatnya akan cenderung sangat rendah dan sangat sulit diubah atau bahkan sama tidak ada.

B. Jenis Mobilitas Sosial

Terdapat beberapa mobilitas sosial dalam suatu masyarakat, yaitu:

1. Mobilitas Sosial Vertikal.

Mobilitas sosial vertikal bisa berarti arah gerakannya ke atas atau *social climbing*, dan arah gerakannya ke bawah atau sosial *sinking*. Pertama berarti individu yang kedudukannya rendah beralih ke kedudukan yang lebih tinggi atau karena adanya pembentukan kelompok sosial baru yang menempatkan individu ke derajat yang lebih rendah atau karena pembentukan sosial baru. A. Sorokin mengatakan ada beberapa prinsip gerakan vertikal: 1) hampir tidak ada masyarakat yang pelapisan sosialnya mutlak tertutup seperti kasta di India, 2) betapapun terbukanya suatu sistem pelapisan sosial masyarakat pasti ada hambatan-hambatannya, 3) gerakan sosial vertikal berlaku umum bagi semua masyarakat, 4) laju gerakan sosial vertikal masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik serta pekerjaan yang berbeda. Ia juga mengatakan

bahwa gerakan sosial vertikal mendapatkan saluran-salurannya dalam lembaga-lembaga angkatan bersenjata, lembaga keagamaan, sekolah-sekolah, organisasi ekonomi, organisasi keahlian dan perkawinan.

Sementara itu, pada masyarakat yang menganut sistem kasta tidak mengizinkan perubahan status dari lapisan rendah ke lapisan yang lebih tinggi. Status seseorang yang di sandang dalam sistem kasta didapat dari keturunan (kodrat). Masyarakat feodal mengizinkan perubahan status secara vertikal tetapi dalam jumlah yang sedikit. Status yang disandang seseorang dalam sistem feodal didapat dari keturunan dan gelar yang diberikan oleh individu yang berbeda status yang lebih tinggi. Masyarakat modern cenderung lebih demokratis, masyarakat demokratis mengizinkan perpindahan status sosial dengan kemauan individu yang bersangkutan. Pada masyarakat yang demokratis terdapat banyak sekali mobilitas vertikal. Kriteria status dalam masyarakat demokratis menyangkut pendidikan, prestasi, aset ekonomi, aset politis, dan sebagainya.

2. Mobilitas Sosial Horizontal

Mobilitas sosial horizontal: perubahan kedudukan seseorang pada lapisan sosial yang sama. Kedudukan dapat maju atau mundur, tetapi masih pada lapisan sosial yang sama. Mudah tidaknya seseorang melakukan mobilitas sosial vertikal salah satu ditentukan oleh kekakuan dan keluwesan struktur sosial di mana orang itu hidup. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, bergelar Doktor (Dr) misalnya, dan hidup di lingkungan masyarakat yang menghargai profesionalisme, besar kemungkinan akan lebih mudah menembus batas-batas lapisan sosial dan naik pada kedudukan lebih tinggi sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Sebaliknya setinggi apapun tingkat pendidikan seseorang, tetapi bila ia hidup pada suatu lingkungan masyarakat yang masih kuat nilai-nilai primordialisme dan sistem hubungan

koneksi, maka kecil kemungkinan orang tersebut akan bisa lancar jenjang kariernya dalam bekerja.

Seorang petani miskin dalam banyak hal sulit naik status sosialnya dan sulit meningkatkan penghasilannya bila ia hidup di bawah sejumlah tekanan struktur. Untuk memperoleh bantuan kredit, misalnya, mereka bukan saja sering kurang dipercaya, tetapi juga sulit memperolehnya karena kalah bersaing dengan warga desa lain yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Berbeda dengan kelompok sosial vertikal yang berarti perpindahan dalam jenjang status yang berbeda, yang dimaksud mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau obyek-obyek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dalam mobilitas sosial yang horizontal tidak terjadi perubahan dalam derajat status seseorang ataupun obyek sosial lainnya. Seorang buruh petani yang pada musim paceklik berpindah pekerjaan menjadi buruh bangunan atau tukang becak di kota tidak bisa mengalami perubahan pendapatan atau status sosial secara berarti.

3. konsekuensi mobilitas sosial.

Konsekuensi mobilitas sosial adalah konflik antara kelas sosial, konflik antara kelompok sosial, konflik antara generasi, kemungkinan adanya adaptasi.

C. Saluran-Saluran Mobilitas Sosial

Pitron A. Sorokin, di dalam mobilitas sosial secara vertikal dapat dilakukan melalui beberapa saluran terpenting sebagaimana berikut:

1. Lembaga pendidikan. Pada umumnya lembaga pendidikan dinilai merupakan saluran yang konkret dari mobilitas sosial vertikal, bahkan lembaga pendidikan formal dianggap sebagai

sosial elevator yang bergerak dari kedudukan yang paling rendah ke kedudukan yang paling tinggi.

2. Lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan salah saluran mobilitas sosial vertikal walaupun setiap agama menganggap bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat, akan tetapi pemuka-pemuka agama selalu berusaha keras untuk menaikkan mereka yang berkedudukan rendah ke kedudukan yang tinggi.
3. Organisasi politik. Saluran ini dalam banyak kasus terbukti memberi kesempatan yang cukup besar bagi setiap anggotanya untuk naik dalam tangga kedudukan dalam masyarakat. Bagi mereka yang pandai berorganisasi dalam organisasi politik mendapat kesempatan untuk dipilih sebagai anggota dalam DPRD/DPR sebagai wakil dari organisasi politik yang mengorbitkannya.
4. Organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi, baik yang bergerak dalam bidang perusahaan maupun jasa umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas sosial vertikal, karena dalam organisasi ini sifatnya relatif terbuka.
5. Angkatan bersenjata. Dalam keadaan perang di mana setiap negara menghendaki kemenangan, maka jasa seorang prajurit tanpa melihat status akan dihargai dalam masyarakat. Karena jasanya dapat menjatuhkan banyak korban, maka dimungkinkan mendapatkan kedudukan dan bahkan dapat memperoleh kekuasaan dan wewenang.

D. Determinan Mobilitas Sosial

Horton dan Hunt (1987) mencatat ada dua faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial pada masyarakat modern, yaitu:

1. Faktor struktural, yakni jumlah relatif dari kedudukan tinggi, yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pelamar atau pencari kerja adalah termasuk faktor struktural.
2. Faktor individu. Yang dimaksud dengan faktor individu adalah kualitas orang perorang, baik ditinjau dari segi tingkat pendidikannya, penampilannya, keterampilan pribadi, dan lain-lain—termasuk faktor kemujuran yang menentukan siapa yang akan berhasil mencapai kedudukan itu.

Kedua faktor tersebut di atas, memiliki pengaruh yang sangat kuat, sulit untuk menentukan bahwa salah satu di antara keduanya memiliki pengaruh yang lebih kuat.

E. Konsekuensi Mobilitas Sosial

Kendati mobilitas sosial memungkinkan orang untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan keinginannya, tetapi juga terdapat kerugian di samping manfaatnya. Beberapa kerugian akibat adanya mobilitas sosial ini antara lain adalah memungkinkan terjadinya ketidakpuasaan dan ketidakbahagiaan dibenak seseorang karena impian yang diidamkan tidak semuanya dapat dicapai dengan mudah.

Horton dan Hunt (1987), secara rinci mencatat beberapa konsekuensi negatif dari mobilitas sosial vertikal, seperti kecemasan akan penurunan status bila terjadi mobilitas menurun, ketegangan dalam mempelajari peran baru dari status jabatan yang meningkat, keretakan hubungan antara anggota kelompok promer yang semula karena seseorang berpindah ke status yang lebih tinggi atau status yang lebih rendah.

Seorang rektor, yang memenangkan pemilihan rektor pada suatu perguruan tinggi misalnya, besar kemungkinan akan

menimbulkan rasa iri di antara sesama kolega lamanya dan bukan tidak mungkin akan menjadi bahan pergunjungan, meskipun terpilihnya menjadi rektor pada perguruan tinggi tersebut, sesuai dengan hasil pemilihan dan aturan yang berlaku. Di lingkungan kelas sosialnya yang baru, seseorang yang baru saja terpilih menjadi rektor tersebut, belum tentu diterima dengan tangan terbuka. Mobilitas sosial dapat merenggangkan ikatan sosial yang sudah lama terjalin, sehingga memungkinkan pula terjadinya keterasingan di antara warga masyarakat (Narwoko, 2005, 212-213).

BAB VII

STRATIFIKASI SOSIAL

A. Pengertian Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dapat didefinisikan sebagai perbedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Pitirim A. Sorokin mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pengelompokan/perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat, kelas tinggi, menengah, dan rendah. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem pelapisan dalam masyarakat.

Status yang dimiliki seseorang dibedakan lagi antara status yang diperoleh (*ascribed status*) dan status yang diraih (*achieved status*). Status yang diperoleh misalnya perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, hubungan kekerabatan dan keanggotaan dalam kelompok seperti kasta dan kelas sosial.

Berbeda dengan itu, status sosial yang diraih adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena prestasi kerja yang diperolehnya. Seorang anak petani karena prestasi dalam ilmu pengetahuan berhasil menempatkan diri pada status sosial yang tinggi karena prestasi akademiknya yang tinggi, profesor, misalnya.

B. Bentuk-Bentuk Stratifikasi Sosial

Menurut Ralph Lipton, terdapat beberapa bentuk stratifikasi sosial, yaitu:

Pertama, stratifikasi sosial berdasarkan usia. Stratifikasi sosial sangat menentukan hak dan wewenang dari mereka yang menjadi anak sulung dan yang bukan. Dalam sistem kerajaan Inggris

misalnya, anak sulung memiliki hak untuk menjadi putra mahkota menggantikan kedudukan raja di kemudian hari.

Kedua, stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkat, anak laki-laki mempunyai wewenang yang lebih besar untuk mewariskan kekayaan orang tua sebaliknya, dalam masyarakat sistem matrilenial, wanita memiliki hak yang lebih luas dibandingkan anak laki-laki.

Ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan hubungan kekerabatan. Stratifikasi ini menentukan hak dan wewenang dari seorang ayah, ibu, paman, dan anak serta keponakan dalam kehidupan keluarga.

Keempat, stratifikasi berdasarkan keanggotaan dalam masyarakat. Stratifikasi yang berhubungan dengan etnis, agama, dan golongan dalam masyarakat. Stratifikasi ini bersifat horizontal.

Kelima, stratifikasi berdasarkan pendidikan. Stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimilikinya, semakin tinggi kedudukan sosial seseorang.

Keenam, stratifikasi berdasarkan pekerjaan. Stratifikasi ini tergantung jabatan seseorang dalam pekerjaan. Ada yang berkedudukan sebagai manajer dan ada yang berkedudukan sebagai pekerja biasa saja.

Ketujuh, stratifikasi berdasarkan tingkat perekonomian yang dimiliki seseorang. Ada yang berkedudukan sebagai kelas atas, menengah dan ada yang kelas bawah.

Stratifikasi sosial terdiri dari tiga dimensi, yaitu:

1. dimensi ekonomi, kaya, kelas menengah, dan miskin,
2. dimensi kehormatan, kelas bagsawan dan rakyat jelata, dan
3. dimensi kekuasaan, *ruler* dan *the ruled*; sebab terjadinya stratifikasi sosial.

- a) imbalan bagi status yang dimilikinya; imbalan bagi seorang manajer beda dengan imbalan yang diterima seorang buruh harian;
- b) pembagian kerja; memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan dan prestise seseorang.
- c) ketidak-samarataan dalam bidang ekonomi, kekuasaan dan prestise.

C. Terjadi Stratifikasi Sosial Dalam Masyarakat

Stratifikasi merupakan hasil kebiasaan hubungan antar-manusia secara teratur dan tersusun, sehingga setiap orang, setiap saat mempunyai situasi yang menentukan hubungannya dengan orang lain secara vertical maupun mendatar dalam masyarakatnya.

Dengan demikian, peranan yang diambil oleh orang dalam masyarakatnya ditentukan oleh situasi kelompok.

Berkaitan dengan situasi individu dalam kelompok maupun dalam masyarakat luas F. Znaniecki berpendapat bahwa situasi dapat ditinjau dari dua segi, yaitu: dari segi subyektif dan segi obyektif. Adapun segi subyektif meliputi penilaian probadi, sesuai interpretasi dan konsep. Sedangkan segi obyektif adalah penilaian oleh masyarakat yang ditentukan faktor kebudayaannya.

Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: sistem stratifikasi/pelapisan yang terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa disegaja, dan sistem stratifikasi/pelapisan yang terjadi dengan segaja disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya atau tidak segaja misalnya, lapisan yang didasarkan pada umur, jenis kelamin, kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat kepala masyarakat, mungkin dalam batas-batas tertentu berdasarkan harta.

Sedangkan stratifikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat disegaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata dan sebagainya (Narwoko dan Suyanto, 2005: 161).

Alasan terjadinya stratifikasi sosial dengan sendirinya antara lain adalah tingkat umum (senior), kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kerabat seorang kepala masyarakat, juga mungkin kekayaan. Misalnya, pada masyarakat yang hidup berburu, alasan utama yang dipakai dalam pelapisan masyarakat adalah kepandaian berburu. Sedangkan stratifikasi sosial yang disegaja disusun untuk mengejar tujuan bersama biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintah atau perusahaan.

Menurut Williams (1960: 89), bahwa proses terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat pada dasarnya dapat diteliti dengan berpedoman pada hal berikut ini:

1. Sistem stratifikasi sosial mungkin berpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat.
2. Sistem stratifikasi sosial dapat dianalisis berdasarkan unsur-unsur:
 - a. distribusi hak-hak istimewa yang obyektif, misalnya penghasilan, kekayaan dan wewenang.
 - b. Sistem pertanggaaan yang diciptakan warga (Basrawi, 61)

Stratifikasi sosial yang terjadi pada masyarakat, dapat terjadi dalam dua proses:

1. sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Sistem stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya antara lain adalah tingkat umum (senior), kepandaian, sifat keaslian keanggotaan kekerabatan seorang kepada masyarakat, dan juga mungkin

kekayaan. Alasan yang dipakai tiap-tiap masyarakat dalam proses stratifikasi sosial dalam masyarakat mungkin saja berbeda. Pada masyarakat yang hidup berburu, misalnya alasan utama yang dipakai dalam pelapisan sosial adalah kepandaian berburu.

2. sistem stratifikasi sosial yang dibuat dengan sengaja.

Stratifikasi sosial yang disengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi formal, seperti pemerintah dan perusahaan.

Stratifikasi sosial bisa dibedakan antara stratifikasi yang dibentuk secara sengaja, seperti kasta dan stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah. Dalam masyarakat yang mengenal sistem kasta, manusia dibedakan berdasarkan kelahirannya. Di sini orang tidak lagi berbicara tentang kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang. Status sosial seseorang dipatok berdasarkan kelahirannya. Seorang ditempatkan pada masyarakat kasta atas (Brahmana, misalnya) terutama karena secara kebetulan ia lahir dari kelas itu. Sekalipun ia ditempatkan pada masyarakat kasta atas, tidak berarti kemampuan dan keahlian lebih tinggi dari individu yang berasal dari kelas bawah. Dengan demikian, stratifikasi sosial seseorang secara sengaja dibentuk oleh mereka yang memiliki kekuasaan sebelumnya. Agar kekuasaannya tidak diambil alih oleh kelompok lain, maka mereka menciptakan kelompok-kelompok dalam masyarakat sedemikian sehingga hanya mereka yang dekat atau berhubungan erat dengan sang penguasa saja yang menempati kasta atas. Akan tetapi, stratifikasi sosial yang terjadi secara alamiah terjadi karena individu-individu memiliki kemampuan dan keahlian yang dapat membedakan dirinya dengan individu yang lain (Philupus dan Nurul Aini, 2006: 40).

D. Sifat Sistem Stratifikasi Sosial

Dilihat dari sifatnya, ada dua sifat dari sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat, yaitu: bersifat tertutup (*closed social stratification*), dan bersifat terbuka (*open social stratification*).

Stratifikasi sosial tertutup bercirikan sulitnya seseorang untuk berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Contohnya sistem stratifikasi sosial tertutup adalah kasta pada masyarakat India.

Sedangkan stratifikasi sosial terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berpindah ke lapisan yang lain (lebih tinggi). Hal ini dapat dilakukan dengan usaha berdasarkan kecakapannya sendiri.

Dasar atau kriteria yang umumnya dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam stratifikasi dalam masyarakat, antara lain adalah:

1. Kekayaan. Kekayaan merupakan dasar yang paling banyak digunakan dalam pelapisan sosial masyarakat. Seorang yang mempunyai kekayaan banyak akan dimasukkan ke strata atas dan yang mempunyai kekayaan sedikit akan dimasukkan ke strata bawah.
2. Kekuasaan. Seorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar akan masuk pada lapisan atas dan yang tidak mempunyai kekuasaan akan masuk lapisan bawah.
3. Kehormatan. Orang yang paling disegani dan dihormati akan dimasukkan ke lapisan atas. Dasar semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional.
4. Ilmu pengetahuan. Dasar ini dipakai oleh masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan, walaupun kadang-kadang masyarakat salah persepsi kerana hanya meninjau dari gelar seseorang.

E. Unsur-Unsur Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial terwujud dari unsur-unsur: (a) status (kedudukan); dan (b) *role* (peranan). Kedudukan dan peranan sebenarnya melekat dalam satu obyek individu. Keduanya merupakan sisi-sisi yang saling berkait erat. Pengertian kedua konsep ini dijelaskan sebagai berikut:

1. *Status sosial* atau kedudukan sosial adalah tempat di mana seseorang dalam suatu sistem sosial dihubungkan dengan orang-orang lainnya dalam sistem sosial (dalam pengertian obyektif) atau hasil dari penilaian orang lain terhadap diri seseorang dengan siapa ia berhubungan. Seseorang dikatakan berada pada status sosial yang tinggi karena orang-orang lain menempatkan dia pada tempat yang lebih tinggi dari dirinya atau lebih berharga dari dirinya. Di kalangan masyarakat pedesaan ada pendapat bahwa individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan menjadi pegawai negeri berada pada status sosial yang lebih tinggi dari pada pegawai atau pekerja lainnya.

Bagaimana seseorang memperoleh status? Status yang diperoleh seseorang dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu: *ascribed status* dan *achieved status*.

- a. *Ascribed status* yaitu status ini kedudukan yang diperoleh seseorang dalam masyarakat atas dasar keturunan atau kelahiran. Orang tidak dapat memilih dia akan lahir dari keluarga Jawa, Cina, Jepang, Sasak atau yang lainnya. Pada masyarakat tertentu, seperti di kalangan suku Sasak, bila seorang anak dilahirkan dari keluarga bangsawan, dengan gelar Lalu, maka anak tersebut secara otomatis akan menjadi bagian dari nigrat yang memperoleh gelar Lalu. Begitu juga sebaliknya, bila dia dilahirkan dari keluarga kelas Jajar karang.

b. *Achieved status* adalah kedudukan yang dicapai seseorang dalam masyarakat dengan usaha-usaha yang disengaja, bukan diperoleh karena kelahiran. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan dari masing-masing orang dalam mengejar dan mencapai tujuan-tujuannya. Masyarakat kita telah menempatkan individu yang berpendidikan pada status yang lebih tinggi, bahkan ada sebagian anggota masyarakat yang mengejar gelar tertentu dalam pendidikan hanya untuk menaikkan status sosial keluarganya. Jadi, ada sebagian anggota masyarakat yang sengaja mengejar pendidikan tertentu untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Ini bisa dimengerti, karena umumnya orang yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih inovatif, mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, dan tak dapat dipungkiri berpenghasilan relatif lebih baik.

2. *Sosial role* atau peranan sosial adalah perilaku normatif seseorang, karena kedudukannya. Bisa juga diartikan sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang disandangnya dalam sistem sosial tertentu.

Peranan yang melekat pada seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Sedangkan peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, artinya seseorang menduduki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran. Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. peran meliputi norma-norma yang dapat dilakukan oleh individu atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Dan

- c. peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan merupakan sisi lain dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka berarti dia menjalankan suatu peranan. Sebenarnya yang membedakan antara peranan dan kedudukan hanya untuk tujuan analisis. Keduanya tidak dapat dipisahkan, tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pengertian *tempat* dalam hubungannya dengan status tinggi rendahnya status seseorang dalam suatu sistem sosial tertentu? Dalam hal ini ada beberapa kriteria tertentu. Kriteria-kriteria itu tidak lain merupakan dimensi-dimensi pelapisan sosial yaitu: (1). Kekuasaan; (2). Prevelese; dan (3). Prestise (kehormatan).

F. Dasar-Dasar Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial didasarkan pada kreteria yang umum dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan dalam masyarakat antara lain, seperti:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi dalam pelapisan sosial merupakan faktor utama yang paling banyak menentukan dalam proses pelapisan sosial di masyarakat. Pelapisan sosial berdasarkan ekonomi berarti kita membedakan orang menurut kesempatan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Kesempatan-kesempatan itu antara lain dapat dilihat dalam pendapatan yang diperoleh setahun, kekayaan yang dimilikinya sekarang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk meningkatkan kehidupan ekonominya.

2. Faktor Seks (jenis kelamin)

Jenis kelamin merupakan kategori sosial yang diperoleh manusia sejak lahir, artinya tidak diperoleh atas dasar usaha yang disengaja. Dari tinjauan sosiologis, pembicaraan faktor jenis kelamin dalam pelapisan sosial tidak bermaksud untuk menguraikan faktor-faktor biologis yang membedakan pria dan wanita, tetapi pembicaraan lebih ditunjukkan pada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan ketiga dimensi sosial.

Ada kecenderungan bahwa pria memiliki kesempatan yang lebih banyak dibandingkan. Dengan kata lain, kedudukan wanita dipandang lebih rendah oleh beberapa masyarakat dari pada pria. Pemikiran-pemikiran yang membedakan kedudukan dan peran berdasarkan jenis kelamin disebut gender. Masyarakat pedesaan membatasi kiprah anak putrinya dalam hubungan sosial. Budaya pingit masyarakat Jawa sangat menunjukkan pola stratifikasi sosial berdasarkan jenis kelamin yang begitu jelas. Karena itu timbul usaha-usaha emansipasi seperti yang dimotori oleh Kartini dan Dewi Sartika.

3. Faktor Usia

Meskipun faktor usia tidak selalu mempunyai hubungan dengan ketiga dimensi pelapisan sosial, namun ada baiknya di sini dikemukakan juga. Pertimbangan ini didasarkan atas kenyataan bahwa beberapa masyarakat pedesaan di Indonesia mempunyai kecenderungan menganggap makin tua seseorang makin tinggi statusnya. Sebetulnya hubungan positif antara usia dengan ketiga dimensi status yang kita bicarakan adalah adanya pandangan bahwa makin tua seseorang makin bijaksana dia.

Proses menghargai orang tua dalam budaya Indonesia melahirkan budaya *paternalistic*. Sifat *paternalistic* ditunjukkan dengan dihormatinya orang tua tidak hanya dalam kehidupan

keluarga tetapi juga dalam bidang pemerintahan, hukum, dan politik.

4. Faktor Pendidikan (Ilmu Pengetahuan)

Keberadaan kaum terdidik atau kaum cendikia dikalangan masyarakat memperoleh tempat tersendiri dalam lapisan sosial masyarakat desa. Beberapa waktu lalu, orang yang mempunyai gelar pendidikan tertentu dianggap mengetahui segala hal yang tidak diketahui penduduk desa, kepada orang-orang terdidik itu umumnya mereka bertanya.

Orang-orang terdidik umumnya mempunyai hubungan sosial yang lebih luas, informasi yang lebih banyak, sehingga mudah menerima inovasi baru. Karena itu, para terdidik ini mudah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan sosial yang dialaminya. Aspek-aspek ini diberi nilai yang lebih oleh orang lain dan mendudukan para terdidik itu ke kedudukan yang lebih tinggi.

5. Kekuasaan.

Orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang yang besar akan masuk pada lapisan atas dan yang tidak mempunyai kekuasaan akan masuk lapisan bawah.

6. Kehormatan.

Orang yang paling disegani dan dihormati akan dimasukkan ke lapisan atas. Dasar semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat tradisional.

G. Perspektif Tentang Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial atau pembedaan anggota masyarakat ke dalam berbagai kelas sosial ini sebenarnya diperlukan atau tidak?

Jawaban terhadap pertanyaan ini bersifat relatif, tergantung dari mana sudut pandang kita melihatnya dan pendekatan macam apa yang akan kita pergunakan.

1. Pendekatan Asumsi Dasar

Para penganut pendekatan fungsional biasanya akan menjawab bahwa pelapisan sosial adalah sesuatu yang inheren dan diperlukan demi kelangsungan sistem. Sedangkan penganut pendekatan konflik akan menjawab sebaliknya dan menyatakan bahwa timbulnya pelapisan sosial sesungguhnya hanyalah ulah kelompok-kelompok elit masyarakat yang berkuasa untuk mempertahankan dominasinya. Jawaban kedua pendekatan ini wajar bertolak belakang karena keduanya memiliki asumsi dan pandangan yang memang berbeda.

Pendekatan fungsional dan konflik bertumpu pada dua tradisi yang didasari perbedaan asumsi tentang hakikat manusia dan masyarakat. Fungsionalis bertumpu kepada tradisi konservatif yang melihat stratifikasi sosial penting untuk memenuhi “kebutuhan sosial” masyarakat secara keseluruhan. Pandangan fungsional ini yakin bahwa tanpa adanya pelapisan sosial, masyarakat justru akan kacau karena akan ada peran-peran sosial tertentu yang mengalami kekosongan pelaksana dan pemeran.

Sementara dipihak lain, pendekatan konflik mempertanyakan eksistensi dan makna dari pengertian “kebutuhan sosial”. Penganut pendekatan ini umumnya curiga bahwa di balik alasan pelapisan sosial itu dibutuhkan bagi kalangan sistem sosial sebenarnya barang dan jasa yang bernilai dan langka.

2. Pendekatan Fungsional

Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, stratifikasi sosial dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat yang

mebutuhkan berbagai macam jenis pekerjaan. Tanpa adanya stratifikasi sosial, masyarakat tidak akan terangsang untuk menekuni pekerjaan-pekerjaan sulit atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan proses belajar yang lama dan mahal. Stratifikasi sosial dibutuhkan juga karena kebutuhan masyarakat untuk menempatkan orang-orang ke dalam posisi-posisi yang membutuhkan struktur sosial, dan kemudian mendorong mereka agar menjalankan tugas-tugas yang berhubungan dengan posisi tersebut.

H. Cara Mempelajari Stratifikasi Sosial

Menurut Zanden (1979), di dalam sosiologi dikenal tiga pendekatan dalam mempelajari stratifikasi sosial, yaitu:

1. Pendekatan Objektif.

Dalam mengkaji stratifikasi sosial, pendekatan obyektif berusaha untuk memilah-milah masyarakat ke dalam beberapa lapisan dilakukan menurut ukuran-ukuran yang obyektif berupa variable yang mudah diukur secara kuantitatif. Beberapa pakar demokrasi, misalnya sering membagi masyarakat menurut kategori umum, atau perbedaan besar penghasilan. Pihak yang dikategorikan menurut pendekatan obyektif mungkin saja mereka tidak menyadari atau menolak termasuk ke dalam kategori yang dibuat secara obyektif oleh pakar tersebut. Contohnya ketika pemerintah mengumumkan jumlah orang miskin di Indonesia tahun 1990 hanya tinggal sekitar 27 juta jiwa, banyak anggota masyarakat menolak atau tidak sadar bahwa mereka termasuk orang miskin.

2. Pendekatan Subyektif

Pendekatan subyektif dalam melihat stratifikasi sosial dalam masyarakat tidak diukur dengan kriteri-kriteria yang obyektif, melainkan dipilih menurut kesadaran subyektif warga masyarakat itu sendiri. Berbeda dengan pendekatan obyektif di mana peneliti

bisa menyusun kategori statistik, untuk pendekatan subyektif yang tersusun adalah kategori sosial yang ditandai oleh kesadaran jenis. Seseorang menurut kriteria obyektif termasuk miskin, menurut pendekatan subyektif ini bisa saja dianggap tidak miskin kalau ia sendiri memang merasa bukan termasuk kelompok masyarakat miskin.

3. Pendekatan Reputasional

Pendekatan reputasional berpandangan, bahwa pelapisan sosial disusun dengan cara subyek penelitian diminta menilai status orang lain dengan jalan menempatkan orang lain tersebut ke dalam suatu skala tertentu. Untuk mencai siapakah di desa tertentu yang termasuk kelas atas, peneliti yang menggunakan pendekatan reputasional bisa melakukannya dengan cara menanyakan kepada warga desa tersebut siapakah warga desa setempat yang paling kaya atau menanyakan siapakah warga desa setempat yang paling mungkin diminta pertolongan meminjamkan uang dan sebagainya.

I. Fungsi Stratifikasi Sosial

Pada umumnya orang beranggapan bahwa stratifikasi sosial menghambat kemajuan masyarakat/individu. Sebenarnya stratifikasi sosial mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan. Menurut Kingsley (1967) dan Wilbert Moore menjelaskan, bahwa fungsi-fungsi stratifikais sosial adalah:

1. stratifikasi sosial menjelaskan kepada seseorang “tempat”nya dalam masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana ia harus menjalankannya dan sehubungan dengan tugasnya menjelaskan apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakat.
2. karena peranan dari setiap tugas dalam setiap masyarakat berbeda-beda dengan seringkali adanya tugas yang kurang

dianggap penting oleh masyarakat (karena beberapa pekerjaan meminta pendidikan dan keahlian terlebih dahulu) maka berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi kerja, misalnya memberi imbalan kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya “menghukum” yang tidak atau kurang baik. Dengan sendirinya terjadilah distribusi penghargaan, hal mana menghasilkan dengan sendirinya pembentukan stratifikasi sosial.

3. penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomik, berupa pemberian status sosial atau fasilitas-fasilitas yang karena distribusinya berbeda (sesuai dengan pemenuhan persyaratan dan penilaian terhadap pelaksanaan tugas) membentuk struktur sosial (Astrid, 1999: 67).

Masyarakat dengan sendirinya, akan terbentuk lapisan-lapisan yang didasarkan pemenuhan persyaratan tugas tadi. Akhirnya berdasarkan penilaian atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan tugas dalam masyarakat, akan terbentuk suatu pelembagaan yang dalam tingkat teratasnya menguasai masyarakat dan menentukan distribusi dari penghargaan ini lebih lanjut. Lapisan-lapisan sosiologik dalam masyarakat ini akhirnya akan merupakan unsur penertiban dan pengaturan pelaksanaan tugas masing-masing anggota dalam masyarakat. Dengan demikian melalui stratifikasi sosial terbentuklah stratifikasi politik.

Meskipun demikian, dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial yang dahsyat, tidak selalu stratifikasi sosial berimpitan dengan stratifikasi politik, hal mana justru memberi sifat dinamika terhadap masyarakatnya dan merupakan masyarakat demokratis. Di samping unsur pembagian pekerjaan sebagai faktor penentu dalam pembentukan stratifikasi sosial, dikenal juga unsur biologik dan ras sebagai faktor pembentuknya. Suatu bangsa yang menjajah biasanya menempatkan diri pada lapisan masyarakat

teratas, membatasi pekerjaan-pekerjaan tertentu untuk orang-orang dari ras tersebut.

Di samping unsur-unsur obyektif, terdapat pula unsur subyektif, yaitu kesadaran manusia akan lapisan golongan masyarakatnya. Kesadaran ini dapat—tetapi dapat juga tidak—menyebabkan suatu perasaan senang dan puas diri. Menurut Richard Centers unsur kesadaran akan lapisan sosial timbul karena: *“comes from the individual’s feelings of identification with others who have imiliar backgrounds”*.

Beberapa indikator tentang penilaian subyektif seseorang menempati lapisan masyarakat ialah:

1. bentuk rumah; kondisi perawatan rumah, tata kebun.
2. wilayah tempat tinggal atau lingkungan karena dianggap bahwa wilayah tempat tinggal menentukan status.
3. pekerjaan atau profesi yang dipilih seseorang menunjukkan keinginan (identifikasi diri) dengan lapisan masyarakat tertentu,
4. sumber pendapatan menentukan status sosial seseorang (W. Lloyd Warner). Sehubungan dengan ini perlu dijelaskan bahwa bukan jumlah uang yang diterima yang menentukan melainkan status yang dinikmati melalui sumber itu.

BAB VIII

STRUKTUR SOSIAL

A. Pengertian Struktur Sosial

Dikalangan para ahli sosiologi Indonesia belum terdapat kesepakatan mengenai defenisi struktur sosial. Sebagian para ahli menganggap struktur sosial identik dengan penggambaran tentang suatu lembaga sosial, sebagian yang lain menggambarkan struktur sosial dengan istilah pranata sosial, bangunan sosial, dan lembaga kemasyarakatan.

Selain itu, ada juga ahli yang mengatakan bahwa struktur sosial dianggap sama dengan organisasi sosial. Firt (dalam Soekanto, 2002) mengatakan, bahwa organisasi sosial berkaitan dengan pilihan dan keputusan dalam hubungan-hubungan sosial yang lebih fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat, yang memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang mungkin di lakukan secara organisator.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1987) menyatakan, bahwa struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.

Sementara itu menurut A. Sorokin mengatakan bahwa struktur sosial adalah perbedaan/pengelompokkan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang bertingkat (*hierarkis*), kelas tinggi, menengah dan tinggi. Pemilikan terhadap sesuatu yang berharga merupakan bibit yang menimbulkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Sesuatu yang berharga itu dapat berupa benda ekonomi dan non-ekonomis. Pemilikan tanah, rumah, mobil, deposito dan lain-lain adalah benda-benda

ekonomis. Akan tetapi, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalehan dalam beragama, keturunan keluarga terhormat adalah benda-benda yang non-ekonomis.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan, bahwa struktur sosial mencakup berbagai hubungan sosial antara individu-individu secara teratur pada waktu tertentu yang merupakan keadaan statis dari suatu sistem sosial. Jadi, struktur sosial di sini, selain mengandung unsur kebudayaan belaka, juga mencakup seluruh prinsip hubungan-hubungan sosial yang bersifat tetap dan stabil.

Bertolak dari pandangan totalitas hubungan-hubungan sosial sebagaimana dimaksud di atas, Syani (2002: 68) berpendapat, bahwa prangkat struktur sosial yang paling utama adalah status sosial. Sedangkan fungsi struktur adalah apabila peranan individu-individu yang tergabung dalam kehidupan masyarakat mampu memelihara kontinuitas dari apa-apa yang bersifat struktural.

Dalam sosiologi, struktur sosial sering digunakan untuk menjelaskan tentang keteraturan sosial, yaitu menunjuk pada prinsip perilaku yang berulang-ulang dengan bentuk dan cara yang sama. Secara sosiometris, kadang-kadang dapat diartikan sebagai konsep psikologis dari hubungan-hubungan sejumlah anggota dalam kelompok kecil (Syani, 2002).

B. Ciri-ciri Struktur Sosial

Menurut Syani (2002: 67-70), bahwa ciri-ciri umum dari struktur sosial adalah sebagai berikut :

- 1). Struktur sosial mengacu pada hubungan-hubungan sosial yang pokok yang dapat memberikan bentuk dasar pada masyarakat; memberikan batas-batas pada aksi-aksi yang kemungkinan besar dilakukan secara organisatoris. Konsep struktur sosial diterapkan pada setiap totalitas, seperti lembaga-lembaga,

kelompok dan proses sosial. Struktur sosial disatu pihak dapat berupa hubungan-hubungan sosial antar anggota kelompok masyarakat. Di pihak lain, struktur sosial merupakan ketetapan dari pada cita-cita tentang distribusi kekuasaan di antara anggota-anggota masyarakat tertentu.

- 2). Struktur sosial mencakup semua hubungan sosial antara individu-individu pada saat tertentu. Oleh karena itu, struktur sosial dapat disebut sebagai aspek nonproses dari sistem sosial, yang pada intinya adalah situasi statis dari sistem sosial. Struktur sosial merupakan kerangka acuan yang utama dalam setiap studi tentang keteraturan hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat.
- 3). Struktur sosial merupakan seluruh kebudayaan masyarakat yang dapat dilihat dari sudut pandang teoritis. Artinya, dalam setiap meneliti tentang kebudayaan selayaknya diarahkan pada pemikiran terhadap berbagai derajat dari susunan sosialnya. Dengan demikian, struktur sosial dapat dipandang sebagai suatu kenyataan empiris yang ada pada setiap saat terjadi hubungan sosial antar manusia. Struktur sosial merupakan abstraksi dari kenyataan yang menyangkut kurun waktu tertentu, yang pada prinsipnya tidak terlepas dari perilaku, peranan dan kepercayaan, di samping menyangkut kehidupan yang aktual.
- 4) Struktur sosial merupakan realitas sosial yang bersifat statis atau kenyataan yang membeku, sehingga dapat dilihat kerangka tatanan dari berbagai bagian tubuhnya yang berbentuk struktur. Jadi, struktur sosial adalah aspek statis dari suatu proses atau fungsionalisasi dari sistem sosial.
- 5). Struktur merupakan tahapan perubahan dan perkembangan masyarakat yang mengandung dua pengertian. *Pertama*, di dalam struktur sosial terdapat peranan yang bersifat empiris dalam proses perubahan dan perkembangan. *Kedua*, dalam setiap

perubahan dan perkembangan tersebut berkesinambungan, sebelum kemudian terancam proses ketidakpuasan dalam tubuh masyarakat. Pada ciri yang kelima ini dalam sosiologi sering digunakan untuk melukiskan keteraturan sosial atau keteraturan elemen-elemen dalam berkehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Syani (2002:70) menyimpulkan, bahwa struktur sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang merupakan jaringannya dari unsur-unsur sosial yang pokok.

Soekanto (1983) mengatakan, bahwa unsur-unsur sosial pokok yang merupakan penyusun struktur sosial yaitu:

- a. Kelompok sosial;
- b. Kebudayaan;
- c. Lembaga sosial;
- d. Stratifikasi sosial;
- e. Kekuasaan dan wewenang.

C. Fungsi Struktur Sosial

Struktur sosial banyak dijumpai berbagai aspek perilaku sosial. Perilaku sosial menunjukkan adanya suatu gejala yang tetap pada kehidupan masyarakat setelah melalui tahapan perubahan-perubahan tertentu. Dengan struktur sosial, maka secara psikologis anggota masyarakat merasa ada batas-batas tertentu dalam setiap melakukan aktivitasnya, individu senantiasa menyesuaikan diri dengan ketertiban dan keteraturan masyarakat yang ada. Dalam keadaan demikian, norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan paling tidak dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai dan peraturan-peraturan tadi, sehingga disiplin dalam kelompok cenderung dapat dipertahankan.

Menurut Abdul Syani (2002:71), struktur sosial berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial, karena aturan disiplinnya berasal dari dalam kelompok sendiri, maka perlakuan pengawasan dalam kelompoknya cenderung lebih mudah untuk dapat diterima sebagai kepentingan sendiri, maka perlakuan pengawasan dalam kelompoknya cenderung lebih mudah untuk dapat diterima sebagai kepentingan sendiri.

Lebih jauh Abdul Syani (2002:70) menjelaskan, bahwa dengan adanya struktur sosial, maka secara psikologis anggota masyarakat merasa ada batas-batas tertentu dalam melakukan setiap aktivitasnya, individu senantiasa menyesuaikan diri dengan ketertiban dan keteraturan masyarakat yang ada. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa struktur sosial berfungsi sebagai ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Dalam buku Sosiologi, kelompok dan masalah sosial Abdul Syani (2002), menjelaskan bahwa dalam struktur sosial dapat dijumpai berbagai aspek perilaku sosial. Perilaku sosial menunjukkan adanya suatu yang tetap dalam kehidupan masyarakat setelah melalui tahapan perubahan-perubahan tertentu. Dengan struktur sosial, maka secara psikologis anggota masyarakat merasa ada batas-batas tertentu dalam setiap melakukan aktivitasnya; individu senantiasa menyesuaikan diri dengan ketertiban dan keteraturan masyarakat yang ada. Dalam keadaan demikian, norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan paling tidak dapat berfungsi sebagai pembatas dalam berperilaku agar tidak melanggar batas-batas hak dari anggota masyarakat yang lain. Menurut Mayor Polak (1979), struktur sosial berfungsi sebagai pengawasan sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai-nilai dan peraturan-peraturan, sehingga disiplin dalam kelompok cenderung dapat dipertahankan. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa pengawasan dimaksudkan sebagai tujuan untuk mendisiplinkan para anggota kelompok dan menghindarkan atau

membatasi adanya penyelewengan-penyelewengan dari norma-norma kelompok.

Menurut Emile Durkhem (1934), bahwa keteraturan itu disebabkan adanya faktor pengikatnya yang ditingkatkan menjadi moralitas masyarakat, faktor itu adalah antara lain:

- a. Kontrol sosial
- b. Stabilitas keluarga yang besar
- c. Sifat heterogenitas lebih kecil dari pada sifat kolektifitas.

Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menanamkan disiplin sosial, karena aturan disiplinnya berasal dari dalam kelompok sendiri, maka perlakuan pengawasan dalam kelompoknya cenderung lebih mudah untuk dapat diterima sebagai kepentingan sendiri. Dalam berlakunya proses tersebut, maka setiap anggota kelompok akan mendapat pengetahuan dan kesadaran, terutama perihal sikap, adat kebiasaan dan kepercayaan group feelingnya.

Dengan demikian anggota kelompok dapat mengetahui bagaimana cara bersikap dan berindak yang sesuai dengan ketentuan dan harapan-harapan umum sehingga kemungkinan perbedaan-perbedaan paham sedikit dapat dikurangi.

Dalam teori sebernetik tentang *general system of action* (Hoogvelt: 1985), dijelaskan bahwa suatu masyarakat akan dapat dianalisis dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu:

1. Fungsi mempertahankan pola (*pattern maintenance*). Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, oleh karena diorientasikan realitas yang terakhir.
2. Fungsi integrasi (*Integration*). Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu

sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.

3. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*). Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, mobilisasi warga masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.
4. Fungsi adaptasi (*Adaptation*) yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko-organic. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.

BAB IX

PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengertian Perubahan Sosial

Seperti diketahui, setiap kehidupan masyarakat manusia senantiasa mengalami suatu perubahan sosial. Perubahan sosial pada kehidupan manusia mempunyai kepentingan yang tak terbatas. Perubahan akan nampak setelah tatanan dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.

Perubahan yang terjadi dapat merupakan kemajuan atau mungkin justru kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, kekuasaan, tanggung jawab dan kepemimpinan. Dalam masyarakat maju atau masyarakat berkembang perubahan sosial berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi (Zindan, 1993).

Perubahan sosial dikalangan para sosiolog memiliki pengertian yang berbeda. Berbedanya pengertian perubahan sosial tersebut sebagai konsekuensi dari kekaburan yang sering dialami ahli sosial di dalam memberikan penjelasan tentang ruang lingkup, batasan pengertian dan aspek-aspek, terutama dalam perubahan sosial. Sebagai upaya menghindari kesulitan tersebut, maka faktor utama yang paling penting untuk diketahui dan dipahami adalah tentang batas dan pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Menurut Wilbert Moore (1967:3) perubahan sosial sebagai perubahan sosial yang terjadi dalam “struktur sosial”, dan yang dimaksud dengan struktur sosial adalah “pola-pola perilaku” dan “interaksi sosial”. Moore memasukkan ke dalam definisi perubahan

sosial sebagai ekspresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan fenomena kultur. Selo Soemardjan (1964) berpendapat bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Roucek dan Warren (1984), mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur sosial. Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo (1985), merumuskan definisi perubahan sosial sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, sistem sosial dan organisasi sosial.

Karl Manheim (Lauer, 1993:248), menjelaskan mengenai inti dari suatu perubahan. Ia mengungkapkan bahwa:

“changing community is not determined by a set of unshakable commands, but is engaged in a permanent search for new norms to express change experiences. The content of conscience is accordingly not determined by explicit and rule but is continuously shaping itself a new”

Jelaslah, bahwa perubahan masyarakat dalam intinya ialah perubahan norma-norma masyarakat. Karena perubahan norma dan proses pembentukan norma baru merupakan inti dari usaha mempertahankan persatuan hidup kelompok, dengan sendirinya proses perubahan masyarakat menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang, sehingga demi kemajuan harus diusahakan adanya reintegrasi yaitu: penampungan kembali dalam suatu kehidupan bermasyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan baru masyarakat di mana norma-norma yang lebih cocok ini akan merupakan ikatan dari masyarakat yang baru/lebih luas (Susanto, 1985:160).

B. Ruang Lingkup Perubahan Sosial

Ruang lingkup perubahan sosial meliputi bidang yang sangat luas. Sebagaimana dinyatakan Selo Soemardjan perubahan sosial adalah “segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat” (Soekanto, 2002).

Perubahan sosial meliputi berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, hukum, dan teknologi. Sebaliknya, perubahan sosial yang terjadi dapat hanya meliputi bidang tertentu saja dan terbatas pula ke dalamnya. Misalnya, perubahan pada bidang pendidikan yang baru mencapai tarap norma dan nilai belum sampai ke tarap perilaku. Perilaku sosial dapat terjadi pada tingkat individu, kelompok sosial, kelompok besar, maupun kelompok yang sangat besar. Perubahan sosial pada bidang tertentu yang akan pada tingkat yang luas, misalnya tentang timbulnya kesadaran terhadap usaha pelestarian.

C. Faktor-Faktor Perubaha Sosial

Perubahan sosial menghadapkan manusia pada situasi baru dan mengarahkannya pada suatu bentuk kegiatan yang baru. Terdapat banyak faktor yang terkait dan menyebabkan perubahan perilaku dan budaya manusia serta struktur di dalam masyarakat. Para sosiolog telah mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang dampaknya sangat berbeda satu sama lainnya, tergantung pada situasi, waktu dan tempat. Setelah melalui proses analisis yang panjang, para sosiolog seperti telah menyaring beberapa faktor utama pendorong perubahan sosial. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964:489) mengatakan, bahwa secara umum penyebab dari perubahan sosial dibedakan atas dua golongan besar,

yaitu: perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri; dan perubahan yang berasal dari luar masyarakat.

1. Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri.

a). Perkembangan ilmu pengetahuan

Perkembangan ilmu pengetahuan melahirkan berbagai pertemuan baru. Penemuan baru, banyak faktor yang menyebabkan individu mencari penemuan baru, beberapa diantaranya adalah: (1) kesadaran dari orang perorang akan ketergantungan dalam masyarakat (2) kualitas dari ahli-ahli dalam suatu kebudayaan, dan (3) adanya perangsang bagi aktivitas-aktivitas pencipta dalam masyarakat.

Pada saat awal seseorang memulai keinginan untuk mewujudkan cita-citanya pertama kali yang dilakukan dengan cara coba-coba (*trial and error*) secara spekulatif. Pada periode tersebut, justru mengalami kegagalan dijadikan bahan pertimbangan atau perbaikan untuk mencapai keberhasilan di masyarakat berikutnya. Perubahan yang dilalui tidak menunjukkan adanya suatu peningkatan yang berarti, lingkaran kemajuan bersiklus tidak menentu. Arah siklus lingkaran bergerak mendatar dari titik A kembali ke titik A. Oleh karenanya, dapat dijelaskan bahwa ide-ide keyakinan dan hasil-hasil karya yang bersifat fisik dalam pengertian penemuan baru, semuanya merupakan faktor pendorong ke arah perubahan kehidupan masyarakat. Dalam apapun penemuan baru itu, senantiasa akan membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, baik secara cepat (*revolusi*) maupun lambat (*evolusi*), dalam skala perubahan yang kecil, sebagian atau keseluruhan.

b). Faktor Jumlah Penduduk

Faktor penduduk, perubahan pada jumlah, komposisi dan distribusi penduduk dapat mempengaruhi budaya dan struktur sosial. Bertambahnya penduduk suatu daerah, dapat mengakibatkan perubahan pada struktur masyarakat, terutama mengenai lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebagai contoh yang paling relevan adalah program transmigrasi, jika program transmigrasi dijalankan secara ideal dengan memperhatikan aspek sosial ekonomi, budaya, politik, agama dan keamanan, sangat mungkin akan terjadi perubahan yang positif. Artinya dengan adanya pendatang baru yang terampil dan siap bekerja di lokasi baru, maka besar kemungkinan tidak saja akan menguntungkan para transmigrasi, melainkan juga dapat mempengaruhi positif pada penduduk asli. Penduduk asli dapat pula bekerja dengan pola yang menguntungkan sama dengan para pendatang. Kehidupan masyarakat pun akan berubah keran percampuran antara berbagai macam pola perilaku sosial dan budaya, demikian pula dengan ekonomi, politik, agama dan keamanan. Bahkan Rauccek dan Warren (1984) menggambarkan bahwa perubahan sosial lebih berkembang pada masyarakat yang heterogen. Dikatakan bahwa masyarakat yang berasal dari berbagai etnik yang bergaul dengan bebas dan mendifusikan adat, pengetahuan, teknologi dan ideologi, biasanya mengalami kadar perubahan pesat.

c). Faktor Pertentangan dan Pemberontakan.

Pertentangan (konflik) dalam nilai dan norma-norma, politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan perubahan sosial yang luas. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan bila individu-individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat

kebiasaan yang telah diikuti selama ini, misalnya, adanya anggapan umum masyarakat Indonesia, bahwa “makin banyak anak makin banyak rezki”, setiap anak mempunyai rizkinya, masing-masing”, sehingga tidak menimbulkan kecemasan setiap kali anaknya lahir. kini pandangan itu mengalami perubahan, bahwa “makin banyak anak makin besar beban ekonomi”.

Perubahan sosial yang diakibatkan oleh pertentangan politik dan pemberontakan di Indonesia telah menunjukkan buktinya. Perubahan-perubahan yang ditimbulkan akibat pertentangan dan pemberontakan selalu berakibat buruk, seperti terhentinya aktivitas perekonomian, inflasi, timbulnya saling curiga, kecemasan, dan lain-lainnya.

Pertentangan antara anggota-anggota masyarakat dapat terjadi karena perubahan masyarakat yang pesat, sebagaimana dijelaskan oleh Roucek dan Warren (1984), masyarakat yang heterogen biasanya ditandai kurang dekatnya hubungan antara orang yang satu dengan orang atau kelompok lainnya; individu cenderung mencari jalannya sendiri-sendiri. Sementara itu, kondisi sumber pemenuhan kebutuhan semakin terbatas, sehingga persaingan tidak dapat dihindari; jika proses ini memuncak, maka pertentangan akan terjadi pada masyarakat yang bersangkutan. Pada saat masyarakat dalam keadaan konflik dapat timbul kekecewaan dan keresahan sosial, maka pada saat itu pula individu-individu pada umumnya sangat mudah terpengaruh terhadap hal-hal baru.

2. Perubahan yang berasal dari luar masyarakat.
 - a). Pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Faktor kebudayaan, dapat menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat. Secara timbal-balik perubahan pada unsur budaya dapat mendorong pada bentuk dan hubungan sosial kemasyarakatan. Perubahan sosial masyarakat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kebudayaan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, melainkan dapat pula disebabkan oleh pengaruh kebudayaan yang datang dari masyarakat sekitar (luar). Terdapat kemungkinan perubahan sosial masyarakat sama sekali tidak disebabkan oleh perubahan kebudayaan masyarakat sekitar, atau kebudayaan yang berbeda. Pengaruh kebudayaan tersebut mengakibatkan beberapa skenario perubahan sosial masyarakat, yaitu antara lain: (a) kebudayaan saling berdampingan dan bercampur menjadi satu kebulatan, (b). salah satu kebudayaan menjadi pudar karena kebudayaan lain, (c) masing-masing kebudayaan menjadi lebur, timbul kebudayaan baru sebagai akibat saling mempengaruhi.

b). Peperangan.

Peperangan yang terjadi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain menimbulkan berbagai dampak, seperti halnya dampak yang ditimbulkan oleh adanya pemberontakan dan pertentangan-pertentangan. Akan tetapi, dampak negatif yang ditimbulkan oleh peperangan lebih dahsyat karena peralatan perang biasanya lebih canggih pula.

D. Proses Perubahan Sosial

Harapan sebagian, bahkan mungkin keseluruhan masyarakat, terjadi suatu keselarasan dan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat, akan tetapi kenyataannya harapan tersebut tidak mudah untuk terwujud. Pada waktu tertentu tatanan

kehidupan masyarakat dapat lebih harmonis, namun pada perkembangannya tidak jarang terjadi pertentangan atau disintegrasi. Robert K. Merton berpendapat bahwa di dalam setiap masyarakat terdapat *starin toward anomie*. Karena demi kelangsungan suatu kehidupan masyarakat, maka gejala pertentangan dan *anomi* diusahakan dengan diimbangi dengan proses integrasi. Penyusunan tersebut dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghindari terjadinya kebingungan (*anomi*) atau ketidaksetabilan masyarakat. Jika kebingungan dan ketidaksetabilan tersebut terjadi pada masyarakat yang terbatas, maka kemungkinan penyesuaian akan lebih mudah. Akan tetapi, apabila terjadi pada masyarakat yang lebih besar dan luas atau pada masyarakat yang heterogen, maka proses penyesuaiannya relatif lebih sulit dapat dicapai, sehingga kemungkinan akan terjadinya kebingungan dan disintegrasi lebih besar (Merton, 1998).

Astrid S. Susanto (1977) mengemukakan ada beberapa fase reorganisasi sehubungan dengan proses penyesuaian nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, yaitu antara lain:

- a. Mula-mula adanya kegelisahan dan ketidakpuasan pada sebagian penduduk (biasanya kaum terpelajar).
- b. Terdapat *popular-stage* atau tersebarnya ide-ide perubahan.
- c. Adanya program perencanaan pembangunan secara sistematis,
- d. Adanya sistematika dalam pelaksanaan perencanaan (*formal stage*),
- e. Adanyanya badan yang menyalurkan stimulasi pembangunan terencana dengan akibat bahwa pendapat diterima (*institution stage*),
- f. Kompromi pelaksanaan bahan penolakan ataupun bahan penerimaan sepenuhnya, dan

- g. Adanya *sosial planning* atau *sosial organization* sebagai hasil *research*,.

Lebih jauh Astrid Susanto (1977) menjelaskan bahwa, melalui proses perubahan sosial masyarakat dapat dihasilkan tiga alternatif arah perubahan, yaitu:

- a. perubahan akan bergerak ke arah baru dengan landasan pola perilaku dan nilai lama,
- b. perubahan akan bergerak menuju pada suatu bentuk semi atau pertengahan antara nilai-nilai,
- c. perubahan dapat bergerak ke arah suatu pola perilaku dan nilai yang sama sekali baru.

E. Bentuk-Bentuk Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi dan perubahan revolusi, perubahan terencana dan perubahan tak terencana.

Perubahan evolusi adalah suatu perubahan sosial yang terjadi dalam proses yang lambat dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan tersebut berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Pada saat muncul pola perilaku sosial baru dalam masyarakat, maka pertama kali terjadi proses kepercayaan terhadap manfaat yang mungkin dicapai. Tahap berikutnya masyarakat mulai melihat realita sosial, jika perubahan tersebut pada umumnya lebih banyak memberikan manfaat atau berguna dalam rangka usaha memenuhi berbagai aspek kebutuhan hidupnya, maka secara perlahan masyarakat akan menerima perkembangan masyarakat

yang bersangkutan sebagai suatu kebenaran. Misalnya pada masyarakat yang homogen dengan pergaulan secara langsung, lambat laun akan menerima sikap-sikap dan norma-norma sosial baru yang datang menurut pola masyarakat heterogen. Menurut prinsip teori yang diuraikan oleh pakar sosiologi, Herbert Spencer, bahwa kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi. Masyarakat merupakan hasil perkembangan dari kelompok homogen ke kelompok yang heterogen sifat dan susunannya. Perubahan seperti itu tidak pasti arahnya, karena arus perubahannya menuju pada bentuk kehidupan yang sempurna atau mungkin sebaliknya.

Perubahan revolusi, di mana perubahan berlangsung sangat cepat dan tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis perubahan revolusi diartikan sebagai perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. Perubahan tersebut dapat terjadi karena sudah ada perencanaan sebelumnya atau mungkin tidak ada sama sekali. Perubahan revolusi seringkali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan, ketegangan-ketegangan tersebut sulit untuk dihindari, bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga kemudian ada yang menjelma menjadi tindakan revolusi.

Perubahan terencana adalah perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang menghendaki suatu perubahan dinamakan agen perubahan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang terencana, selalu berada di bawah kendali atau pengawasan dari agen perubahan tersebut. Pelaksanaan rencana perubahan tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga

kemasyarakatan tertentu saja, melainkan bisa juga diarahkan pada perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang lain dan dalam tubuh masyarakat yang lain pula. Perubahan terencana, paling ideal dilakukan pada masyarakat yang pada dasarnya telah mempunyai keinginan untuk mendapatkan perubahan, tetapi tidak mampu mengimplementasikannya. Dalam situasi seperti itu, masyarakat akan serta merta menerima perubahan yang dilakukan oleh agen perubahan yang dirasakan sesuai dengan kehendak dan harapan mereka kemudian menyesuaikan dengan perencanaan yang sudah ada. Perubahan terencana, yang didahului oleh pengamatan tentang kehendak dan harapan masyarakat sasaran selanjutnya dapat pula merupakan rencana perubahan terhadap hasil-hasil perubahan sebelumnya yang tidak menguntungkan pihak masyarakat.

Perubahan tak terencana adalah perubahan yang berlangsung di luar kehendak dan pengawasan masyarakat. Perubahan yang tidak dikehendaki tersebut biasanya lebih banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan yang merugikan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota masyarakat akan sulit diarahkan untuk melakukan perubahan, sebagai akibat kekecewaan mereka yang mendalam. Kekecewaan tersebut terjadi sangat mungkin karena pengalaman buruk mereka terhadap akibat-akibat dari perubahan yang terjadi sebelumnya yang tidak membuahkan kesejahteraan dan kepuasan, atau mungkin karena masyarakat masih mempunyai kepercayaan yang sangat kuat terhadap kesakralan dan kemampuan lembaga-lembaga sosial atau tradisi-tradisi sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

F. Faktor Yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan Sosial

1. Faktor-faktor yang mendorong proses perubahan.

a). Kontak dengan kebudayaan lain.

Ralp Linton (1936) mengatakan, bahwa salah satu proses yang menyangkut kontak dengan kebudayaan lain adalah difusi. Ia mengartikan difusi sebagai proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan individu ke individu yang lain dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, sehingga dapat dihimpun penemuan-penemuan baru yang telah dihasilkan. Difusi berperan dalam menyebarkan penemuan baru pada masyarakat luas, sehingga seluruh manusia menikmati manfaatnya (Soekanto, 2002:326).

Faktor-faktor yang mempengaruhi difusi masyarakat antara lain, yaitu:

- (1). adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut.
- (2). kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru tersebut.
- (3). pengakuan akan kegunaan penemuan baru
- (4). ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyaingi unsur-unsur penemuan baru tersebut.
- (5). peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini.
- (6). paksaan dapat juga dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru.

b). Sistem pendidikan formal yang maju

Pendidikan memiliki fungsi utama, antara lain sebagai transformasi budaya, penanaman nilai-nilai yang baru, serta membentuk pola pikir ilmiah dan obyektif. Fungsi pendidikan

tersebut dapat memberikan masyarakat kemampuan untuk menilai apakah kebudayaan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan zaman atau tidak.

- 1). Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Sikap ini akan mendorong bagi usaha-usaha penemuan baru.
- 2). Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik.
- 3). Sistem stratifikasi terbuka. Sistem ini memungkinkan adanya mobilitas sosial vertical yang luas atau berarti memberikan kesempatan kepada para individu untuk maju atas dasar kemampuan sendiri.
- 4). Penduduk yang heterogen. Masyarakat yang heterogen dan segala hal akan mempermudah terjadinya pertentangan yang akhirnya berujung sebagai pendorong bagi terjadinya perubahan dalam masyarakat.
- 5). Ketidakpuasaan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Ketidakpuasaan yang berlangsung terlalu lama dalam masyarakat memungkinkan timbulnya revolusi.
- 6). Nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.
- 7). Orientasi kemasa depan.

2. Faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan.

Soekanto (2002:330) menyebutkan, setidaknya ada 10 faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial, yaitu:

- a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
- b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini juga biasanya terjadi pada masyarakat yang terisolir.

- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau *vested interests*.
- d. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Pemikiran ini muncul dari anggapan bahwa unsur-unsur luar dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat.
- e. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup.
- f. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan pada unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha yang melawan ideologi masyarakat.
- g. Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tidak efektif lagi, maka krisis akan muncul.
- h. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

BAB X

KEKUASAAN, WEWENANG DAN KEPEMIMPINAN

A. Pengertian Kekuasaan

Konsep kekuasaan erat sekali hubungannya dengan konsep kepemimpinan. Dengan kekuasaan pimpinan memperoleh alat untuk mempengaruhi para pengikutnya. Para pemimpin seharusnya tidak hanya menilai perilakunya sendiri agar mereka mengerti bagaimana mempengaruhi orang lain, akan tetapi juga harus melihat posisi mereka dan cara menggunakan kekuasaan.

Kekuasaan terkait dengan asset sumber daya dan dukungan massa setiap masyarakat. Ia cenderung bervariasi dan berubah dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat agraris, kekuasaan diperoleh melalui akumulasi asset dan sumber daya pertanian. penguasaan asset tanah bisa memperkuat pengaruh atas kekuasaan yang dimilikinya. Berbeda dengan masyarakat industry. Asset pengetahuan dan juga modal financial yang dimiliki, bisa menaikkan power seseorang yang hidup di masyarakat industry.

Menurut Max Weber (1964), kekuasaan adalah suatu potensi yang membuat seseorang di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri walaupun mendapat tantangan dari orang lain. Kekuasaan merupakan suatu hal yang masih potensial. Efektif tidaknya tergantung dari kemampuan si empunya untuk melaksanakan (kemampuan memimpin)

Lebih jauh menurut Weber, pembicaraan tentang kekuasaan memiliki kaitan yang erat dengan rasionalitas atau kesadaran tindakan seseorang. Weber mengartikan kekuasaan merupakan kemungkinan seseorang dalam relasi sosialnya berada dalam posisi

bisa menjalankan kanapa yang diinginkan, meski menghadapi resistensi. Oleh karena itu, menurut Weber kekuasaan ada di seluruh bentuk relasi kehidupan sosial manusia. Mulai dari kehidupan di ranah keluarga, organisasi kemasyarakatan hingga pada ranah pemerintahan.

Definisi kekuasaan yang dibuat Weber mengharuskan kita memahami dua hal, yaitu: *pertama*, kehendak atau apa yang diinginkan seseorang di satu pihak, dan *kedua*, pengaruh atau *power* yang memungkinkan seseorang bisa menjalankan keinginannya meski mendapatkan perlawanan. Berkaitan dengan kehendak seseorang, maka *power* sebagai sebuah kemungkinan menjalankan kehendak, mengharuskan kita untuk memahami kesadaran atau apa yang disebut dengan intensionalitas individu terhadap tindakannya. Memahami intensionalitas tindakan individu akan memandu untuk dapat memahami apa yang dimaksud dan diinginkan seseorang dari tindakan yang dilakukannya itu.

Max Weber selalu mengkaitkan tindakan seseorang dengan intensionalitas atau kesadaran. Oleh sebab itu, di balik penggunaan kekuasaan menurut Weber, setiap orang selalu menyimpan keinginan dan maksud atau intensionalitas tertentu.

Weber menaruh perhatian bagaimana kelompok dan kepentingan kelompok mencul dalam kehidupan sosial. Persaingan kelompok menurut Weber dipengaruhi oleh kekuasaan. Kekuasaan menentukan satu kelompok sosial mendominasi kelompok sosial yang lain. Menurut Weber kekuasaan bukan hanya bersumber dari kekuatan ekonomi, atau hubungan pemilikan secara *private* atas alat produksi, melainkan juga beberapa dimensi , meliputi klas, status dan pengorganisasian ke dalam partai.

Kelas mengacu kepada tatanan ekonomi masyarakat yang dalam hal ini “hubungan pasar” sebagai elemen utama. Hubungan pasar inilah yang berkaitan dengan pemilikan individual. Oleh karena itu, betapun ada perbedaan, namun pemikira Weber ini cukup

berdekatan dengan konsep kelas seperti yang dimaksudkan oleh Marx.

Mengenai dimensi status yang dibedakan dengan partai dalam kekuasaan dinayakan Weber, “status” mengacu kepada cara organisasi masyarakat memunculkan perbebedaan antara prestise atau kehormatan bagi kelompok individu yang berbeda-beda. Kehormatan atau status sosial bukan hanya diperoleh kerana pemilikan kekayaan atau *skill* atau sejumlah atribut, melainkan bersumber dari “*style of life*”—gaya hidup yang dipakai oleh kelompok dalam masyarakat tertentu. Kelompok status dapat dibedakan dari upaya mereka mengembangkan praktek-praktek yang bersifat eksklusif, seperti berbagai ritual, cara mereka mengatur perkawinan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan “partai” adalah cara kelompok mengorganisar diri dalam mencapai tujuan hidup. Partai-partai saling berupaya meraih posisi, kehormatan dan control atas tatanan sosial. Jadi, partai bisa dibentuk atas dasar klas maupun kelompok status atasu gabungan di antara keduanya.

Menurut Weber ada tiga sumber legitimasi dalam kekuasaan yang penting, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi, charisma da instrument rasional seperti kekuasaan yang diperoleh berdasarkan aturan legal rasional. Weber menyatakan bahwa legitimasi itu haruslah dipelihara di mata kelompok yang dikuasai alau ingin kekuasaannya berjalan efektif.

Mereka bisa memeliharanya kalau mereka dapat mengendalikan dan mendiseminasi gagasan utama (*ideology*), antara lain penggunaan kekuasaan yang lebih terbuka melalui mesin hukum, pengadilan, polisi dan sebagainya. Dalam membangun teori sosiologi, ia menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat bagaimana individu menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu ia mendefiniskan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial

atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* agar dengan cara itu dapat menghasilkan sebuah penjelasan mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya (Zainudin Maliki, 2010: 13)

Kekuasaan memiliki dua aspek, yaitu pengaruh dan otoritas, pengaruh merupakan kekuasaan yang mengakibatkan perubahan perilaku orang lain untuk kelompok lain. Sedangkan otoritas merupakan tipe kekuasaan yang melekat pada jabatan yang diduduki pimpinan.

Untuk bisa memahami tentang kekuasaan, berikut ini dikemukakan definisi para ahli tentang kekuasaan.

1. Surbakti (1999:58) mengatakan, kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi.
2. Anthony Giddens (1986:92) memandang kekuasaan sebagai *transformative capacity*, yaitu kemampuan mengadakan intervensi dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan. Giddens juga mengatakan bahwa kekuasaan adalah sesuatu yang secara instrinsik terkait dengan manusia sehingga kekuasaan harus diterima sebagai fenomena yang regular dan rutin, tidak perlu berhubungan dengan tindakan tertentu, seperti dalam pengambilan keputusan.
3. Weber dalam Waters (1994) mengatakan, bahwa kekuasaan adalah kemungkinan seorang aktor dapat menguasai dirinya, meskipun dengan perlawanan tanpa memperhatikan resiko. Kekuasaan menyangkut kualitas individu dan kombinasi keadaan yang memungkinkan seseorang mengontrol lainnya.
4. Poulantzas (dalam Waters, 1994) mengartikan kekuasaan sebagai kapasitas kelas sosial untuk merealisasikan tujuan tertentu. Kelas adalah kebebasan individu tentang apa yang

diinginkan dan interes kelas tak dapat dialokasikan pada level *agency*, rasionalitas atau psikologi. Interes kelas mengarah pada perluasan kapasitas sebagai kekuatan sosial. Kekuasaan adalah kapasitas dari kelas sosial untuk memperluas kekuasaannya. Kpasitas kelas berfungsi merealisasi interes objektif dan kekuasaan kelas tergantung kapasitas.

5. Soekanto (2002: 296) mendefinisikan kekuasaan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan.
6. Wetters (1994) mengatakan, bahwa berhubungan dengan politik, kekuasaan dipandang sebagai kapasitas yang independent dan substantif, kekuasaan tak dapat direduksi ke dalam kepemilikan ekonomi atau dipandang sebagai aspek yang berkaitan. Kekuasaan dipandang sebagai hal yang substantive yang dapat dipertukarkan, diakumulasikan, didistribusikan, dan dikonsentrasikan. Pemerintah atau Negara/ politik dipandang sebagai organisasi utama yang menyebabkan kekuasaan menjadi ada. Para teoritis elit *classical* memiliki prinsip, bahwa di sana (dalam kekuasaan) harus ada konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat jika keputusan hendak dicapai dan aktivitas terjadi dalam konteks dari *agreement* yang bersifat normative tentang legitimasi diferensiasi kekuasaan.
7. Parsons dalam Waters (1994) mengaas kekuasaan sebagai ekspansi sumber yang tak terbatas, sama dengan sumber ekonomi. Dalam masyarakat yang sangat kompleks berkembang secara nyata dalam kapasitas yang transformatif, kekuasaan dipandang sebagai kapasitas transformasinya, sedangkan wadah transformasi itu adalah politik (negara). Hal ini disebabkan karena tugas pemerintah sebagai pengorganisir aktivitas kolektif. Bagi Parsons, kekuasaan adalah sarana/ alat untuk operasi politik.

8. Field dan Higley (dalam Waters, 1994) mengatakan, bahwa kekuasaan digunakan sebagai sarana komunikasi secara empiris, tetapi diakui bahwa kekuasaan melahirkan strategi.
9. Yukl (1989:165) mengatakan, kekuasaan adalah pengaruh potensial dari seorang agen terhadap sikap dan perilaku seseorang yang ditargetkan.
10. Amitai Etzioni mengemukakan, bahwa kekuasaan adalah tindakan untuk mengatasi sebagian atau seluruh penolakan dan memperkenalkan perubahan ketika terjadi penolakan tersebut (Susilo, 2001:28). Etzioni lebih mengedepankan pemahaman pada kekuasaan actual dan mengesampingkan pertimbangan kemungkinan adanya sesuatu di luar pelaksanaan kekuasaan (aset yang terdiri dari beberapa jenis dan lebih jauh diperkenalkannya juga sebagai sumber kekuasaan).

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah sebagai berikut: 1). Kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi secara rasional perilaku pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi. 2). Kemampuan mengadakan intervensi dalam peristiwa tertentu dan mengadakan perubahan. 3). Secara intrinsik yang terkait dengan manusia, sehingga kekuasaan harus diterima sebagai fenomena yang regular dan rutin. 4). Sebagai kapasitas kelas sosial untuk merealisasikan tujuan tertentu. 5). Sebagai kapasitas yang independent dan substantif, yang tidak dapat direduksi ke dalam kepemilikan ekonomi. 6). Sebagai ekspansi sumber yang tak terbatas. 7). Sebagai sarana komunikasi secara empiris dan melahirkan strategi.

1. Ciri-Ciri Kekuasaan

Waters (1994: 218) mengemukakan ciri-ciri kekuasaan yang meliputi berikut ini:

- (a) kekuasaan berimplikasi pada keberadaan sosial tertentu (aktor individu, aktor kolektif, atau struktur) yang memiliki konsekuensi pada yang lainnya.
- (b) Kekuasaan selalu berdasarkan hubungan spesifik tentang distribusi sumber dalam masyarakat.
- (c) Kekuasaan menunjukkan derajat konsentrasi.
- (d) Kekuasaan melibatkan hampir semua hubungan manusia, yaitu meliputi rasa, elienasi, dan sumber pertukaran antarkelompok relasi.
- (e) Kekuasaan melahirkan relasi spesifik pada maksud manusia atau teknologi.
- (f) Penggunaan kekuasaan menunjukkan spesialisasi dalam institusi sosial yang disebut negara atau politik.

2. Unsur-unsur kekuasaan

Kekuasaan yang dijumpai pada intraksi social antara manusia maupun antar kelompok. Dalam rangka mendukung dan mempertahankan kekuasaan diperlukan unsur-unsur dari kekuasaan. Unsur-unsur mengenai kekuasaan antara lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Surbakti (1999:58), bahwa kekuasaan meliputi tiga unsur, yaitu: a). tujuan, b). cara penggunaan sumber-sumber pengaruh. c). hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh.

Sedangkan menurut Soekanto (2002: 296) mengemukakan, bahwa unsur-unsur pokok dari kekuasaan adalah:

a). Rasa takut

Perasaan takut pada seseorang menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kauan dan tindakan orang

yang diakui tadi. Rasa takut merupakan perasaan negative, karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Orang yang mempunyai rasa takut akan berbuat segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang ditakutinya, agar terhindar dari kesukaran-kesukaran yang akan menimpa dirinya, seandainya dia tidak patuh. Rasa takut juga menyebabkan orang yang bersangkutan meniru tindakan-tindakan orang yang ditakutinya. Gejala ini yang dinamakan *matched dependent behavior*. Gejala mana tak mempunyai tujuan konkrit bagi yang melakukannya. Rasa takut merupakan gejala universal yang terdapat di mana-mana dan biasanya dipergunakan sebaik-baiknya dalam masyarakat yang mempunyai pemerintahan otoriter.

b). Rasa cinta

Rasa cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang pada umumnya positif, untuk menyenangkan semua pihak. Artinya ada titik-titik pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Rasa cinta biasanya telah mendarah daging (*internalized*) dalam diri seseorang atau sekelompok orang. Rasa cinta yang efisien seharusnya dimulai dari pihak penguasa. Apabila ada suatu reaksi positif dari masyarakat yang dikuasai maka system kekuasaan akan dapat berjalan dengan baik dan teratur.

c. Kepercayaan

Kepercayaan dapat lahir dari hubungan secara langsung antara dua orang atau lebih yang bersifat asosiatif. Misalnya, B sebagai orang yang dikuasai mengadakan hubungan langsung dengan A sebagai pemegang kekuasaan. B percaya sepenuhnya kepada A, kalau A akan selalu bertindak dan berlaku baik. Dengan demikian maka setiap keinginan A akan selalu dilaksanakan oleh B. kemungkinan sekali bahwa

B sama sekali tidak mengetahui kegunaan tindakan-tindakannya itu.

d. Pemujaan

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa kekuasaan mempunyai dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu interaksi dan pengaruh. Maksudnya, bahwa kekuasaan hanya akan ada bila terdapat interaksi antara individu dengan individu yang lain ataupun kelompok yang satu dengan yang lainnya, dan terdapat pihak yang menginginkan adanya pengaruh (efek) pada pihak lain dari sesuatu yang telah direncanakan. Untuk mendukung adanya pengaruh dari kekuasaan, maka harus ada mekanisme control atau pengendali efek yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mengontrol perilaku pihak lain.

Ke empat unsur tersebut merupakan sarana yang biasanya digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kekuasaan yang ada ditangannya. Apabila seseorang hendak menjalankan kekuasaan, biasanya dilakukan secara langsung tanpa perantara. Keadaan semacam itu pada umumnya dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat kecil dan persahaja, dimana para warganya saling mengenal dan belum dikenal adanya diferensiasi.

Kekuasaan di dalam masyarakat, biasanya pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran tertentu, antara lain yaitu:

a). Saluran Militer

Saluran militer, merupakan saluran yang paling sering dipergunakan para penguasaan di dalam mempertahankan kekuasaannya. Dengan saluran militer para penguasaan bisa melakukan paksaan serta kekuatan militer di dalam melaksanakan kekuasaannya. Tujuan utama adalah untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat, sehingga

mereka tunduk kepada kemauan penguasa atau sekelompok orang yang dianggap sebagai penguasa. Keperluan tersebut, seringkali dibentuk organisasi-organisasi atau pasukan-pasukan khusus yang bertindak sebagai dinas rahasia. Hal ini banyak dijumpai pada Negara-negara otoriter.

b). Saluran ekonomi

Melalui saluran ekonomi, penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat. Dengan cara menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut, penguasa melaksanakan peraturan-peraturannya serta akan menyalurkan perintah-perintahnya dengan melaksanakan saksi-saksi yang tertentu.

c). Saluran Politik

Melalui saluran politik, penguasa dan pemerintah berusaha untuk membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh masyarakatnya. caranya, antara lain, dengan meyakinkan atau memaksa masyarakat untuk mentaati peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan yang berwenang dan yang sah.

d). Saluran Tradisi

Sebuah tradisi dapat menjadi saluran kekuasaan yang paling sering digunakan dan paling disukai oleh penguasa. Melalui tradisi, pemegang kekuasaan dapat mempertahankan serta memperlancar kekuasaannya.

Saluran tradisi dalam memperlancar kekuasaan dipergunakan para penguasa dengan cara menguji tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam masyarakat, yang sudah meresap di dalam jiwa masyarakat yang bersangkutan. Dengan cara demikian, diharapkan akan dapat diketemukan suatu titik temu antara tradisi-tradisi tersebut,

sehingga pemerintahan akan dapat berjalan dengan lancar, yang berarti mencegah atau mengatasi reaksi negatif.

e) Saluran Ideologi

Para penguasa dalam masyarakat, biasanya mengemukakan serangkaian ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin, yang bertujuan untuk menerangkan sekaligus memberi dasar pembenaran bagi pelaksanaan kekuasaannya. Hal ini dilakukan supaya kekuasaan dapat menjelma menjadi wewenang (Soekanto, 2002: 302). Setiap penguasa berusaha untuk menerangkan ideologinya tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga *institutionalized* dan bahkan *internalized* dalam diri warga masyarakat.

Selain saluran-saluran di atas, terdapat pula yang dapat digunakan penguasa, misalnya alat-alat komunikasi massar surat kabar, radio, televisi dna lain-lainnya. Kecuali itu dapat pula dipergunakan saluran rekreasi yang biasa digunakan masyarakat mengisi waktu senggangnya, seperti sandiwara rakyat.

Lebih lanjut dikemukakan, bahwa ciri hubungan kekuasaan adalah:

- 1). Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia
- 2). Pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain
- 3). Pemegang kekuasaan dapat seorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah (negara dalam hubungan luar negeri);
- 4). Sasaran kekuasaan (yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau pemerintah.
- 5). Suatu pihak yang memiliki sumber belum tentu mempunyai kekuasaan secara efektif.
- 6). Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, consensus, atau kombinasi keduanya;

- 7). Hal ini bergantung pada perspektif moral yang digunakan, yakni apakah tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk;
- 8). Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga hanya menguntungkan kelompok kecil masyarakat. Hal itu tergantung pada ada atau tidaknya distribusi kekuasaan yang relatif merata dalam masyarakat tersebut.
- 9). Pada umumnya kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan dan dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung digunakan untuk sebagian kecil masyarakat.
- 10). Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik.

Dibagian lain, Syarbaini dkk. (2002) mengatakan, bahwa keberadaan kekuasaan tergantung pada sifat hubungan antara yang berkuasa (pemimpin) dengan yang dipimpin. Ada pemimpin dalam satu bidang tertentu dan ada pemimpin dalam banyak segi kehidupan. Ada pemimpin yang mencari pengikutnya dan ada justru dicari pengikutnya. Ada pemimpin resmi (*formal leader*) dan ada pemimpin tidak resmi.

Sosiologi mengakui adanya unsur kekuasaan sebagai bagian penolong dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi tidak menilai baik dan buruknya kekuasaan karena ukurannya dari kegunaan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh masyarakat. Adanya kekuasaan cenderung tergantung pada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendaknya. Bila kekuasaan itu melembaga dan diakui masyarakatnya disebut wewenang (*authority*), kekuasaan mempunyai aneka bentuk serta sumber yang berbeda-beda. Misalnya hak milik

kebendaan, kedudukan sosial, birokrasi dan intelektualitas. Namun kekuasaan tertinggi adalah penjelmaan organisasi sosialnya, yakni Negara. (Syarbaini dkk, 2002:48).

Negara yang merdeka akan kedaulatan (*sovereignty*), di mana kekuasaannya dibagi-bagikan kepada aparatnya. Syarbaini dkk. (2002) mengatakan, bahwa kekuasaan tersebut berfungsi baik jika didukung oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap pemimpin harus dan selalu menanamkan kekuasaannya melalui pendekatan ideologi, kepercayaan, emosi dan perasaan, dan kesadaran cita-cita bersama. Namun kekuasaan tertinggi (kedaulatan) biasanya hanya dilaksanakan oleh segolongan kecil rakyat yang menamakan dirinya *the ruling class*.

3. Tipe-tipe kekuasaan

Tipe-tipe kekuasaan sangat penting untuk diketahui. Hal ini dapat digunakan untuk melihat kekuasaan yang berkembang di masyarakat. Menurut Weber (dalam Carter, 1985:56), tipe-tipe kekuasaan dapat dibagi dalam tiga tipe, yaitu:

- a). Kekuasaan tradisional. Kekuasaan tipe tradisional. Kekuasaan tipe tradisional adalah orde sosial yang bersandar pada kebiasaan kuno dimana status dan hak para pemimpin juga ditentukan oleh adapt kebiasaan;
- b). Kekuasaan rasional-legal. Kekuasaan tipe legal-rasional, yaitu bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Tingkah laku patuh sebagai modal terbangunnya orde sosial ini diperjelas oleh analisis ini diperjelas oleh analisisnya tentang rasionalitas tindakan manusia. Sedangkan kekuasaan tipe rasionalitas oleh Weber

dipecah lagi menjadi empat rasionalitas, yaitu: (1) rasional-tujuan atau *zwekrational*, yaitu tindakan manusia yang meliputi perhitungan yang tepat dan pengambilan sarana yang paling efektif untuk tujuan yang dipilih dan dipertimbangkan dengan jelas kemungkinan efeknya; (2) rasional-nilai, yaitu tindakan manusia dengan menggunakan nilai sebagai ukuran seleksi dan penilaian tindakan; (3) tipe tindakan afektif atau emosional, yaitu tindakan yang berada dibawah dominasi langsung perasaan. Tindakan jenis ini sama sekali emosional dan karenanya tidak rasional; (4) tindakan manusia yang bersifat tradisonal, yaitu meliputi tindakan berdasarkan kebiasaan yang muncul dari praktik yang telah ada.

- c). Kekuasaan kharismatik. Tipe kekuasaan kharismatik. Adalah tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bantukannya (Ranoh 1999:53). Orde sosial terbentuk bukan karena tradisi ataupun legalitas, melainkan karena charisma penguasa.

B. Pengertian Wewenang

Dalam bahasa sehari-hari seringkali antara wewenang dan kekuasaan dikacaukan satu sama lain. Tetapi para ahli ilmu-sosial (khususnya sosiologi) merasa perlu membedakannya secara tajam kedua konsep tersebut. Kenyataannya, ada orang yang sebenarnya tidak mempunyai wewenang tetapi mempunyai kekuasaan yang besar, sebaliknya ada seseorang yang secara resmi mempunyai wewenang tetapi tidak mempunyai kekuasaan yang nyata.

Supaya lebih jelas mengenai makna kewenangan, berikut ini dikemukakan oleh pendapat para ahli mengenai kewenangan tersebut.

1. Syarbaini (2002:52) mengatakan, bahwa wewenang adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*). Dalam hubungannya dengan politik, kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik.
2. Surbakti (1999) menyebutkan, prinsip moral bersifat lebih spesifik daripada nilai-nilai umum yang terwujud dalam hukum tertulis maupun tradisi atau hal lain yang dianggap baik, yang tidak tertulis. Prinsip moral akan menentukan siapa yang berhak memerintah (berwenang membuat dan melaksanakan kewenangan politik) serta akan mengatur cara dan prosedur melaksanakan kewenangan politik. Setiap Negara mempunyai tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai, inilah yang disebut sebagai nilai. Sedangkan kegiatan untuk mencapai tujuan disebut tugas dan hak untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan disebut kewenangan. Oleh karena itu, nilai dan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan mempengaruhi pelaksanaan kewenangan politik.
3. Max Weber mendefinisikan wewenang sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Selanjutnya, weber membagi wewenang menjadi tiga bentuk.
 - a. Wewenang kharismatik, yaitu wewenang yang dimiliki oleh seseorang karena charisma kepribadiannya. Wewenang ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat

berubah. Jenis wewenang ini banyak dijumpai pada masyarakat pedalaman, terutama pada masa proses perubahan sosial.

- b. Wewenang tradisional, yaitu wewenang yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan. Wewenang jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman bagi warga.
- c. Wewenang rasional, yaitu wewenang yang berlandaskan sistem yang berlaku. Dalam masyarakat yang demokratis, kedudukan wewenang berupa sistem berokrasi dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut. (Soekanto, 2002).

Dalam rangka untuk menjamin pelaksanaan wewenang, diperlukan sistem penghubung antara penguasa dan warganya. Alat penghubung ini oleh Syarbaini (2002:53) disebut dngan biokrasi, yaitu organisasi yang bersifat hierarkis (bertingkat) secara rasional. Pada dasarnya, birokrasi bertujuan agar pelaksanaan kekuasaan secara administrative lebih lancer dan sesuai dengan kehendak penguasa dan rakyat.

Lebih lanjut, Syarbaini memberikan ciri-ciri dan cara terlaksananya suatu birokrasi seperti berikut:

1. Adanya ketentuan yang tegas dan resmi mengenai wewenang yang didasarkan kepada peraturan umum, yaitu ketentuan hukum dan administrasi.
2. Prinsip pertingkatan (*hierarchy*) dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahannya, di mana tedapat pengawasan terhadap bawahan.

3. Ketatalaksanaan suatu birokrasi yang modern didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis (*files*) yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya.
4. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.
5. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksananya.

1. Peralihan kewenangan

Peralihan kewenangan dari seseorang kepada orang lain atau kelompok lain merupakan keharusan. Paul Conn (1971:278) mengatakan, bahwa terdapat tiga cara peralihan kewenangan, yaitu:

- a. secara turun temurun. Kewenangan turun temurun adalah jabatan dan kewenangan yang dialihkan kepada keturunan atau keluarga pemegang jabatan terdahulu. Umumnya terjadi pada system politik otokrasi tradisional, seperti kerajaan atau kesultanan.
- b. pemilihan. Peralihan kewenangan dengan pilihan dapat dilakukan secara langsung melalui badan perwakilan rakyat. Hal ini terjadi pada system politik demokratis.
- c. Paksaan. Peralihan kewenangan secara paksaan adalah jabatan kewenangan terpaksa dialihkan kepada orang lain atau kelompok lain tidak menurut prosedur yang disepakati, melainkan dengan menggunakan kekerasan, seperti revolusi atau kudeta dan ancaman kekerasan

2. Sikap Terhadap Kewenangan

Pejabat dapat mengklaim hak memerintah dengan menunjukkan dasar kewenangan yang bersifat procedural maupun

substansial, namun anggota masyarakat yang diperintahkan memiliki sikap-sikap tertentu terhadap kewenangan. Sikap masyarakat terhadap kewenangan ini dapat berbentuk menerima, mempertanyakan atau kombinasi keduanya.

C. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas orang lain atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dalam situasi apapun di mana seseorang berusaha mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok, maka saat itu berlangsung kegiatan kepemimpinan. Orang yang dipengaruhi tidak saja terbatas pada bawahan. Tetapi juga atasan, rekan sejawat, atau sanak keluarga.

Menurut Margono Slamet (1998) kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang banyak agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian yang dirumuskan oleh Margono Slamet ini cenderung cocok digunakan dalam pengertian kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi. Seorang pimpinan berusaha membimbing, memberi pengarahan, mempengaruhi perasaan dan perilaku orang lain, serta menggerakkan orang lain itu untuk keperluan menuju sasaran yang diinginkan bersama.

Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam kegiatannya. Pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan sekelompok orang. Pemimpin mempunyai definisi yang berbeda dengan istilah manajer dan bos. Manajer (pengelola) hanyalah seseorang yang menangani sumber daya manusia, sarana, dan dana untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bos adalah seseorang yang mengawasi dan memberi perintah kepada para pekerja bawahannya, tetapi tidak memberi petunjuk.

1. Syarat dan Sifat Pemimpin

Menurut Margono Slamet (1998), seorang pimpinan harus mempunyai beberapa syarat dan sifat, yaitu:

- a). Mempunyai Visi yang jelas. Seorang pemimpin harus mempunyai visi yang jelas tentang lembaga atau organisasi yang dipimpinnya dan harus mampu mengkomunikasikan visi itu kepada semua orang yang dipimpinnya serta masyarakat umum. Dalam menjalankan tugas sehari-hari pemimpin harus mampu mempertahankan kelompoknya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai visi.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, cita-cita, idaman atau impian. Pemimpin harus membimbing sejawatnya menjabarkan visi itu menjadi program kerja yang berkesinambungan.

- b). Mempunyai kemampuan untuk bekerja keras. Seorang pemimpin harus mampu bekerja keras. Untuk bekerja keras seorang pemimpin harus memiliki jiwa yang sehat, raga yang prima, kemauan keras, kreatif, dinamis dan penuh motivasi.
- c). Mempunyai ketekunan. Pemimpin harus menunjukkan antusiasme yang tinggi dan bekerja keras dengan tekun, cerdas, terampil, tabah, teguh pada sikap dan pendirian, serta berani dalam menghadapi resiko, dan sabar dalam menegakkan kebenaran.
- d). Mempunyai disiplin baja. Pemimpin harus mempunyai disiplin yang kuat yang menjadi teladan bagi orang-orang yang dipimpin, memahami semua peraturan dan ketekunan yang berlaku, mematuhi serta menjalankan secara konsisten, teratur, tertib, cermat, dan tegas.
- e). Mempunyai sifat kepelayanan. Pemimpin harus sadar bahwa pada dasarnya tugasnya adalah melayani berbagai kelompok yang menjadi kliennya oleh karena itu dia harus memiliki ciri-

ciri kepelayanan yang baik yaitu: peduli (*care*), ramah dan sopan (*courtesy*), penuh perhatian (*concern*), sikap bersahabat (*friendliness*), seia membantu (*helpfulness*), rendah hati (*modest*), sabar (*patient*), bijaksana (*wise*), dan dekat dengan bawahan/ rakyat/ pelanggan (*closeness*).

- f). Mempunyai sifat yang tenang dalam mengambil keputusan. Pemimpin mempunyai sikap yang tenang dalam suatu kerumitan sehingga bawahan/rakyat tidak bersikap reaktif, emosional, dan cemas, sehingga bawahan ikut tenang. Ketenangan merupakan modal dasar untuk mengambil keputusan yang tidak ergesa-gesa dan tepat.
- g). Memberdayakan orang lain. Pemimpin mempunyai kemampuan mengembangkan pemikiran dan tindakan kepemimpinan dalam organisasi atau tim, menyebarkan tanggung-jawab dan penghargaan terhadap tugas yang telah dikerjakan. Oleh karena itu pemimpin harus dapat berbagi tanggung-jawab, melakukan desentralisasi kewenangan atau kekuasaan, menyilahkan orang-orang lain memecahkan untuk menunggu yang lain berkembang.
- h). Mempunyai pengaruh pada orang lain. Pemimpin mengilhami orang lain pada misi yang ada dan menularkan semangat dan energi yang tak kenal surut.
- i). Komunikasi. Pemimpin mempunyai kemampuan menyalurkan ide menjadi tindakan seperti bersikap sederhana tetapi tidak menyederhanakan persoalan, mendengar pendapat pribadi orang dan kelompok, menyerap (tanggap) pesan dari setiap pengamatan, dan bersikap peduli serta menghargai orang lain.

2. Gaya-Gaya Kepemimpinan

Weber mengidentifikasi tiga bentuk kepemimpinan dalam kaitannya dengan sumber-sumber otoritas, kewenangan dan

legitimasi pemimpin, yaitu: kepemimpinan tradisional, kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan legal rasional (Johnson, 1994: 227). Ketiga bentuk kepemimpinan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepemimpinan Tradisional

Berdasarkan pada kepercayaan yang telah mapan, kedudukan pemimpin ditentukan oleh kebiasaan kelompok masyarakat dalam melakukan tradisi-tradisi tersebut. yang dimaksud dengan tradisi disini adalah suatu sistem koordinasi yang bersifat mengikat dan menyatakan sah berlakunya, dipercaya atas dasar kesucian dari tatanan sosial serta senantiasa ada sangsi yang dibebankan seperti yang pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Hubungan antar tokoh yang memiliki otoritas (kepemimpinan) dengan bawahannya (pengikut) pada dasarnya adalah hubungan pribadi. Meskipun pemimpin dan bawahan sangat terkait dengan aturan-aturan tradisional, tetapi masih ada keleluasaan bagi pemimpin serta pribadi untuk menggunakan otoritasnya, sehingga dalam keadaan seperti itu bawahan terpaksa taat harus taat. Weber membedakan tiga otoritas tradisional, yaitu: (a) *gerontokrasi*, yakni otoritas pengawasan yang ada pada tanaga orang-orang tua dalam suatu kelompok; (b) *Patriarkalisme*, yakni otoritas pengawasan yang berada tangan satuan kekerabatan (rumah tangga) yang dipandang oleh seorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan dan (c) *patrimonial*, yakni sistem otoritas yang didalamnya terdapat staf administratif terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengan pememimpinnya.

b. Kepemimpinan kharismatik

Didasarkan pada kualitas luar biasa yang dimiliki seorang pemimpin sebagai pribadi. Istilah itu digunakan Weber

untuk menggambarkan pemimpin–pemimpin agama yang berkharismatik di mana dasar kepemimpinan mereka adalah kepercayaan bahwa mereka memiliki suatu mutu tertentu yang terdapat pada kepribadian seseorang, yang karenanya dia terpisah dari orang kebanyakan dan dia perlakukan sebagai orang yang dianugerahkan kekuasaan atau mutu yang bersifat *adil dunia*, luar biasa, atau sekurang-kurangnya merupakan kecualian dalam hal-hal tertentu. Bagi pengikut yang dibimbing oleh pemimpin kharismatik ini sering bersifat tidak stabil, mudah berubah-ubah, karena memang peran pemimpin kharismatik sangat individualisme. Antara pemimpin dan pengikut biasanya menciptakan hubungan yang sangat erat, hubungan seperti keluarga, begitu juga hubungan seperti perilaku bagi sesama pengikut dalam komunitas kepemimpinan kharismatik tersebut. Karena kepemimpinan yang khas pribadi, maka sikap dan tingkah lakunya sulit ditebak dan berubah-ubah. Oleh karena itu pemimpin kharismatik merupakan ancaman bagi ritunitas dan tatanan yang sudah dianggap mapan, begitu juga merupakan gangguan bagi bentuk kepemimpinan yang bersifat legal rasional.

c. Kepemimpinan Legal Rasional

Kepemimpinan legal rasional adalah kepemimpinan yang didasarkan pada sejumlah peraturan yang telah disahkan dahulu dan bersifat mengikat. Mereka yang menjadi pemimpin diangkat berdasarkan tata aturan tertentu dan ketika memimpin pun juga harus berpijak pada landasan aturan-aturan tertentu yang telah ditetapkan. Iklim kepatuhan atau ketaatan pengikut terhadap pemimpin terletak pada rumusan aturan formal, bukan bersifat hubungan pribadi. Dengan kata lain, posisi pemimpin dan pengikut serta hubungan antara keduanya bukan

ditentukan oleh posisi subyeknya, tetapi ditentukan oleh aturan-aturan yang sah dan berlaku dalam kepemimpinan legal rasional tersebut. Kedudukan bawahan (pengikut) kepada pemimpin lebih disebabkan karena posisi sosial yang mereka miliki itu didefinisikan menurut peraturan sebagai pihak yang harus tunduk dalam bidang-bitang tertentu (Johnson, 1994: 231).

d. Kepemimpinan Tradisional

Kepemimpinan tradisional, kepatuhan diberikan kepada orang atau pemimpin yang menduduki kekuasaan tradisional, yang terikat pula dalam suasana terbatas.

Dalam hal kewajiban, seseorang menjalankan fungsi kepemimpinan ditetapkan sesuai dengan aturan yang bersumber kepada tradisi. Pengikut patuh kepada pimpinan tidak didasarkan pada tatanan impersonal, tetapi menjadi loyalitas pribadi dalam ruang lingkup dengan membiasakan tunduk pada kewajiban. Tradisi yang dimaksudkan di sini adalah suatu sistem koordinasi yang bersifat mengikat dan dinyatakan sah berlakunya, dipercaya atas dasar kesucian dari tatanan sosial serta senantiasa ada sanksi yang dibebankan, seperti yang pernah terjadi pada masa-masa silam.

BAB XI

SISTEM SOSIAL

A. Pengertian Sistem Sosial

Kata sistem mengandung pengertian sebagai kumpulan dari berbagai unsur (komponen) yang saling bergantung antara satu dengan lainnya dalam satu kesatuan yang utuh. Sistem juga dapat diartikan sebagai jaringan yang terdiri dari banyak simpul, antara simpul yang satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan dan sulit untuk dipisahkan.

Sistem sosial dapat diartikan sebagai serangkaian bagian-bagian yang saling berhubungan, bekerja dengan bebas dan bersama-sama dalam mencapai tujuan keseluruhan dalam lingkungan yang kompleks. Menurut Shrode dan Voich (1974: 122) sistem sosial adalah: *“a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objective of the whole, with in a complex environment”*. Dalam pengertian seperti ini, sistem memiliki konotasi penting, antara lain: *pertama*, menunjuk pada suatu benda (entitas) atau benda yang memiliki tata aturan atau susunan struktural dari bagian-bagiannya. Seperti, sekolah, lembaga pemerintah, lembaga politik, lembaga ekonomi, dan lembaga keagamaan. *Kedua*, menunjukkan pada suatu rencana, metode, alat, atau tata cara dalam mencapai suatu (Amirin, 1986).

Sistem sosial adalah sejumlah kegiatan atau sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal-balik relatif konstan. Menurut Bertrand (1980), bahwa dalam sistem sosial, paling tidak harus memiliki tiga pokok, yaitu: 1) dalam setiap sistem sosial ada sejumlah orang dan kegiatan, 2) orang atau kegiatan itu berhubungan secara timbal-balik, 3) hubungan yang bersifat timbal-balik bersifat konstan.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa sistem sosial merupakan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian (*elemen atau komponen*) yang terdiri dari: a) orang atau kelompok orang beserta kegiatannya, dan b). hubungan sosial, termasuk didalamnya norma-norma, dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara orang atau kelompok orang tersebut.

Sistem sosial merupakan hasil kreasi manusia, dalam pengertian bahwa sistem sosial terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Sistem sosial dipertahankan keberadaannya oleh manusia. Dalam perjalanan sejarah sistem sosial dapat berubah baik disengaja maupun tidak oleh manusia.

Sistem sosial mempengaruhi perilaku seseorang, karena dalam sistem sosial termuat nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat. Ada beberapa hal yang membuat manusia menciptakan sistem sosial, antara lain karena:

1. manusia mempunyai kebutuhan dasar biologi tertentu seperti pangan, sandang, dan seks.
2. untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia tergantung pada organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti organisasi ekonomi, organisasi politik, organisasi agama, organisasi hukum, dan organisasi pendidikan.
3. kenyataan di atas menciptakan kebutuhan-kebutuhan lain yaitu kebutuhan akan, norma dan nilai pada diri individu.
4. yang pada akhirnya manusia berusaha memenuhi kebutuhan dirinya secara maksimal.

Sistem sosial di buat oleh manusia berdasarkan beberapa faktor, seperti atas dasar kekerabatan, tempat tinggal, tempat kerja, keagamaan, aktivitas ekonomi, kecenderungan politik, dan lainnya. Sistem sosial atas dasar kekerabatan, misalnya dapat dilihat bentuknya dalam keluarga-keluarga besar yang menghimpun

keturunan orang-orang tertentu, misalnya keluarga besar presiden, keluarga besar pengusaha sukses dan lain-lainnya.

Sistem sosial yang didasarkan pada tempat tinggal antara lain RT, RW, pedukuhan, dusun dan desa. Sedangkan sistem sosial berdasarkan tempat kerja seperti, kelompok dosen, kelompok pegawai, kelompok pengajian, dan beberapa organisasi keagamaan merupakan pengejawantahan dari sistem sosial atas dasar keagamaan.

B. Sistem Sosial dalam Sosiologi

Sosiologi pada hakikatnya mempelajari manusia di dalam kehidupan kelompoknya, atau dengan perkataan lain di dalam kehidupan sosialnya. Mempelajari kehidupan maupun interaksi sosial berarti mempelajari sistem sosial. Kehidupan sosial itu sendiri adalah suatu sistem.

Ciri penting dari sebuah sistem, antara lain dapat diketahui dari:

1. sistem terdiri dari subsistem
2. mempunyai tujuan dan sasaran
3. di antara subsistem mempunyai hubungan saling tergantung dan merupakan suatu kebulatan yang utuh.
4. mempunyai kemampuan mengatur dan menyesuaikan diri sendiri; mempunyai batas (*boundaries*) dengan lingkungannya. Batas ini tidak berarti sistem tersebut tertutup dari pengaruh luar, melainkan untuk menunjukkan keberadaannya di antara lingkungan.

Dalam realita kehidupan masyarakat, sistem sosial dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem sosial masyarakat tradisional dan sistem sosial masyarakat modern.

Menurut Rogers dan Schoemaker (1987), ciri-ciri sistem sosial tradisional adalah:

1. kurang berorientasi pada perubahan;
2. kurang maju dalam teknologi atau masih sederhana;
3. relatif rendah kemelekakan-hurufnya (tingkat buta hurufnya tinggi)
4. sedikit sekali komunikasi yang dilakukan oleh anggota sistem dengan pihak luar.
5. kurang mampu menempatkan diri atau melihat dirinya dalam peranan orang lain, terutama peranan orang luar sistem.

Sebaliknya sistem sosial modern menurut Rogers dan Schoemaker mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. pada umumnya mempunyai sikap positif terhadap perubahan;
- b. teknologinya sudah maju dengan sistem pembagian kerja yang kompleks;
- c. pendidikan dan ilmu pengetahuan dinilai tinggi;
- d. hubungan sosial lebih bersifat rasional dari pada emosional;
- e. pandangan kosmopolitan, karena anggota sistem sering berhubungan dengan orang luar, mudah memasukkan ide baru ke dalam sistem sosial;
- f. anggota sistem sosial mampu berempati, dapat menghayati peranan orang lain yang betul-betul berbeda dengan sendirinya.

Secara umum, sistem sosial modern dicirikan oleh kemampuan sistem sosial itu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Oleh karena itu kita sering menyebut tradisional atau kolot, sebenarnya yang dimaksud adalah kelambanannya untuk

berubah. Orang-orang yang fleksibel dengan perubahan-perubahan disekitarnya disebut modern.

C. Komponen-Komponen Sistem Sosial

Memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial berarti kita melihat masyarakat sebagai sebuah kesatuan yang memiliki karakteristik seperti sebuah sistem. Sistem sosial yang ada pada masyarakat bukanlah sebuah sistem yang bersifat empiris. Sifatnya yang tidak empiris itulah, maka komponen-komponen yang terdapat di dalam sistem sosial juga tidak dapat dilihat dan diamati. Perlu disadari bahwa sistem sosial tidak lain adalah suatu sistem yang bersifat konseptual, yang berarti keberadaannya hanya dapat dimengerti melalui sarana berpikir dan bukan melalui sarana panca indra. Dengan demikian, komponen-komponen sistem sosial tidaklah mempunyai perwujudan fisik, tetapi dapat dibayangkan sebagai suatu konstruksi berpikir. Jika demikian, apakah yang menjadi komponen-komponen sistem sosial itu?

Secara umum komponen-komponen dari sistem sosial adalah terdiri dari status, peran dan perbedaan sosial; akan tetapi sesungguhnya secara lebih luas, sesungguhnya banyak sekali komponen yang terkandung dalam pengertian sistem sosial. Menurut Alvin L. Bertrand (1980) ada sepuluh unsur sistem sosial itu, yang terkandung di dalam sistem sosial, yaitu: keyakinan, perasaan, tujuan, sasaran (*sentiment*), norma, status dan peranan, tingkatan atau pangkat, kekuasaan dan pengaruh, sanksi, sarana atau fasilitas, dan tekanan ketegangan (*stress-strain*).

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang bersifat konseptual yang dianggap sebagai komponen sistem sosial adalah peran-peran sosial. Meskipun yang dianggap sebagai komponen dari sistem sosial adalah peran-peran sosial, namun di dalam kenyataannya yang memegang peran-peran sosial tersebut adalah

manusia-manusia juga. Manusia-manusialah yang menjadi pemain peran-peran sosial tersebut. Yang dimaksud dengan peran di sini adalah tingkah yang diharapkan atau tingkah laku normatif yang melekat pada status sosial seseorang. Misalnya, Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali adalah manusia-manusia yang berperan sebagai dosen di perguruan tinggi, maka ketika Pak Munir, Pak Fatur dan Pak Ali, berada di rumahnya tidak lagi berperan sebagai dosen, melainkan berperan sebagai suami dari istrinya dan bapak bagi anak-anaknya. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa manusia-manusia itu hanyalah pengisi, pemain atau pelaksana fungsi dari sistem sosial yang dapat berganti dari waktu ke waktu. Sedangkan komponen sistem sosial, yaitu peran sosial, akan tetap keberadaannya, meskipun manusia berganti atau mati misalnya. Peran dosen akan tetap ada sebagai komponen sistem sosial, meskipun manusia-manusia yang memegang peran sebagai dosen di perguruan tinggi misalnya Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali—dari tahun ke tahun telah berganti, karena sebagian dosen di perguruan tinggi tersebut telah memasuki purnabakti atau pensiunan.

Sebagai komponen dari sistem sosial, peran-peran sosial itu saling berhubungan secara timbal-balik dan saling tergantung membentuk satu kesatuan kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi sebagai sebuah sistem sosial dianggap yang dianggap komponennya, bukan Pak Munir, Pak Fatur, dan Pak Ali, tetapi peran-peran sebagai dosen, pegawai, kantor, mahasiswa, ini saling berhubungan dengan satu sama lain dan saling tergantung membentuk suatu kesatuan kehidupan di kampus untuk mencapai suatu tujuan, yaitu melakukan proses perkuliahan dan menghasilkan lulusan sarjana yang baik (Narwoko dan Suyanto, 2006: 128).

D. Fungsi-Fungsi Sistem Sosial

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, terdiri dari beberapa subsistem. Menurut Talcott Parsons, ada 4 (empat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: fungsi untuk mempertahankan dan atau pemeliharaan pola dan struktur masyarakat (*latent pattern maintenance*), fungsi integrasi (*integration*), fungsi pencapaian (*goal attainment*), Fungsi adaptasi (*adaptation*).

1. Fungsi mempertahankan dan atau pemelihara pola dan struktur masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem cultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitas tertinggi. Menurut Parsons, disebut pula bahwa fungsi ini sebagai fungsi latency, yakni fungsi suatu sistem menampilkan kualitas kebutuhan, keahlian dan kualitas lainnya yang tepat guna, sehingga memungkinkan konflik dan ketegangan internal tidak sampai berkembang ke tingkat yang merusak keutuhan sistem.
2. Fungsi integrasi (*integration*). Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya berkaitan dengan kontribusi unit-unit terhadap keseluruhan sistem.
3. Fungsi pencapaian tujuan (*Goal attainment*). Fungsi ini mengatur hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam bentuk penyusunan skala dari segala tujuan yang hendak dicapai dan penentuan bagaimana suatu sistem memobilisasi sumber daya serta tenaga yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Fungsi adaptasi (*adaptation*). Menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme tindakan dan dengan alam fosiko-organik. Secara umum fungsi ini menyangkut kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidupnya. Dalam pelaksanaan fungsi ini, teknologi sangat penting perannya.

Menurut Parsons, fungsi untuk mempertahankan dan pemeliharaan pola dan struktur masyarakat akan dilaksanakan oleh subsistem budaya, fungsi integrasi akan dilaksanakan oleh subsistem hukum, fungsi pencapaian tujuan akan dilaksanakan oleh subsistem politik, dan fungsi adaptasi tersebut akan dilaksanakan oleh subsistem ekonomi.

Subsistem-subsistem tersebut akan menjalankan fungsinya masing-masing. Subsistem ekonomi tersebut akan melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi, misalnya melaksanakan produksi dan distribusi barang dan atau jasa. Subsistem ini juga akan menghasilkan fasilitas-fasilitas atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem.

Sedangkan subsistem politik, akan melaksanakan fungsi distribusi kekuasaan dan juga memonopoli penggunaan unsur paksaan yang sah (*legalized power*). Subsistem ini akan bekerja untuk memaksimalkan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan kolektifnya. Sementara itu, subsistem hukum akan melaksanakan fungsi integrasi, misalnya dengan cara mempertahankan tata cara dan keterpaduan antara komponen-komponen sistem yang saling berbeda pendapat, pandangan dan kerangka moralitas untuk mendorong terbentuknya solidaritas sosial. Yang termasuk ke dalam subsistem ini adalah sistem hukum, kontrol sosial, kebiasaan dan norma-norma sosial.

Subsistem budaya akan menagani urusan pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku dalam proses

kehidupan bermasyarakat, terutama untuk tujuan kelestarian struktur masyarakat. Subsistem pemeliharaan pola ini akan memaksimalkan komitmen sosial, motivasi dan mengendalikan ketegangan-ketegangan perasaan-perasaan individu, sehingga mereka dapat melaksanakan dan berpartisipasi dengan baik dalam kehidupan sosial. Yang termasuk ke dalam subsistem budaya ini adalah keluarga, agama dan pendidikan.

Pada pokoknya subsistem mempertahankan dan pemeliharaan pola masyarakat akan berhubungan dengan aspek moralitas dari komponen-komponen di dalam sistem sosial. Keempat subsistem tersebut, masing-masing akan bekerja secara mandiri, tetapi saling tergantung satu sama lain untuk mewujudkan keutuhan dan kelestarian sistem sosial secara keseluruhan.

Robert M. Lawang (1999: 23) menyatakan, bahwa sistem sosial dapat menjamin kebutuhan orang-orang yang terlibat di dalamnya, apabila sistem sosial itu terbatas pada kelompok kecil. Berarti sistem sosial yang dapat menjamin kebutuhan orang banyak secara makro, masih cukup sulit dilaksanakan.

BAB XII

ORGANISASI SOSIAL

A. Pengertian Organisasi Sosial

Organisasi adalah institusi masyarakat yang dominasi di dalam kehidupan manusia. Seseorang mungkin dilahirkan di rumah sakit, dididik di sekolah formal, mencari nafkah dengan bekerja di suatu perusahaan, mengadakan kegiatan sosial dengan aktif di organisasi kemasyarakatan, mengikuti perkumpulan yang menyalurkan hobi tertentu, mengikuti salah satu partai politik, dan pada saat meninggalkan kematiannya di atur oleh organisasi tertentu. Institusi-institusi yang disebutkan di atas adalah sebuah organisasi. Jadi selama hidupnya, seorang manusia hidup di tengah-tengah organisasi dan menjadi bagian dari organisasi, oleh karena itu manusia mempunyai kepentingan untuk mempelajari organisasi.

Organisasi telah meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap hari orang hampir selalu berhubungan dengan berbagai organisasi dan sebagian besar waktunya dihabiskan dalam organisasi. Hanya masyarakat yang primitif dan terasing saja yang tidak mempunyai organisasi.

Di dalam kehidupan modern, organisasi dibentuk oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan akan pendidikan menyebabkan terbentuknya organisasi pendidikan, kebutuhan ekonomi memunculkan organisasi ekonomi, aktivitas hobi melahirkan organisasi yang mengatur pemenuhan hobi, kebutuhan akan kekuasaan menimbulkan kemunculan organisasi politik, begitu seterusnya.

Organisasi sosial dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Misalnya, organisasi keagamaan Muhammadiyah,

Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathan, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Lembaga Pendidikan, dan lain-lainnya.

Menurut Amitai Etzioni (1985), organisasi adalah unit sosial (atau pengelompokan manusia) yang disengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Lebih lanjut Amitai Etzioni (1985), menjelaskan, bahwa organisasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (a) adanya pembagian kerja, kekuasaan, dan tanggung jawab komunikasi, (b) ada satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi usaha-usaha organisasi serta mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan, (c) ada pergantian tenaga (kaderisasi) bila ada individu yang tak mampu menjalankan tugas-tugas organisasi.

Suatu organisasi sosial memiliki daftar anggota yang terinci. Perlu ditegaskan di sini bahwa keanggotaan dalam suatu organisasi biasanya melalui prosedur-prosedur resmi yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan masuknya seseorang dalam suatu organisasi, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasi.

Menurut Schein (1991) di dalam organisasi ada koordinasi, tujuan bersama, pembagian kerja, dan integrasi. Koordinasi muncul dari adanya kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya seorang diri, setelah beberapa orang mengkoordinir usaha bersama, maka mereka merasa lebih banyak berhasil dari pada kalau mereka melakukan sendiri-sendiri.

Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu (*boundaries*, dengan demikian seseorang yang mengadakan hubungan interaksi dengan pihak lain tidak atas kemauan sendiri, mereka dibatasi aturan-aturan tertentu. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur di dalamnya dan berisi wewenang,

tanggung jawab dan pembagian tugas untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu.

Sistem adalah satuan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Sesuatu dapat dinamakan sistem bila terjadi hubungan atau interrelasi dan independensi baik internal maupun eksternal antara sistem. Jadi organisasi adalah bentuk suatu sistem yang didalamnya mempunyai struktur yang berbeda antara satu organisasi dengan yang lainnya. Setiap organisasi mempunyai sistem yang berbeda yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pengorganisasian antara lain adalah membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen dan jabatan yang terinci, membagi-bagi tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan masing-masing jabatan, mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit, membangun hubungan dikalangan individu, kelompok dan departemen, menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi.

B. Pembentukan Organisasi Sosial

Dalam masyarakat modern di mana organisasi merupakan bagian kehidupan, pembentukan organisasi di mulai dari adanya kesamaan ide. Kemudian orang-orang yang mempunyai kesamaan ide itu menyusun seperangkat kegiatan yang teratur dan lambat laun terbentuklah organisasi, tentu saja ini ditandai dengan adanya suatu kesadaran dari orang-orang itu bahwa untuk mencapai ide yang terumuskan dalam tujuan harus dilakukan bersama-sama dengan cara pembagian tugas.

Pembentukan organisasi menurut Schein (1991), dimulai dari timbulnya ide dalam pikiran manusia untuk menggapai tujuan tertentu yang menjadi kebutuhan dirinya. Beberapa orang yang memiliki kesamaan ide tersebut kemudian mewujudkannya dalam bentuk seperangkat kegiatan yang mempunyai aturan-aturan tertentu dalam mencapai tujuan bersama menjadi tujuan organisasi. Bila organisasi itu berhasil dalam mencapai tujuan, lambat laun akan memperoleh pengikut.

Sementara itu, Ross (1967) dan Roggers (1983) diketahui bahwa organisasi dibentuk untuk menangani tugas-tugas atau pembagian tugas dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut kedua orang ini adanya tujuan bersama membutuhkan pembagian tugas-tugas, dan pembagian tugas-tugas ini diatur sedemikian rupa.

Bentuk dan struktur organisasi merupakan tempat yang memungkinkan bagi pengembangan aktivitas manusia dengan berbagai aturan yang diakui bersama. Dikatakan demikian, karena waktu, tempat dan keadaan tertentu dalam rangka memprediksi tujuannya, sudah ditetapkan secara jelas dan diupayakan, setidaknya setiap anggota memahami tujuan organisasinya itu. Dalam organisasi sosial, anggota-anggotanya terstruktur secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peranan-peranan yang bersifat formal; masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama.

C. Ciri-Ciri Organisasi Sosial

Dalam sebuah organisasi sosial tercermin suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Kondisi yang bersifat dinamis dan sekaligus bersifat struktural, dapat memastikan secara mutlak definisi organisasi sosial yang dapat diterapkan dalam berbagai bentuk perubahan hubungan masyarakat.

Pengertian organisasi yang lebih khusus adalah suatu sistem sosial yang bersifat langgeng, formal, memiliki identitas kolektif yang tegas, daftar anggotanya terinci, dan mempunyai sifat hirarkhis. Batasan ini menegaskan bahwa organisasi sosial merupakan sistem sosial. Oleh karena itu, konsep-konsep yang berhubungan dengan sistem sosial (struktur sosial, fungsi, dan integrasi) dapat digunakan untuk menganalisa organisasi.

Dalam realitasnya, organisasi sosial memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain yaitu:

1. Bersifat langgeng

Sifat langgeng organisasi mengandung pengertian bahwa waktu yang relatif lama organisasi itu ada atau eksis. Penduduk desa yang datang menonton film gratis di lapangan bukan organisasi sosial, karena mereka datang menonton dan pulang. Artinya keadaannya tidaklah langgeng atau berlangsung lama, kecuali hanya 2-3 jam saja. Kelangsungan hidup organisasi ditentukan oleh dinamika organisasi. Apabila organisasi sudah tidak dapat menjadi alat pemenuhan kebutuhan anggota, maka organisasi itu akan bubar atau berubah. Orientasi atau tujuan dari para anggota yang berubah bisa mengancam kontinuitas organisasi. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang belakangan ini mengalami penurunan kegiatan, menunjukkan indikasi bahwa orientasi tujuan dan kebutuhan mahasiswa saat ini berbeda dengan saat lahirnya organisasi-organisasi mahasiswa ekstra kampus tersebut.

2. Bersifat formal

Ciri organisasi yang kedua adalah bersifat formal. Organisasi-organisasi sosial adalah bentuk kelompok sosial formal dengan penambahan beberapa hal khusus. Secara definitif dapat diambil kesimpulan bahwa semua organisasi dapat ditelaah sebagai suatu kelompok sosial, tetapi tidak semua kelompok sosial dapat

disebut organisasi sosial. Organisasi sosial mempunyai perumusan-perumusan tertulis yang jelas, paling tidak dalam bentuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Perumusan-perumusan tertulis tersebut mencantumkan nama organisasi, kedudukan, tujuan, prosedur-prosedur penerimaan anggota, pendanaan organisasi dan sebagainya.

Sifat formal organisasi membuat individu yang terlibat didalamnya dituntut untuk dapat membedakan aktivitas-aktivitas diri mereka, kapan dia harus bertindak mengatasnamakan organisasi dan kapan pula bertindak mengatasnamakan organisasi dan kapan pula bertindak atas nama individu. Individu itu harus sadar akan tindakan yang dilakukan supaya tidak terjadi konflik peran dalam dirinya.

3. Memiliki identitas

Setiap organisasi memiliki identitas kolektif yang jelas. Kalau kita berbicara tentang identitas dalam hubungannya dengan organisasi, maka itu berarti harus ada sesuatu yang dapat menunjukkan mana yang termasuk organisasi dan mana yang tidak termasuk organisasi. Sesuatu itu adalah pengetahuan organisasi, tempat organisasi, keanggota organisasi, dan dapat pula kartu organisasi.

Seorang mahasiswa IAIN Mataram, tentu mempunyai Kartu Tanda Mahasiswa, jaket almamater warna biru, dan simbol-simbol yang menunjukkan bahwa ia bagian dari kampus hijau ini. Seorang anggota perpustakaan tentunya, ia memiliki kartu anggota perpustakaan.

Identitas organisasi dapat berbentuk fisik seperti kantor sampai menyangkut pola perilaku yang diharapkan dari para anggota organisasi. Seorang pegawai di sebuah perguruan tinggi diharapkan dapat melayani civitas akademika secara baik dan cepat.

Prinsipnya ada perilaku tertentu yang menjadi citra organisasi (kampus). Citra organisasi perguruan tinggi dijaga oleh semua komponen organisasi kampus.

Suatu organisasi sosial memiliki daftar anggota yang terinci. perlu ditegaskan di sini, bahwa keanggotaan dalam suatu organisasi biasanya melalui prosedur-prosedur resmi yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dengan masuknya seorang dalam suatu organisasi, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan yang ada dalam organisasi.

4. Sifat hirarkhi.

Suatu organisasi memiliki sifat hirarkhi, yaitu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Sifat hirarkhi menempatkan beberapa orang pada posisi lebih tinggi dari anggota lainnya. Peran mereka yang berbeda secara hirarkhis juga berbeda menyolok. Dengan sifat hirarkhi dalam organisasi, maka kita dapat mengenal struktur organisasi. Dalam struktur organisasi dapat diketahui dan digambarkan pola hubungan antar-unsur yang menyangkut kekuasaan serta wewenang.

Menurut Schein (1991) di dalam sebuah organisasi ada koordinasi, tujuan bersama, pembagian kerja, dan integrasi. Koordinasi muncul dari adanya kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya seorang diri, setelah beberapa orang mengkoordinir usaha bersama dari pada kalau mereka melakukan sendiri-sendiri.

D. Tipe-Tipe Organisasi Sosial

Dalam sebuah organisasi, memiliki tipe-tipe tersendiri. Adapun tipe-tipe organisasi sosial, antara lain yaitu:

1. Organisasi Normatif

Dalam tipe organisasi normatif, pihak elit menjalankan organisasi atau mengawasi anggota, lebih dominan menggunakan kekuasaan normatif (*persuasive*). Sedangkan bentuk partisipasi anggota dalam organisasi adalah partisipasi dengan komitmen moral. Partisipasi dengan komitmen moral merupakan partisipasi anggota yang sangat tinggi karena pada diri anggota terdapat nilai-nilai dan norma-norma organisasi yang sudah mendarah daging. Secara otomatis, anggota mempunyai tanggung jawab moral untuk menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma-norma organisasi.

Pemimpin-pemimpin organisasi normatif umumnya mempunyai kharisma di mata para anggota. Pemimpin organisasi yang kharismatik cenderung *paternalistic*. Pengikut organisasi dengan penuh kerelaan berperilaku sesuai dengan norma-norma organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, organisasi-organisasi keagamaan mempunyai kecenderungan bersifat yang besar untuk dikategorikan organisasi normatif.

2. Organisasi Utilitarian

Pihak elite mengawasi anggota dominan menggunakan kekuasaan utilitarian (*renumeratif*). Partisipasi anggota berdasarkan komitmen perhitungan (*calculative commitment*) yaitu suatu partisipasi yang didasarkan pada pemikiran yaitu suatu partisipasi yang didasarkan pada pemikiran hubungan bisnis, perhitungan ekonomi, atau sangat memperhitungkan untung rugi. Organisasi-organisasi ekonomi seperti perseroan, firma, dan konglomerat merupakan contoh organisasi yang cenderung bersifat utilitarian.

Kekuasaan utilitarian didasarkan pada kepemilikan aset-aset ekonomi, yaitu modal. Dalam konsep kekuasaan utilitarian aset ekonomi digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Pengikut organisasi ini bila merasa dirugikan akan mengurangi

partisipasinya. Misalnya, sekelompok buruh yang merasa dirugikan karena upah yang diterima di bawah patokan upah minimum akan melakukan pemogokan, unjuk rasa atau menurunkan produktivitasnya.

3. Organisasi koersi

Pihak elit sebagai penguasa lebih dominan menggunakan kekuasaan koersi dalam mengawasi anggotanya. Koersi adalah segala jenis paksaan, ancaman, dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Dalam organisasi koersi, partisipasi anggota bersifat keterasingan (*alention*), yaitu keterlibatan anggota terjadi karena diselimuti oleh unsur keterpaksaan, ketakutan, dan kadang-kadang kekecewaan. Organisasi-organisasi mafia di Italia, Triad di Hongkong, dan Yakuza di Jepang merupakan jenis organisasi koersi.

Berdasarkan hubungan antara pemimpin dengan anggota organisasi dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau anggota, Margono Slamet (1996) membagi tipe organisasi menjadi empat jenis, yaitu: *leader-oriented organization*, *patriarchal (leadership) organization*, *bureaucracy*, dan *democratic organization*. *Leader oriented organization* dicirikan oleh adanya putusan yang selalu dilakukan oleh pemimpin dan anggota diarahkan untuk memenuhi unsur kepatuhan dan pengabdian. *Partriarchal (leadership) organization* dicirikan adanya hubungan pimpinan-anggota seperti hubungan bapak dengan anak. Dalam hal ini si anak (pengikut) membutuhkan perlindungan dari si bapak (pemimpin). Ciri lain dari tipe organisasi yang kedua ini adalah pengambilan keputusan yang selalu memerlukan restu atau persetujuan pemimpin, meskipun keputusan dibuat oleh anggota. *Bureucracy* mempunyai ciri pengaturan yang sesuai dengan struktur, beroperasi sesuai dengan struktur, beroperasi sesuai seperangkat peraturan/ketentuan yang berlaku, dan keputusan dapat diambil tanpa

menghubungkan dengan pemimpin atau pemegang kekuasaan tertentu. Tipe organisasi yang terakhir yakni *democratic organization* dicirikan oleh adanya hak suara dari anggota, keputusan diambil secara bersama, pemimpin tunduk pada keputusan bersama, dan pemimpin memberi arahan, tidak memberi perintah semata.

Berbeda dengan Margono Slamet, Schein (1991) membagi jenis organisasi menjadi tiga, yaitu organisasi formal, organisasi sosial, dan organisasi informal. Organisasi formal adalah organisasi yang mengkoordinasi sejumlah kegiatan manusia yang direncanakan untuk mencapai suatu maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta melalui serangkaian wewenang dan tanggung jawab. Organisasi sosial adalah organisasi yang pola koordinasinya dilakukan dengan spontan atau secara tidak langsung muncul dari interaksi orang tanpa melibatkan koordinasi rasional untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Organisasi informal adalah organisasi yang pola koordinasinya lahir dari kalangan anggota-anggota organisasi formal yang tidak ada dalam cetak biru. Apa yang dikerjakan oleh anggota dalam organisasi formal tersebut tidak hanya sebatas hal-hal yang formal tetapi juga hal lain yang tidak ada ketentuannya. Proporsi koordinasi yang di luar ketentuan formal lebih banyak dibanding yang tertulis secara formal.

Aplikasi tipe-tipe organisasi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah mutlak sesuai dengan kategori di atas. Tipe-tipe organisasi bisa merupakan kombinasi diantara dua atau tiga tipe. Misalnya kombinasi tipe utilitarian dan normatif serta utilitarian dan koersi

E. Organisasi Sosial Sebagai Sebuah Sistem

Hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi menciptakan harapan-harapan bagi perilaku individu. Harapan-harapan menghasilkan peranan-peranan (*role*) tertentu yang harus

dimainkan. Sebagian orang memainkan peranan sebagai pemimpin, sementara yang lainnya memainkan peranan sebagai pengikut. Organisasi mempunyai sistem wewenang, status dan kekuasaan; dan orang-orang di dalam organisasi itu mempunyai kebutuhan yang beraneka dari masing-masing sistem tersebut. Kelompok di dalam organisasi pun mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap perilaku individu dan terhadap prestasi organisasi (Gibson dan Donnelly, 1997).

Sebagai sebuah sistem, organisasi terdiri dari unit-unit sistem, yaitu: taksinomi organisasi, kepemimpinan, struktur organisasi, proses organisasi, dan individu-individu dalam organisasi. Apabila organisasi tertentu telah mempunyai sifat sebagai organisasi formal, maka subsistem kepemimpinan mempunyai peranan yang tinggi. Kelima subsistem tersebut saling mempengaruhi dalam dinamikanya. Tidak subsistem dalam organisasi tersebut terbebas dari pengaruh subsistem lainnya. Manakala tidak terpengaruh, maka subsistem tersebut tidak lagi menjadi subsistem organisasi sosial tersebut.

Masing-masing konsep dalam organisasi tersebut, dapat dipergunakan untuk menganalisis dinamika organisasi. Penilaian, pemeliharaan, dan pengembangan organisasi dapat menggunakan konsep dinamika organisasi.

1. Taksinomi Organisasi

- a. tujuan organisasi, yaitu keadaan tertentu yang ingin dicapai oleh organisasi. Menurut Gibson, Ivansevich dan Donnelly (1997), tujuan adalah obyek suatu tindakan. Sementara itu, Szilagy dan Wallace (1990) mengatakan, bahwa tujuan organisasi dapat menimbulkan kinerja, motivasi, kerjasama, dan komunikasi yang lebih jelas.

- b. Sumber kebenaran, sumber pikiran, kristalisasi nilai-nilai hidup. Filosofis organisasi adalah dasar pemikiran yang digunakan dalam membentuk dan menggerakkan organisasi berupa pertimbangan-pertimbangan yang lebih terinci dan luas berkaitan dengan kewajaran perilaku, kegiatan, dan fungsi-fungsi di dalam sistem yang antaranya penjabaran tentang apa yang dianggap baik dan dianggap buruk oleh organisasi, yang merupakan pengorganisasian sikap-sikap spesifik ke dalam suatu struktur (Ruwiyanto, 1994)
- c. Komposisi anggota, proporsi anggota organisasi dilihat dari karakteristik tertentu, misalnya tingkat pendidikan, kemampuan intelektual, ciri kepribadian, hubungan sosial, keragaman motivasi, status dan jenjang dalam organisasi.
- d. Struktur organisasi. Pengertian struktur organisasi di sini hanya sebatas pengertian statis (sempit). Beberapa konsep yang perlu diamati dalam struktur organisasi antara lain yaitu jumlah anggota, diferensiasi dalam organisasi), cara pengendalian anggota, dan struktur peranan. Pengurus organisasi perlu mempertimbangkan jenis diferensiasi yang perlu dikembangkan, apakah diferensiasi vertikal atau horizontal. Ada beberapa pendapat yang menyatakan suatu organisasi yang mengembangkan diferensiasi horizontal dilakukan d'engan alasan untuk memotong jenjang struktural yang begitu panjang. Pengendalian anggota di masing-masing unit diatur dalam suatu rentang kendali tersendiri yang dianggap efektif.
- e. Teknologi, yaitu segala alat dan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep-konsep yang perlu diukur dalam menganalisis teknologi yang dipakai, efektivitas dan kompatibilitas.
- f. Lingkungan fisik, Aspek lingkungan fisik organisasi berpengaruh terhadap kesan organisasi dan perilaku

anggota, karena itu ada beberapa konsep yang perlu diamati di dalam mengelola pengaruh lingkungan fisik terhadap kehidupan organisasi, kemudahan atau keterbatasan komunikasi, mobilitas para anggota, dan stres yang diakibatkan lingkungan terhadap anggota.

- g. Lingkungan sosial budaya, sebagai sebuah organisasi yang hidup di tengah sistem sosial lain yang lebih besar apakah ada tata nilai dari organisasi yang bertentangan dengan tata nilai yang ada di lingkungan sosial budaya setempat?

2. Struktur organisasi

Menurut Robbins (1991) struktur organisasi adalah sesuatu yang menunjukkan bagaimana organisasi itu mengalokasikan tugas, siapa melaporkan sesuatu kepada siapa, dan menunjukkan mekanisme formal koordinasi serta pola interaksi yang seharusnya dilakukan.

Struktur organisasi dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang mengatur antar hubungan antara bawahan-atasan dan hubungan antar staf yang sederajat kedudukannya dalam organisasi. Di dalam struktur organisasi dibutuhkan suatu gabungan aturan-aturan yang disebut dengan prosedur organisasi.

Menurut Margono Slamet (1996) struktur organisasi menggambarkan bagaimana organisasi itu mengatur dirinya sendiri, bagaimana mengatur hubungan antar orang dan antar kelompok. Struktur organisasi merupakan keputusan yang diambil oleh organisasi itu sendiri berdasarkan situasi, kondisi dan kebutuhan organisasi. Struktur organisasi ada kaitannya dengan tujuan, sebagai struktur organisasi itu adalah cara-cara organisasi mengatur dirinya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai sehingga struktur organisasi bersifat unik.

3. Proses Organisasi

Proses organisasi yang ada dalam organisasi menunjukkan adanya “kehidupan” pada suatu organisasi. Kata proses menunjukkan adanya suatu aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Variable-variabel dalam organisasi menunjukkan suatu aktivitas intraksi antara individu dengan individu, individu dengan unit dalam organisasi, dan antara unit dalam organisasi. Variabel-variabel yang diamati dalam analisis proses organisasi, antara lain yaitu: (a) hubungan antar peranan, (b) pengendalian, (c) koordinasi, (4) sosialisasi dan (5) supervise.

4. Individu-individu dalam organisasi

Manusia menciptakan seperangkat kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu bersama-sama dengan manusia lain dalam organisasi. Individu manusialah yang menyakinkan orang-orang lain akan adanya suatu tujuan yang harus dicapai bersama-sama dengan menciptakan organisasi baru (Schein, 1991).

Individu-individu dalam organisasi menciptakan taksinomi organisasi, struktur organisasi, dan menjalankan proses-proses organisasi. Sebaliknya, individu-individu tersebut dipengaruhi oleh taksinomi, struktur, dan proses organisasi dalam bertingkah laku yang berhubungan dengan organisasi. Dengan demikian terjadi hubungan dialaketik antara subsistem individu dalam organisasi dengan subsistem yang lain.

Dalam rangka menggerakkan secara efektif manusia-manusia yang ada dalam suatu organisasi sekarang telah dikenal manajemen sumber daya manusia, yaitu bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia. Adalah tugas manajemen sumber daya manusia untuk mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh anggota

organisasi yang dapat melaksanakan tugas dengan baik (Umar, 1998).

Dalam menganalisis organisasi dari sudut pandang subsistem individu dalam organisasi, maka beberapa variable-variabel penting yang perlu diamati. Adapun variable-variabel tersebut meliputi: motivasi, sikap mental, kecakapan (*aptitude*), temperamen, persepsi terhadap peranan, dan jenis individu.

BAB XIII

TEORI-TEORI SOSIOLOGI

A. Teori Sosiologi

1. Pengertian Teori Sosiologi

Dikalangan para ahli, teori seringkali dipahami secara berbeda. Hal ini terjadi karena teori adalah konsep yang sangat terbuka sehingga tidak mungkin mengedepankan pengertian tunggal. Adanya banyak ahli yang memberikan definisi teori. Kerlinger sebagaimana dikutip Zamroni (1992: 1) menyatakan bahwa teori sosial adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena sosial yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan di antara variable-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.

Sementara Gibbs (1972) mendefinisikan teori sebagai suatu kumpulan statemen yang mempunyai kaitan logis, merupakan cermin dari kenyataan yang ada tentang sifat-sifat atau ciri-ciri suatu kelas, peristiwa atau suatu benda. Ahli lain, Hage (1972) menyatakan bahwa teori harus mengandung tidak hanya konsep dan statemen tetapi juga definisi, baik definisi teoritis maupun definisi operasional dan hubungan logis yang bersifat teoritis dan operasional antara konsep atau statemen tersebut.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu teori harus: a) mengandung konsep, definisi, dan proposisi, b) ada hubungan logis di antara konsep-konsep, definisi-definisi dan proposisi-proposisi, c) hubungan-hubungan tersebut menunjukkan atau merupakan cermin

fenomena sosial, d) dengan demikian teori dapat digunakan untuk eksplanasi dan prediksi.

Proposisi merupakan pernyataan yang mengandung dua konsep atau lebih. Sedangkan sesuatu bisa digunakan untuk eksplanasi dan prediksi atas sesuatu yang lain, jikalau antara keduanya ada hubungan yang bersifat kausal.

Suatu teori dapat diterima dengan dua kriteria, yaitu: a) kriteria ideal dan b) kriteria pragmatis. Adapun kriteria ideal adalah suatu teori akan dapat diakui apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Sekumpulan ide yang dikemukakan mempunyai hubungan logis dan konsisten
- 2) Sekumpulan ide-ide yang dikemukakan harus mencakup seluruh variabel yang diperlukan untuk menerangkan fenomena yang dihadapi,
- 3) Kumpulan ide-ide tersebut mengandung proposisi-proposisi di mana ide yang satu dengan yang lainnya tidak tumpang tindih,
- 4) Kumpulan ide-ide tersebut dapat diuji secara empiris.

Sedangkan kriteria pragmatis mengemukakan bahwa ide-ide dikatakan sebagai teori kalau ide-ide tersebut memiliki:

- 1). Asumsi dan paradigma,
- 2). Frame reference, yakni kerangka pikir yang mengidentifikasi aspek-aspek kehidupan sosial yang akan diuji secara empiris,
- 3). Konsep-konsep, yakni abstraksi atau symbol sebagai ujud sesuatu ide,
- 4). Variabel, yakni penjabaran konsep yang mengandung dimensi,
- 5). Proposisi yakni hubungan antara konsep,

- 6). Hubungan yang sistematis dan bersifat kausal di antara konsep-konsep dan proposisi-proposisi tersebut.

Sementara itu, teori sosiologi dapat didefinisikan sebagai kumpulan pendapat tentang kepedulian masyarakat dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain teori sosiologi adalah rangkaian cara pandang (pendapat abstrak) yang mempelajari masyarakat dan fenomena sosial dalam kaitannya dengan realitas sosial yang ada yang biasa digunakan untuk mengumpulkan struktur sosial masyarakat dan proses sosial masyarakat.

2. Fungsi dan Manfaat Teori Sosiologi

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa teori dapat dijadikan sebagai pisau analisis di dalam menjelaskan berbagai persoalan yang berkaitan dengan fakta dan fenomena sosial masyarakat. Berkaitan dengan fungsi teori, setidaknya ada 3 fungsi dari suatu teori, yaitu:

- 1). Untuk sistematisasi pengetahuan. Kegunaan pertama dari teori adalah sistematisasi pengetahuan atau disebut dengan *typologies*. Setiap konsep dapat digunakan untuk kategorisasi dan klasifikasi. Misalnya dapat diklasifikasikan menurut tinggi badan, kekuatan badan (ciri-ciri fisik), sikap, loyalitas dan sebagainya.
- 2). Untuk eksplanasi, prediksi, dan control sosial. Eksplanasi berhubungan dengan peristiwa yang telah terjadi, prediksi berhubungan dengan peristiwa yang akan terjadi, dan control sosial berhubungan dengan usaha untuk menguasai atau mempengaruhi peristiwa yang akan terjadi tersebut.
- 3). Untuk mengembangkan hipotesis. Teori dapat digunakan sebagai hipotesis dalam penelitian.

Selain memiliki fungsi, teori-teori sosiologi juga memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

- a) Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang dipelajari sosiologi.
- b) Teori memberi petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
- c) Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang dipelajari oleh sosiolog
- d) Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta perkembangan definisi-definisi yang penting untuk penelitian.
- e) Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyek sosial, yaitu usaha dapat mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan pada dewasa ini (Seokanto, 2006: 26)

B. Teori-Teori Utama dalam Sosiologi

Kelahiran sosiologi, sangat berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di Eropa Barat ada masa revolus industri (Inggris) dan revolusi sosial (Prancis). Kedua revolusi ini pada awalnya diharapkan membawa kehidupan yang modern bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pada kenyataannya, revolusi menyebabkan timbulnya berbagai kekacauan dan disharmoni hubungan antarwarga masyarakat dan berbagai kesenjangan sosial juga munculnya di tengah-tengah masyarakat.

Timbulnya kekacauan, disharmoni, dan munculnya kesenjangan sosial pada masyarakat sebagaimana diungkapkan di atas, telah mendorong para sosiolog untuk ikut terlibat untuk

menjelaskan kenapa berbagai persoalan sosial masyarakat tersebut muncul. Untuk menjelaskan berbagai persoalan tersebut, secara teoritik para sosiolog menjelaskan dengan berbagai teori sosial. Berkenaan dengan teori sosial, terdapat banyak teori utama yang telah diungkapkan oleh para sosiolog, antara lain yaitu: teori fungsional struktural, teori konflik, teori intraksionisme simbolik, teori tindakan sosial, teori pertukaran dan beberapa teori lainnya.

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsional struktural adalah salah satu teori yang berangkat dari analogi organisme mengenai adanya persamaan tertentu antara organisme biologis dengan masyarakat. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai fungsionalisme struktural antara lain, ialah Emile Durkheim, Auguste Comte, Herbert Spencer, (Sunarto, 1993: 216), ide-ide mereka kemudian mempengaruhi angkatan ahli sosiologi yang lebih muda, seperti Talcott Parsons, Robert K. Merton, dan Anthony Giddens.

Menurut Van Den Berghe sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto (1987) menyatakan bahwa fungsional struktural berangkat dari pokok-pokok pikiran, yaitu:

- 1) Analisis terhadap masyarakat harus dilakukan secara holistic, oleh karena ia merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan,
- 2) Hubungan sebab akibat bersifat ganda dan resiprokal,
- 3) Sistem-sistem sosial berada dalam keadaan yang serasi yang dinamis, sehingga penyesuaian terjadi dengan perubahan-perubahan yang seminimal mungkin,
- 4) Integrasi sempurna tidak akan tercapai, sehingga setiap sistem sosial menghadapi tekanan-tekanan maupun

penyimpangan-penyimpangan yang akan dapat diinternalisasikan melalui pelembagaan

- 5) Perubahan erupakan proses penyesuaian yang berjalan lamban (dan bukan merupakan suatu proses revolusioner)
- 6) Perubahan merupakan koneksi penyesuaian perubahan-perubahan yang terjadi di luar sistem, yang ditimbulkan *diferensiasi*, maupun inovasi-inovasi internal,
- 7) Sistem tersebut terintegrasi melalui nilai-nilai yang dianut bersama-sama.

Menurut Parsons ada dua dimensi dalam analisis sistem yang hidup, yakni adanya saling kaitan bagian-bagian yang merupakan sistem itu dan mencakup pertukaran antara sistem dengan lingkungan, dan mempunyai ciri umum, yakni, prasyarat dan *functional imperative*. Secara deduktif Parsons mengatakan ada empat kebutuhan fungsional, yakni *Latten pattern-maintenance (L)*, *Integrative (I)*, *goal attainment (G)*, *adaptational (A)* atau dapat disingkat LIGA

Teori fungsional struktural menekan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya adalah: fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Pendekatan fungsional menyatakan bahwa integritas yang terjadi pada suatu masyarakat didasarkan oleh kata sepakat para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu, suatu kesepakatan umum yang memiliki daya mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara anggota masyarakat. Menurut teori fungsional struktural ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Dengan

demikian, jelaslah bahwa pendekatan fungsional struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium* (Nasikin, 1995). Masyarakat dalam pandangan pendekatan ini dianalogikan seperti layaknya organism biologis.

Fungsional struktural juga memandang bahwa suatu masyarakat dipandang sebagai suatu jaringan kelompok yang bekerjasama secara terorganisir, yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh sebagian masyarakat tersebut. Oleh karena itu, masyarakat dipandang sebagai sistem yang stabil dengan orientasi ke arah keseimbangan. Ada hasrat untuk saling menjaga keteraturan ini dari setiap komponen masyarakat yang ada. Ada keinginan untuk mempertahankan keteraturan dengan cara sistem kerja yang selaras proposional dan seimbang.

Dalam perspektif ini, para pelopor fungsionalisme struktural menyatakan bahwa setiap kelompok dalam masyarakat akan melaksanakan tugas tertentu dan secara kontinyu, karena ini merupakan cermin dari apa yang disebut sebagai fungsional tersebut, sebuah perilaku atau tindakan sosial akan bisa dibenarkan karena hal tersebut dalam masyarakat dinilai sebagai fungsional. Suatu pola perilaku bisa muncul, dan sekaligus bisa hilang dan berubah sesuai perkembangan sosial yang terjadi, dan sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan dalam masyarakat tertentu.

Suatu perubahan sosial bisa terjadi akan mengganggu kestabilan dalam masyarakat tertentu tersebut, namun dalam rentan waktu tertentu, keseimbangan akan muncul kembali. Secara teoritik diasumsikan bahwa jika suatu perubahan sosial yang akan datang membawa hal-hal yang fungsional, maka pada saat yang sama terjadi keseimbangan. Demikian sebaliknya, jika perubahan sosial yang akan datang ternyata mengganggu keseimbangan atau

stabilitas sosial yang ada, maka hal tersebut disebut sebagai gangguan fungsional (Riyadi Soepto, 2002: 73).

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah salah satu teori sosiologi berangkat dari suatu proposisi teoritik pokok, yaitu bahwa struktur-struktur peran melahirkan pertentangan dan juga kepentingan-kepentingan yang bersifat komplementar. Kondisi-kondisi umum tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan konflik-konflik. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai teori konflik antara lain, ialah Karl Mark, Max, Weber, Ralf Dahrendorf Lewes Coser. (Sunarto, 1993: 218).

Perspektif teori konflik, merupakan kebalikan dari fungsionalisme struktural. Jika teori fungsionalisme struktural memandang bahwa masyarakat berada dalam keseimbangan dan sekaligus berusaha mencari keseimbangan terus menerus, maka menurut pespektif konflik justru sebaliknya. Perspektif ini mengatakan bahwa masyarakat selalu berada dala ruang konflik yang terjadi secara terus-menerus pula, baik yang terjadi dalam kelompok maupun kelas dalam setiap masyarakat.

Menurut teori konflik versi Dahrendorf bahwa masyarakat terdiri atas organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan (dominan satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan) atau wewenang (dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi) yang dinamakannya "*imperatively coordinate association*" (assaosiasi yang dikordinsi secara paksa). Karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda—pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan—maka dalam asosiasi akan terjadi polarisasi dan konflik antara dua kelompok.

Konflik menurut pandangan Coser dapat dilihat sebagai suatu proses yang dalam kondisi-kondisi tertentu, berfungsi untuk mempertahankan wadah sosial atau bagian-bagiannya. Berdasarkan titik tolak ini, Coser mengembangkan citranya mengenai masyarakat yang memberikan tekanan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dunia sosial dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan,
- 2) Setiap sistem sosial memperlihatkan keadaan tidak harmonis, ketegangan dan konflik kepentingan di antara bagian-bagiannya,
- 3) Proses-proses di dalam dan di antara bagian-bagian sistem berlangsung dalam tradisi yang berbeda-beda untuk mempertahankan, mengubah dan menambah atau mengurangi integritas sistem maupun kemampuan penyelesaian,
- 4) Banyak proses, seperti kekerasan, kekhawatiran, penyimpangan dan konflik yang dipandang mempunyai pengaruh negatif terhadap dasar integritas dari sistem maupun kemampuannya untuk menyetarakan diri dengan lingkungan.

Berdasarkan asumsi-sumsi tersebut di atas, Coser mengembangkan perangkat proposisi-proposisi yang agak luas mengenai fungsi konflik bagi sistem sosial. Yang penting adalah analisisnya mengenai sebab-sebab berantai yang mengakibatkan konflik dapat mempertahankan atau membentuk kembali sistem integritas dan kemampuan menyetarakan diri pada kondisi-kondisi yang berubah. Di samping itu, Coser juga menyajikan berbagai proposisi-proposisi mengenai aspek-aspek integritas dari konflik yang memungkinkan terjadinya gangguan pada sistem sosial. Proposisi-proposisi tersebut menghasilkan perangkat gejala-gejala pengaruh-mempengaruhi, yakni:

- 1) Ketidak-serasian integritas bagian-bagian itu yang mengakibatkan sistem sosial yang menyebabkan,

- 2) Terjadunya konflik antara bagian-bagian itu yang mengakibatkan
- 3) Terjadinya integritasi temporer yang dalam kondisi-kondisi tertentu menyebabkan,
- 4) Meningkatkan keluwesan pada struktur sistem, sehingga,
- 5) Meningkatkan kemampuan sistem untuk menggulangi ketidakserasian melalui konflik yang mengarah kepada sistem yang,
- 6) Memperlihatkan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang berubah (Coser, 1967).

Coser terkenal dengan pandangannya bahwa konflik mempunyai fungsi positif bagi masyarakat (Coser, 1964) menurut definisi kerja Coser, konflik adalah “perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan”. Kajian Coser terbatas pada fungsi positif dari konflik, yaitu dampak yang mengakibatkan peningkatan dalam adaptasi hubungan sosial atau kelompok tertentu.

Bekaitan dengan konflik sosial yang terjadi di masyarakat, Craib (1993: 107) mengungkapkan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat konflik antara kepentingan dari mereka yang memiliki kekuatan otoritatif berupa kepentingan untuk memelihara atau bahkan mengukuhkan status-quo daripada pola hubungan-hubungan kekuatan yang ada dengan yang ingin merombak atau mengubah status-quo.

Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya konflik sosial di masyarakat, antara lain: 1) masalah dalam hubungan antarmanusia biasanya dipicu oleh emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotipe, salah komunikasi dan tingkah laku

negatif yang berulang, 2) masalah kepentingan, 3) masalah struktur, 4) masalah perbedaan nilai (Malik, dkk, 2003).

Selain mendatangkan berbagai kerugian bagi masyarakat yang berkonflik, konflik sosial juga sebagaimana diungkapkan Pierre van den Berghe seperti dikutip George Ritzer (1992:32) mengemukakan ada beberapa fungsi dari konflik sosial suatu masyarakat, antara lain yaitu: (1). Sebagai alat untuk memelihara soidaritas. (2) Membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain, (3). Mengaktifkan peranan individu yang semula terisolasi, (4). Fungsi komunikasi. Sebelum konflik kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Individu dan kelompok tahu secara pasti di mana mereka berdiri dan arena itu dapat mengambil keputusan lebih baik untuk bertindak dengan lebih tepat.

3. Teori Intraksionisme Simbolik

Intraksionis simbolik adalah salah satu teori dalam sosiologi yang sangat penting sebagai metode analisis sosial. Para tokoh sosiologi Amerika yang merintis pemikiran dasar mengenai intraksionisme antara lain, ialah William James, Charles Horton Cooley, John Dewey, dan Goerge Herb. Menurut Mead (Turner, 1978: 309), ide-ide mereka kemudian mempengaruhi angkatan ahli sosiologi yang lebih muda, seperti Herbert Blumer, Erving Goffman dan Peter L. Berger.

Interaksionisme simbolik adalah nama yang diberikan kepada salah satu teori tindakan yang paling terkenal. Melalui interaksionisme simboliklah pertanyaan-pertanyaan seperti “definisi situasi”, “realitas dimata pemiliknya”, dan “jika orang mendefinisikan situasi itu nyata, maka nyatalah situasi itu dalam konsekuensinya”, menjadi paling relevan. Maka agak berlebihan,

nama intraksionisme simbolik itu jelas menunjukkan jenis-jenis aktivitas manusia yang unsur-unsurnya memandang penting untuk memusatkan perhatian dalam rangka memahami kehidupan sosial. Menurut teori intraksionisme simbolik, kehidupan sosia secara harfiah adalah “interaksi manusia melalui penggunaan symbol-symbol. Intraksionisme simbolik pada: 1). Cara manusia menggunakan symbol untuk mengungkapkan apa yang mereka maksud, dan untuk berkomunikasi satu sama lain (suatu minat interpretatif yang ortodoks). 2). Akibat interpretasi atas symbol-symbol terhadap kelakuan pihak-pihak yang terlibat selama interaksi sosial.

Interaksionisme simbolik menekankan bahwa interaksi adalah proses interpretatif dua arah. Kita tidak hanya harus memahami bahwa tindakan seseorang adalah produk dari bagaimana ia menginterpretasikan perilaku orang lain, tetapi bahwa interpretasi ini akan memberi dampak terhadap pelaku yang perilakunya diinterpretasi dengan cara tertentu pula. Salah satu kontribusi utama interaksionisme simbolik bagi teori tindakan adalah elaborasi dan menjelaskan berbagai akibat interpretasi terhadap orang lain terhadap identitas sosial individu yang menjadi obyek dari interpretasi tersebut.

Untuk dapat memahami teori interaksionisme simbolik tentu kita harus memahami beberapa prinsip dasar teori ini, yang meliputi:

1. Tak seperti bintang, manusia dibekali kemampuan berpikir,
2. Kemampuan berpikir dibentuk oleh intraksi sosial
3. Dalam intraksi sosial manusia mempelajari arti dan symbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir mereka yang khusus itu,
4. Makna dan symbol memungkinkan manuia melanjutkan tindakan khusus dan berintraksi,

5. Manusia mampu mengubah arti dan symbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan penafsiran mereka terhadap situasi,
6. Manusia mampu membuat kebijakan modifikasi dan perubahan, sebagian karena kemampuan mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka menguji serangkaian peluang tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relative mereka, dan kemudian memilih satu di antara serangkaian peluang tindakan itu,
7. Pola tindakan dan interaksi yang saling berkaitan akan membentuk kelompok dan masyarakat (Ritzer dan Goodman, 2004:289).

Pengaruh interaksionisme yang paling umum adalah pandangan bahwa kita menggunakan interpretasi orang lain sebagai bukti “kita pikir siapa kita”. Berarti, citra diri (*self-image*)—kesadaran identitas kita—adalah produk dari orang lain berpikir tentang kita. Aibatnya, dalam hal ini “saya adalah apa yang saya pikir engkau berpikir tentang saya”. Bagi interaksionisme simbolik ini terutama apa yang dimaksud dengan sosialisasi itu. Jadi bukan proses di mana aturan-aturan kebudayaan sudah ada, bersifat eksternal yang secara umum diinternalisasi oleh manusia, seperti pendapat teori struktural. Citra diri adalah produk dari proses interpretatif—alokasi makna antara satu dengan orang lain—yang bagi teori tindakan adalah akar dari semua interaksi sosial. Kepribadian kita dikonstruksi dengan menggunakan proses interpretasi ini sebagai berikut.

Selama kita hidup, kita ketemu dengan banyak orang, semuanya menanggapi kelakuan kita sesuai dengan simbolisasi yang kita bangun. Mereka menginterpretasikan perilaku kita sesuai dengan bukti yang tersedia bagi mereka. Kemudian mereka bertindak terhadap kita berdasarkan interpretasi tersebut,

mengindikasikan melalui wahana simbolik yang tersedia bagi mereka, manusia seperti apa kita menurut pandangan mereka. Citra diri kita sangat dipengaruhi oleh reaksi-reaksi individu yang berkontak dengan kita. Kita tidak dapat mengabaikan orang lain yang memberitahu kita tentang siapa kita, citra “diri” kita sangat dipengaruhi, jika tak dapat dikatakan diciptakan, oleh citra yang dibangun orang lain tentang kita.

Ambilah contoh hubungan seorang dosen dengan mahasiswanya. Sebagaimana manusia, dosen tak dapat berbuat lain kecuali membuat penilaian terhadap para mahasiswanya dalam kelas., khususnya dalam kemampuan mereka. Sama halnya, menurut interaksionisme simbolik, karena para mahasiswa itu juga manusia, pandangan mereka mengenai diri mereka sendiri dan kemampuan mereka akan dipengaruhi oleh penilain dosen tersebut. Jadi, mahasiswa yang duduk penuh perhatian dibangku terdepan, berkelakuan baik dan sopan, nampaknya akan dianggap sebagai mahasiswa yang “pintar? Dan “rajin”. Sebaliknya, mahasiswi yang duduk di bangku belakang nampaknya kurang perhatian dan malas, akan diinterpretasikan sebagai mahasiswa “kurang baik” atau “bodoh”, bahwa kerap kali yang menjadi persoalan bukanlah apakah interpretasi itu benar, melainkan dampaknya terhadap penerimanya. Dalam hal ini, sekalipun para mahasiswa tersebut sebenarnya memiliki kemampuan yang sama, dosen tetap memutuskan mereka tidak sama, dan akibatnya mereka diperlakukan berbeda. Mahasiswa itu didorong agar terus rajin belajar, sedangkan mahasiswi itu dihukum dan diawasi kelakuannya. Reaksi dosen yang berbeda ini akan mempengaruhi para mahasiswa dalam memandang diri mereka sendiri. Dipacu oleh dorongan dan dukungan dosen, mahasiswa itu belajar lebih keras dan mencapai potensi dan prestasi tertinggi. Karena kata dosen, ia kurang mampu, sementara mahasiswi semakin malas dan semakin kurang memperhatikan materi kuliah. Penilaian dosen

dikonfirmasi, penilaian dosen terhadap mahasiswi menjadi kenyataan. Keadilan dalam interpretasi kurang serius dibandingkan konsekuensi penerapannya, khususnya dalam hal cara penerima didorong untuk memandang dirinya sendiri.

Manfaat dari hasil proses interaksi antara orang yang menginterpretasi dan orang yang diinterpretasi jelas dapat dilihat. “Diri” kita—orang yang kita menjadi—tergantung pada orang-orang tertentu yang kita kebetulan bertemu dalam perjalanan hidup. Orang tua, saudara, kerabat, teman, rekan kerja dan lain-lain dapat membentuk kita menjadi orang yang berbeda. Dalam contoh di atas, seorang dosen seharusnya memperlakukan dan mendorong para mahasiswa dan mahasiswinya itu sama, sehingga konsekuensi yang lebih positif lebih banyak terjadi pada citra-diri mahasiswi tersebut.

4. Teori Tindakan Sosial

Pelopor teori tindakan sosial, Talcott Parsons (1978) dalam bukunya *The Degree of Rationalitas*-nya mengungkapkan bahwa untuk menganalisis atau menjelaskan tipe-tipe rasionalitas tindakan sesuai dengan factor pertimbangan factor-faktor tertentu yang mendasarinya, sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam suatu tindakannya.

Weber (1978) berpendapat bahwa sosiologi merupakan *a science concerning itself with the interpretative understanding of social action and theory by a causal by explanation of its course and consequences*”. Dengan demikian, Weber berpendapat bahwa semua tindakan manusia diarahkan oleh makna-makna. Jadi untuk memahami dan menjelaskan tindakan, makna-makna dan motif-motif yang ada dibalik tindakan tersebut harus digali dan diapresiasi.

Lebih lanjut Weber menegaskan bahwa suatu tindakan rasional terjadi ketika seseorang mencoba untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dengan melakukan seleksi pada cara-cara (*means*) yang dinilai tepat untuk mewujudkan sesuai dengan situasi yang ada. Tindakan rasional merupakan metode untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan cara yang diperhitungkan lebih tepat.

Max Weber (1978) menandakan bahwa tindakan sosial, sebagaimana tindakan-tindakan manusia yang lain dibedakan oleh makna-makna atau motif-motif yang menjadi dasar atau orientasi tindakan tersebut. Ada empat tindakan sosial menurut kadar rasionalitas yang dikandungnya, yakni:

Pertama, tindakan rasionalitas instrument (*zweckrationalitat*) adalah suatu tindakan yang meliputi pertimbangan dan pilihan yang sadar berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan alat yang dipergunakan untuk mencapai. Dalam tindakan ini actor tidak hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuannya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam *zwerk rational* tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila actor berkelakuan dengan cara yang saling rasional maka mudah memahami tindakan itu (Ritzer 1992: 47).

Kedua, tindakan sosial nilai (*zwerkerational action*) adalah suatu tindakan sosial yang berorientasi kepada suatu sistem nilai tertentu. Tindakan sosial semacam ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu asas manfaat dan tujuannya. Dalam tindakan tipe ini actor tidak dapat menilai apakah cara-cara yang dipilihnya itu merupakan yang paling tepat ataukah lebih tepat untuk mencapai tujuan yang lain. Ini menunjukkan kepada tujuan itu sendiri. Dalam tindakan ini memang antara tujuan dan cara-cara mencapainya cenderung menjadi sukar untuk dibedakan. Namun tindakan ini rasional, karena pilihan terhadap cara-cara kiranya sudah menentukan tujuan yang diinginkan. Tindakan tipe kedua ini masih rasional meski tidak serasional yang pertama. Karena itu dapat dipertanggung jawabkan untuk diahami. Yang

diperhitungkan adalah cara atau proses sosial untuk mencapai tujuan itu. Contohnya upacara-upacara religio magis, termasuk upacara-upacara keagamaan.

Berkaitan dengan tindakan sosial rasionalitas nilai, Weber (1978) menjelaskan: *“is determined by a conscious belief in the value for its own sake of some ethical, eschetic, or other of behavior independently of the prospected of success”*

Ketiga, tindakan sosial tradisional (*traditonal action*). Tindakan ini merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Kalau seseorang individu memperlihatkan perilaku karena kebiasaan, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan, perilaku seperti itu digolongkan sebagai tindakan tradisional. Individu itu akan membenarkan atau menjelaskan tindakan itu kalau diminta dengan hanya mengatakan bahwa dia selalu bertindak dengan cara seperti itu atau perilaku seperti merupakan kebiasaan baginya dilakukan karena kebiasaan yang melekat atau karena warga masyarakat selalu melakukan dengan cara-cara tertentu.

Keempat, tindakan afektif (*affectual action*). Tipe tindakan ini ditandai dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami persaan meluap-luap seperti cinta, kemarahan, ketakutan atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu, tanpa refleksi berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan logis, ideologis atau kreteria rasionalitas lainnya.

5. Teori Pertukaran (*Exchange Theory*)

Hubungan antara dua orang kekasih renggang dan akhirnya terputus tatkala salah seorang dipindahkan ke daerah lain, sehingga untuk berkomunikasi menjadi sangat mahal. Seorang dermawan memberikan berkala sumbangan dalam jumlah besar pada suatu

yayasan amal, dan yayasan penerima sumbangan secara berkala pula menyatakan rasa terima kasihnya secara terbuka di muka umum, namun sumbangan dihentikan tatkala darmawan bersangkutan merasa bahwa pengurus yayasan kurang memperlihatkan rasa terima kasih mereka. Seorang mahasiswa senantiasa belajar dengan rajin karena terus menerus dikritik. Pelanggaran lalu lintas berkurang tatkala kebanyakan pelanggar dapat segera ditahan, diadili dan dijatuhi hukuman denda tinggi atau hukuman kurungan. Kasus ini mencerminkan adanya asas pertukaran dalam hubungan sosial antarmanusia, dan oleh sejumlah ahli sosiologi asas pertukaran dikembangkan menjadi teori untuk menjelaskan ada-tidaknya hubungan sosial.

Turner (1978: 201) menjelaskan mengenai pokok pikiran teori pertukaran sebagai berikut:

- 1) manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain,
- 2) dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung-rugi,
- 3) manusia cenderung menyadari berbagai alternatif yang tersedia baginya,
- 4) manusia bersaing antar satu dengan lainnya,
- 5) hubungan pertukaran secara umum antarindividu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial, dan
- 6) individu pun mempertukarkan berbagai komoditas tak terwujud seperti perasaan dan jasa.

Inti teori pertukaran terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. Meski beberapa proposisinya menerangkan setidaknya dua individu yang berinteraksi, namun ia dengan hati menunjukkan bahwa proposisi itu berdasarkan prinsip psikologis. Dalam hal ini Homans menggunakan contoh jenis hubungan pertukaran yang menjadi sasaran perhatian:

“bayangkan dua orang melakukan pekerjaan tulis-menulis di sebuah kantor. Menurut peraturan kantor, masing-masing harus mengerjakan pekerjaan sendiri atau bila memerlukan bantuan ia harus berkonsultasi dengan pengawas. Salah seorang diantaranya, sebut saja Parson, tak begitu terampil bekerja dan hanya akan dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat bila ia mendapat bantuan dari waktu ke waktu. Meskipun peraturan kantor memperbolehkan, ia enggan berkonsultasi dengan pengawas karena dengan mengaku ketidak-mampuannya dapat merugikan peluangnya untuk promosi. Malahan ia mencari orang lain, sebut saja Ichal, untuk meminta bantuannya. Ichal lebih bekerja berpegalaman bekerja ketimbang Parson. Ichal dapat mengerjakan pekerjaan dengan dengan lebih baik dan cepat dan melewati waktu istirahat dan mempunyai alasan untuk mengira bahwa pengawas takkan memeriksa pelanggaran peraturan yang dibuatnya. Ichal membantu Parson dari imbalannya Parson menyatakan terima kasih dan persetujuannya kepada Ichal. Kedua orang itu telah bertukar bantuan dan persetujuan (Homans, 1961: 31-32).

BAB XIV

PARADIGMA UTAMA SOSIOLOGI

A. Paradigma Sosiologi

Periode pertama sejarah manusia dapat dipandang sebagai perangkat paradigma tertentu dalam system kepercayaan, yakni definisi yang jelas tentang realitas kehidupan fisik dan sosial. Dengan demikian (Graham C, Kinloch, 2005: 45)

Sosiologi lahir di tengah-tengah persaingan pengaruh antara filsafat dan psikologi. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pengaruh kedua cabang ilmu itu masih saja terasa sampai saat ini. Emile Durkheim adalah orang pertama yang mencoba melepaskan sosiologi dari dominasi kedua kekuatan yang mempengaruhinya itu. Durkheim berusaha melepaskan sosiologi dari alam filsafat positif Auguste Comte untuk kemudian meletakkan sosiologi ke atas dunia empiris. Melalui karya-karya besarnya seperti *Suicide* (1951) yang didasarkan hasil penelitian empiris terhadap gejala bunuh diri sebagai suatu fenomena sosial, dan *The Rule of Sociological Method* (1964) berintikan konsep-konsep dasar tentang metode yang dapat dipakai untuk melakukan penelitian empiris dalam lapangan sosiologi, Durkheim berusaha melepaskan pengaruh filsafat positif Comte dan Herbert Spencer.

Dalam perkembangselanjutnya setelah terlepas dari pengaruh filsafat dan psikologi, sosiologi mulai memasuki arena pergulatan pemikiran yang bersifat interen dikalangan teoritisinya sendiri pergulatan yang bersifat interen ini hingga sekarang masih saja berlangsung. Perkembangan sosiologi yang ditandai oleh pergulatan pemikiran yang bersifat interen ini tercermin dari adanya berbagai paradigma di dalamnya.

Jika demikian halnya, apa yang dimaksud dengan paradigma sosiologi? Apa sebab timbulnya paradigma sosiologi? Bagaimana hubungan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lain.

Menurut Robert Friedrichs paradigma adalah sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a discipline has of its subject matter*).

George Ritzer, dengan mensintesisasikan pengertian paradigma yang telah dikemukakan oleh Khun, MAsterman dan Frienrichs, mencoba merumuskan pengertian paradigma itu secara lebih jelas dan terperinci. Menurutnya paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (dicipline). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam suatu cabang ilmu menurut versi ilmuan tertentu. Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Bertolak dari pengertian paradigma di atas, satu hal dapat disimpulkan, bahwa dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu nampaknya dimungkinkan terdapatnya beberapa paradigma. Artinya (Ritzer. 9)

Istilah paradigma pertama kali dipergunakan oleh Thomas Kuhn dalam karya *The Structure of Scientific Revolution* (1962). Melalui karyanya itu, Thomas Khun menawarkan suatu cara yang bermanfaat terhadap sosiologi dalam mempelajari disiplin ilmu mereka. Khun sendiri sebenarnya bukanlah seorang sosiolog tetapi adalah ahli ilmu alam. Konsep paradigma yang diperkenalkan Khun kemudian dipopulerkan oleh Robert Friedrichs melalui bukunya *Sociology of Sociology* (1970).

Tujuan utama Khun dalam bukunya *The Structure Of Scientific Revolution* itu adalah untuk menantang asumsi yang beraku umum dikalangan ilmuwan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Kalangan ilmuan pada umumnya berpenirian bahwa perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan itu terjadi secara kumulatif.

Paradigma merupakan terminologi kunci dalam model perkembangan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan Khun itu. Malahan istilah paradigma dipergunakan tak kurang dari dua puluh satu cara yang berbeda. Masterman mencoba meredusir ke dua puuh satu konsep paradigma Khun yang berbeda-beda itu menjadi tiga tipe, yaitu paradigmaa metafisik (*methaphisical paradigm*), paradigma yang bersifat sosiologis (*Sociological paradigm*), dan paradigma konstrak (*construct paradigm*).

1. Paradigma Metafisik memeran beberapa fungsi:

- a. Menunjukkan kepada sesuatu yang ada (dan sesuatu yang tidak ada) yang menjadi pusat perhatian dari suatu komunitas ilmuan tertentu.
- b. Menunjukkan kepada komunitas ilmuan tertentu yang memusatkan perhatian mereka untuk menemukan sesuatu yang ada, yang menjadi pusat perhatian mereka.
- c. Menunjukkan kepada ilmuan yang berharap untuk menemukan sesuatu yang berhara untuk menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh ada yang menjadi pusat perhatian dari disiplin ilmu mereka.

Dengan demikian paradigma metafisik ini merupakan consensus yang terluas dalam suatu disiplin ilmu, yang membantu membatasi bidang (scope) dari suatu ilmu sehingga dengan demikian membantu mengarahkan komunitas ilmuan dalam melakukan penyelidikannya. Khun nampaknya mengartikan paradigma sebagai keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai serta teknik-teknik yang sama-sama

dipakai oleh anggota komunitas ilmunan tertentu. Menurutnyapun, dalam paradigma metafisik terdapat unsur yang disebutnya sebagai exemplar. Konsep exemplar menurut Khun pengertiannya lebih luas daripada matrik ilmiah.

2. Paradigma Sosiologi

Paradigma sosiologi ini sangat mirip dengan konsep exemplar dari Thomas Khun. Dalam edisi pertama bukunya Khun mendiskusikan keanekaragaman fenomena yang dapat tercakup dalam pengertian seperti: kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum yang diterima, hasil-hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil-hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum. Nampaknya menurut Khun hasil-hasil perkembangan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum inilah yang memperoleh kedudukan sebagai exemplar. Sebagai contoh, kedua hasil karya Durkheim yang disebutkan di atas mendapatkan pengakuan dan diterima secara umum di kalangan ilmunan sosial sehingga menempati kedudukan sebagai exemplar dalam paradigma sosiologi. Baik bagi paradigma fakta sosial maupun bagi paradigma definisi sosial.

3. Paradigma Konstrak

Paradigma kontraks adalah konsep yang paling sempit di antara ketiga tipe paradigma yang dikemukakan oleh Masterman di atas. Dicontohkannya pembangunan reaktor nuklir memainkan peranan sebagai paradigma dalam ilmu nuklir.

Persoalannya sekarang adalah mengapa terjadi perbedaan antara komunitas atau antar sub-komunitas dalam satu cabang ilmu, khususnya dalam metodologi? Dalam makna yang sama, kenapa timbul bermacam paradigma dalam sosiologi? Factor apa yang membedakan atau yang

menyebabkan berbeda? Persoalan di atas menurut George Ritzer disebabkan karena tiga faktor. *Pertama*, karena dari semula pandangan filsafat yang mendasari pemikiran ilmuan tentang apa yang semestinya menjadi substansi dari cabang ilmu yang dipelajarinya itu *berbeda*. Dengan demikian, asumsi atau aksiomanya menjadi berbeda antara kelompok ilmuan yang satu dengan kelompok ilmuan yang lain, dalam cabang ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain di antara komunitas-komunitas ilmuan itu terdapat perbedaan pandangan yang mendasar tentang pokok persoalan apa yang semestinya dipelajari oleh cabang ilmu yang bersangkutan. *Kedua*, sebagai konsekuensi logis dari pandangan filsafat yang berbeda itu, maka teori-teori yang dibangun dan dikembangkan oleh masing-masing komunitas ilmuan itu berbeda. Pada masing-masing komunitas ilmuan berusaha bukan saja hanya untuk mempertahankan kebenaran teorinya tetapi juga berusaha melancarkan serangan terhadap kelemahan teori dari komunitas ilmuan yang lain. *Ketiga*, metode yang dipergunakan untuk memahami substansi ilmu itu juga *berbeda* di antara komunitas ilmuan itu. Ketiga faktor inilah yang menjadi awal sebab arena pergulatan pemikiran dikalangan ahli sosiologi yang kemudian melahirkan beberapa golongan komunitas yang saling bersaing untuk mendapatkan dominasi dari paradigma tertentu mencoba menyangkal validitas paradigma yang lain. Dalam situasi persaingan demikian, dukungan terhadap suatu paradigma menjadi lebih banyak didasarkan atas pertimbangan politis dibandingkan dengan pertimbangan obyektif ilmiah. Komunitas ilmuan penganut paradigma tertentu berusaha merebut pengaruh melalui validitas teori yang dikembangkannya. Mereka yang menganut paradigma yang dominan akan mendapatkan alokasi kekuasaan yang menganut paradigma yang kurang dominan. Lagi pula dalam kondisi

obyektif tertentu orang cenderung untuk menganut paradigma yang dominan.

B. Paradigma Utama Sosiologi

Sebagaimana diungkapkan pada bagian di atas bahwa pada dasar tipe konsep paradigma sosiologi terus mengalami perkembangan. Tidak kurang dari dua puluh satu konsep paradigma sosiologi yang telah ada. Masterman mencoba mereduksi ke dua puluh satu konsep paradigma Kuhn yang berbeda-beda itu menjadi tiga tipe, yaitu paradigma metafisik (*metaphysical paradigm*), paradigma yang bersifat sosiologis (*Sociological paradigm*), dan paradigma konstruktif (*construct paradigm*).

1. Paradigma Fakta Sosial

Contoh paradigma fakta sosial ini diambil dari dua karya Durkheim. Durkheim meletakkan landasan paradigma Fakta Sosial melalui dua karyanya, yaitu *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Durkheim melihat sosiologi yang baru lahir itu untuk dalam upaya untuk memperoleh kedudukan sebagai cabang ilmu sosial yang berdiri sendiri, tengah berada dalam ancaman bahaya kekuatan pengaruh dua cabang ilmu yang telah berdiri kokoh, yaitu filsafat dan psikologi. Durkheim melihat filsafat sebagai ancaman dari dalam lewat dua orang tokoh sosiologi yang dominan saat itu, yakni Comte dan Spencer. Keduanya mempunyai pandangan yang lebih bersifat filosofis daripada bersifat sosiologis. Karena itu Durkheim mencoba menguji teori-teori yang dihasilkan dari belakang meja atau yang berdasarkan hasil pemikiran spekulatif itu dengan data konkret berdasarkan hasil penelitian empiris. Menurut Durkheim, riset empiris inilah yang membedakan antara sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan dari filsafat. Sebaliknya jika pekerjaan yang telah dirintis oleh Comte dan Spencer itu

dilanjutkan , maka sosiologi menurutnya tidak akan lebih daripada menjadi cabang filsafat.

Fakta sosial inilah yang menjadi pokok persoalan penyelidikan sosiologi. Fakta sosial dinyatakan sbagai sesuatu (*thing*) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi obyek penyelidikan dari seluruh ilmu pengetahuan. Ia tidak dapat dipahami melalui kegiatan mental murni (spekulatif). Tetapi untuk memahaminya diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Arti penting pernyataan Durkheim ini terletak pada usahanya untuk menerangkan bahwa fakta sosial tidak dapat dipelajari melalui introspeksi. Fakta sosial harus diteliti di dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yan lainnya.

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri dari atas dua macam:

- a. Dalam bentuk material, yaitu sesuatu yang dapat disimak, ditangkap dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata (*external world*). Contohnya arsitektur dn norma hukum.
- b. Dalam bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (*external*). Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat *inter subjective* yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia. Contohnya adalah egoisme, altruisme dan opini.

Durkheim tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk barang sesuatu yang nyata (*material thing*). Sebagian merupakan sesuatu yang dianggap sebagai barang sesuatu. Beberapa fakta sosial seperti arsitektur dan norma hukum adalah merupakan barang sesuatu yang berbentuk material. Alasannya karena dapat disimak dan diobservasi. Sedangkan fakta sosial yang lain seperti opini hanya dapat dinyatakan sebagai barang sesuatu, tidak dapat diraba. Adanya hanya dalam kesadaran manusia. Kedua macam fakta sosial itu adalah sama-

sama nyata (*external*) bagi individu dan berpengaruh terhadap mereka.

Fakta sosial yang berbentuk material mudah difahami. Norma hukum misalnya jelas merupakan barang sesuatu yang nyata ada dan berpengaruh terhadap kehidupan individu. Begitu pula arsitektur. Menurut Warriner kelompok adalah suatu fakta sosial yang nyata meskipun tidak senyata sebuah kursi atau meja. Ada empat kriteria yang dipakainya untuk menyatakan kehidupan kelompok sebagai barang sesuatu yang nyata (*reality*).

- a. Nominalist position, artinya kelompok itu bukanlah barang sesuatu yang sungguh-sungguh ada secara riil. Tetapi semata-mata merupakan suatu terminology atau suatu pengertian yang digunakan untuk menunjukkan kepada kumpulan individu. Kelompok dalam artian ini tak lebih dari sejumlah individu menerangkan perilaku individu baik secara perseorangan maupun dalam ikatan kelompoknya. Dengan demikian sosiologi telah diturunkan derajatnya oleh pandangan ini menjadi semacam cabang dari psikologi.
- b. Interaksiinisme (*interaksionism*). Penganut interaksionisme menolak perbedaan antara konsep individu dan kelompok. Mereka menyatakan keduanya sebagai fenomena yang tak dapat dibagi atau dipisahkan. Baik individu maupun kelompok tidaklah riil, kecuali sekedar terminology yang digunakan untuk pemahaman saja. Tidak ada individu tanpa kelompok dan sebaliknya tak ada kelompok tanpa individu.
- c. Neo Nominalisme. Neo nominalisme menerima proposisi yang menyatakan bahwa kelompok menunjukkan kepada sesuatu yang nyata-nyata ada (*objective reality*). Tetapi juga mengakui bahwa kelompok kurang riil dibandingkan dengan individu. Tingkat ke-riilannya ini membawa kita kepada persoalan filosofis: dapatkah barang sesuatu lebih riil atau kurang riil dibandingkan barang sesuatu yang lain?

d. Realisme. Doktrin ini berpegang kepada proposisi sebagai berikut:

1. kelompok sama riilnya dengan individu atau perseorangan, tapi,
2. keduanya abstrak, gunanya hanyalah untuk sekedar unit analisis.
3. Kelompok difahami dan diaplikasikan khusus dalam istilah untuk menerangkan proses sosial. Bukan untuk menunjukkan kepada psikologi individu.

BAB XV

KEBUDAYAAN

A. Pengertian Kebudayaan

Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata “buddhi” yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal”. Sebagian ahli mendefinisikan kata *budaya* sebagai suatu perkembangan dari majemuk *budi-daya*, yang berarti “*daya dari budi*” (Koentjaraningrat, 1981). Mereka membedakan “*budaya*” dari “*kebudayaan*”. demikianlah “budaya” adalah “daya dari budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan “kebudayaan” adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu. Istilah antropolog-budaya perbedaan itu ditiadakan. Kata “budaya” di sini hanya dipakai sebagai suatu singkatan saja dari “kebudayaan” dengan arti yang sama.

Sementara itu, dikalangan antropolog, kebudayaan seringkali diartikan secara berbeda. Sampai sejauh ini, berdasarkan literature yang, definisi kebudayaan yang dihasilkan antropolog sudah mencapai lebih dari 170 definisi.

Definisi kebudayaan yang paling tua dikemukakan oleh Edward B. Taylor pada tahun 1871. Kebudayaan oleh Taylor didefinisikan sebagai: “*keseluruhan yang kompleks meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat-istiadat dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat*”.

Sedangkan Alfred Weber mendefinisikan kebudayaan sebagai “*suatu bentuk ekspresional spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan, atau suatu sikap spiritual dan intelektual terhadap substansi kehidupan itu*” (dalam BassamTibi, 1999:73)

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Di dalamnya termasuk misalnya saja agama, ideology, kebathinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia yang hidup sebahai anggota masyarakat.

Menurut C. Wissier, C. Kluckhohn A. Davis secara mirip mengartikan kebudayaan sebagai: *perbuatan yang pada dasarnya merupakan instink, selanjutnya dimodifikasi dan dikembangkan melalui proses belajar. Sedangkan R. Linton mengemukakan, bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dan tingkah laku yang unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat tertentu.*

Robert H. Lowie mendefinisikan kebudayaan adalah “penjumlahan total apa yang dicapai oleh individu dari masyarakatnya—keyakinan-keyakinan, adat-istiadat, norma-norma artistic, kebiasaan makan, dan ukir-ukiran yang dimilikinya,,,” sebagai warisan masa lampau yang disampaikan melalui pendidikan formal atau tidak formal.

Sementara itu, Herkovits dan Malinowski memberikan definisi kebudayaan sebagai suatu yang superorganik. Karena kebudayaan yang turun-menurun dari generasi ke generasi tetap hidup terus atau berkesinambungan, meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan karena irama kematian dan kelahiran.

Hassan Shadly mengemukakan, kebudayaan berarti keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat, berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesame manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral hokum, adat istiadat, dan laiunya.

Secara umum istilah kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum,

adat istiadat dan lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kebudayaan adalah istilah yang kompleks. Begitu kompleksnya sehingga terdapat sangat banyak definisi tentang kebudayaan itu. Kluckhohn, misalnya telah melakukan pelacakan terdapat sekian banyak pengertian kebudayaan dan kemudian merangkumnya menjadi:

1. Keseluruhan cara hidup suatu masyarakat;
2. Warisan social yang diperoleh individu dari kelompoknya;
3. Suatu cara berpikir, merasa dan percaya;
4. Suatu abstraksi dari tingkah laku;
5. Suatu teori pada pihak antropolog tentang cara suatu kelompok masyarakat nyatanya bertingkah laku;
6. Suatu gudang untuk mengumpulkan hasil belajar;
7. Seperangkat orientasi-orientasi standar pada masalah yang sedang berlangsung;
8. Tingkah laku yang dipelajari;
9. suatu mekanisme untuk penataan tingkah laku yang bersifat normatif;
10. Seperangkat teknik untuk menyesuaikan, baik dengan lingkungan luar maupun dalam dengan orang-orang lain, dan
11. Suatu endapan sejarah.

Dengan demikian, kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk social, yang isinya ialah perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong serta menciptakan tindakan yang diperlukannya. Kebudayaan dalam konsep ini, mengandung dua unsure utama, yaitu: sebagai pola tindakan dan pola dari tindakan. Sebagai pola

dari tindakan, kebudayaan ialah seperangkat pengetahuan manusia yang berisi model-model yang secara selektif digunakan untuk menginterpretasikan, mendorong dan menciptakan tindakan atau dalam pengertian lain sebagai pedoman tindakan, sedangkan sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ialah apa yang dilakukan dan dapat dilihat oleh manusia sehari-hari sebagai sesuatu yang nyata adanya atau dalam pengertian lain ialah sebagai wujud tindakan.

Menurut Geertz, kebudayaan memiliki dua elemen, yaitu kebudayaan sebagai system kognitif serta system makna, dan kebudayaan sebagai system nilai. System kognitif dan system makna ialah representasi pola dari (*model of*), sedangkan system nilai ialah representasi dari pola bagi (*model for*). Jika “pola diri” adalah representasi kenyataan—sebagaimana wujud nyata kelakuan manusia sehari—hari, maka “pola bagi” ialah representasi dari apa yang menjadi pedoman bagi manusia untuk melakukan tindakan itu. Contohnya yang lebih sederhana adalah upacara keagamaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat merupakan pola dari, sedangkan ajaran yang diyakini kebenarannya sebagai dasar atau acuan melakukan upacara keagamaan adalah pola bagi atau model untuk (Clifford Geertz, 1999: 7-10)

Untuk memahami budaya, seorang pengkaji tidaklah berangkat dari pikirannya sendiri, tetapi harus berdasarkan atas apa yang diketahui, dirasakan, dialami oleh pelaku budaya yang dikajinya atau disebut sebagai *From The Nature Point's of View*, yang merupakan hakikat dari pemahaman antropologis (Geertz, 1983: 55).

Secara lebih jelas diuraikan, kebudayaan sebagai berikut:

1. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia, dan meliputi:

- a. Kebudayaan materiil (bersifat jasmaniah) yang meliputi benda-benda ciptaan manusia, misalnya kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lainnya.
 - b. Kebudayaan non materiil (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya: agama, bahasa, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
2. Kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar,
 3. Kebudayaan diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Tanpa masyarakat, kemungkinannya sangat kecil untuk membentuk kebudayaan. Sebaliknya, tanpa kebudayaan, tidak mungkin manusia (secara individual maupun kelompok) dapat dipertahankan kehidupannya.

B. Tiga Wujud Kebudayaan

Talcott Parsons dan A. L. Kroeber pernah menganjurkan untuk membedakan secara tajam wujud kebudayaan sebagai suatu system ide dari ide-ide dan konsep-konsep dari wujud kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola (Koedjaraningrat, 1966). J.J Honigsmann dalam bukunya *The World of Man* (1959:11-12) membedakan ada tiga gejala kebudayaan, yaitu:

- (a) ideas,
- (b) activities, dan
- (c) artifacts,

Menurut Koedjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya,
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat,

3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tak dapat di raba. (koendjaraningrat, 186).

C. Unsur-Unsur Kebudayaan

Luasnya aspek kebudayaan menimbulkan adanya telaahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Kondjaraningrat (2000: 2), mengemukakan unsure universal dari kebudayaan ada tujuh, yaitu:

- a. Sistem Religi dan upacara keagamaan,
- b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan,
- c. Sistem pengetahuan,
- d. Bahasa,
- e. Kesenian,
- f. Sistem mata pencaharian hidup,
- g. Sistem Tehnologi dan perlatan.

Sedangkan Herskovits mengajukan adanya empat unsur pokok dalam kebudayaan, yaitu:

- a. Alat-alat tekhnologi
- b. Sistem ekonomi
- c. Keluarga
- d. Kekuasaan politik

Sedangkan menurut Malinowski yang terkenal sebagai seorang pelopor teori fungsionalisme dalam antropologi menyebut adanya unsur-unsur pokok kebudayaan sebagai berikut:

- a. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat agar menguasai alam sekelilingnya.
- b. Organisasi ekonomi

- c. Alat-alat atau lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan; dan perlu diingat bahwa keluarga merupakan lembaga pendidikan yang utama.
- d. Organisasi militer.

D. Hakikat dan Perwujudan Kebudayaan

Walaupun setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang beraneka ragam dan berbeda-beda, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan di mana pun berada.

1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia,
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu dari lahirnya suatu organisasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan,
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.
4. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan (Soekanto, 1980: 177).

E. Fungsi Kebudayaan Bagi Masyarakat

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam maupun kekuatan-kekuatan lainnya di dalam masyarakat itu sendiri tidak selalu baik baginya. Selain itu, manusia dan masyarakat memerlukan pula kepuasan, baik dibidang spiritual maupun materiil. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut di atas untuk sebagian

besar dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri (Soekanto, 1999:155).

Menurut Ferdinand Tonnies dalam bukunya Somardjan (1998: 47) menyatakan bahwa kebiasaan mempunyai tiga arti, yaitu:

1. Kebiasaan dalam arti yang menunjuk kepada suatu kenyataan yang bersifat objektif, misalnya kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk tidur di siang hari, dan lainnya
2. Kebiasaan dalam arti kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi seseorang yang diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan yang menciptakan suatu perilaku bagi dirinya sendiri.
3. Kebiasaan dalam arti sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu.

Adapun unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah:

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian, misalnya apa yang baik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan apa yang sesuai dengan keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan.
2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya, seperti bagaimana orang harus berlaku.
3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (*cognitive element*) seperti misalnya harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lain-lain (Soekanto, 158)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 2002, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ahmadi, Abu, 1991, *Sosiologi Pendidikan*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.
- Baharuddin, 2007, *Nabdlatul Wathan dan Perubahan Sosial*, Perbit STIT Nurul Hakim Press dan Genta Press: Yogyakarta.
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*, Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Batubara, Muhyi, 2004, *Sosiologi Pendidikan*, Penerbit Ciputat Press: Jakarta.
- Buehler, Charlotte, 1970, *Psychology for Contemporary living*, Delta Book: New York.
- Craib Ian, *Teori-teori Sosial Modern dari Persons sampai Habermas*, Alih Bahasa Pal S Bout dan t. effendi, Penerbit rajawali press: Jakarta.
- Dirdjosiswo, Soedjono, 1985, *Asas-Asas Sosiologi*, Penerbit Armico: Badung.
- Durkheim, Emile, 1934, *The Elementary Form of Religious*, Penerjemah J. Swain, Free Press Of Glencoe.
- Etzioni, Amitai, 1982, *Organisasi-Organisasi Modern*, Penerbit: UI Press: Jakarta.
- Faisal, Sanafiah, (tt), *Sosiologi Pendidikan*, Penerbit Usaha Nasional: Surabaya
- Geertz, Clifford, 1961, *Santri, Abangan dan priyayi*, Diterjemahkan Mahasim,

- Gibson, James, L dan John M. Ivansevich; James H. Donnelly Jr, 1997, *Orgaisas, Perilaku, Struktur, dan Proses*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Grant, James. M, 1972, *Marginal Men in Developing National*, Dialogue, Volume. 5.
- Hagen, Everett E, 1972, *On the Theory of Social Change, How Economic Growth Begins*: New York.
- Hicter, Marcel, 1969, *The Angry Generatioan*, Unisco Courier.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L, 1990, *Sosiologi*, (Terjemahan) Erlangga: Jakarta.
- Hovde, Frederick L, 1973, *The University and Nasional Strenght*, University Series: Forum Lecture, VOA, Amireca.
- Ibrahim, Jabal Tarik, 2002, *Sosiologi Pedesaa*, Penerbit, UMM Press: Malang
- Johnson, Doyle Paul, 1994, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Jilid I*, (terjemahan, Robert LAwang, Penerbit Gramedia: Jakarta. Soemardjan, Selo, dan Soelaiman Soemardi, 1964, *Setangkai Bunga Sosiologi*, edisi pertama, Jakarta: Yayasan Badan Penerbit UI.
- Jones, Pip, 2009, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, Alih Bahasa Achmad FedyaniSaifuddin, Penerbit Yayasan Obor: Jakarta.
- Kingsley, Davis, 1967, *Human Society*, New York: The Maacmillan Company.
- Koentjaraningrat, 1987, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Penerbit Gramedia: Jakarta.
- Lauer, Robert H, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Penerbit Rineka Cipta: Jakarta.

- Mannheim, Karl, 1940, *Man and Society in an Age of Reconstruction*, Terjemahan Edward A. Shill, New York: Harcourt: Brace & World.
- Nasutuin, S, 1999, *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta
- Narwoko J. Dwi dan Suyonto, Bagong (Ed) (2006), *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Penerbit Kencana: Jakarta.
- Philipus dan Nurul Aini, 2004, *Sosiologi dan Politik*, Penerbit Rajawali Press: Jakarta.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*, Widiararana Indonesia, Gramedia: Jakarta.
- Soeprapto, H. R. Riyadi, 2002, *Interaksionisme simbolik: perspektif Sosiologis Modern*, pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Ritzer, George, dan Goodman J. Douglas, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Penerbit Kencana: Jakarta.
- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pegetahuan berparadigma Ganda*, alih bahasa, Alimandan, Penerbut Rjawali Press: Jakarta.
- Robbin, Stephen P, 1990, *Organization Theory: Structure, Design, and Application*. Prectice Hall International Inc. Englewood Cliffs: News Jersey.
- Robertson, Roland, 1995, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Penerbit Rajawali Press: Jakarta.
- Roucek dan Warren 1984, *Pengantar Sosiologi*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Roggers, Everett M, dan Floyd F Schoemaker, 1981, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, Usaha Nasional: Surabaya.
- Ross, Murray G, 1967, *Community Organization*, Harper dan Row Publishers New York.

- Rusli, Karim, 1999, *Islam, modernisasi, Industrialisasi*, Pustaka Jaya: Jakarta.
- Ruwiyanto, Wahyudi, 1994, *Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan, Pendekatan Analisis Organisasi Secara Kuantitatif*. PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Schneider, Eugene V, 1993, *Sosiologi Industri*, Penerbit Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
- Schein, Edgar H, 1991, *Psikologi Organisasi*, Pustaka Binaman Pressindo: Jakarta.
- Schneider, Eugene V, 1993, *Sosiologi Industri*, Aksara Persada Indonesia: Jakarta.
- Seokanto, Soerjono, 1999, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Rajawali Press: Jakarta.
- Slamet, Margono, 1997, *Kelompok Organisasi, dan Kepemimpinan* (Bahan Kuliah). Program Studi Penyuluhan Pembangunan Program Pascasarjana IPB: Bogor.
- Susanto, Astrid, 1999, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Penerbit Putra Bardin: Yogyakarta.
- Szilagyi, Adrew D and Marc J Wallace, 1990, *Organizational Behavior and Performance*, Harper Collins Publishers: Houston.
- Tilaar, H.A. R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Penerbit PT Grasindo: Jakarta.
- Umar, Hussein, 1998, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*, Penerbit PT Gramedia: Jakarta.
- Vego, Steven, 1989, *Social Change*. Practice Hall. Englewood Cliffs: New Jersey.
- Pansioen, J.A, 1968, *National Development, a sociological contribution*, Mauton the Hague.

- Perrucci, Knudsen, Hamby, 1977, *Sociology Basic Structures and Processes*, Brown Compeny Publisher, United State of America
- Peter, Mayer, Dohm, 1970, *The Role of University in The Developing Countries*, Universitas, Vol. 12 no 2.
- Ogburn, William F, dan Nimkoff, Meyer F, *Sociology*, Boston: A Pfeffer and Simons International University Edition, Toughton Mifflin Company.
- Weber, Max, 1958, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, Charles Scribner's Sons, New York.
- Weber, Max, 1978, *Ecinoic and Society*, University California Press, Berkeley, Angles London.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Penerbit Wacana Press: Jakarta.
- Zanden, J.W, V, 1993, *Sosiology The Core*, Therd Edition, The Ohio State University: New York.